EDISI 18/TH. VII/1993

BALAIRUNG

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Rp. 1.800,00



IDEOLOGIKU
terbang tinggi

API TIMOR
DALAM SEKAM

ISSN : 0215 - 076X

SEORANG supir sudah lazim patuh pada majikannya. Meskipun tak harus pasrah *bongkokan*, dan masih sejauh dalam kerangka tugas. Lain soal kalau supir itu Kresna dan majikannya adalah Arjuna dalam perang besar Mahabharata. Kresna, sang supir, tidak hanya *nyupir* namun juga memberi petuah, bertabur hikmah kehidupan pada sang majikan. Kebenaran memang tak harus datang dari orang yang punya struktur "di atas", tapi bisa dari mana saja, tak memandang kelas, juga jabatan, tanpa memandang hierarki.



SUYONO P.

Pancasila di media massa

Masih tabu dibicarakan

Laporan Utama (LAPUT) kali ini, kami berupaya mengambil api semangat Kresna. Berpikir obyektif, berpihak kebenaran, tentu tak lupa sikap ilmiah, kami sajikan laporan bertema perkembangan ideologi bangsa. Kami berharap, hasil liputan ini bisa memberi arti dalam suasana *jarig*, 48 tahun bumi pertiwi. Berbagai pihak kami libatkan dalam LAPUT ini, mulai dari intelektual kontroversial-Abdurrahman Wahid,Roeslan Abdulgani, Jend.(Purn.) A.H.Nasution, juga 560 mahasiswa UGM yang jadi responden dalam polling ideologi. yang kami adakan.

Ideologi memang masih merupakan tema yang dianggap *nyerempet* bahaya untuk dibicarakan. Tak kurang dari Pangdam VII Diponegoro memberikan statemen pada sebuah media bahwa laporan ini menyimpang dari kesepakatan nasional, bahkan diduga ada pihak ketiga yang menunggangi. Berbagai pihak yang "ikut peduli" pun tak ketinggalan memberi komentar, bahkan ada usul agar tema LAPUT diganti. Tentu saja usul ini mendapat tentangan dari banyak kerabat redaksi. Pertama karena - dengan api semangat Kresna - landasan awal tema ini adalah semata niatan jernih untuk ikut menyumbangkan pemikiran dalam tradisi ilmiah bagi perkembangan ideologi. Selain itu juga *eman-eman* karena reportase yang sudah cukup jauh. Akhirnya, jalan berliku telah kami lalui dan LAPUT ini berhasil kami persembahkan.

Tak hanya LAPUT yang kami suguhkan dalam edisi ini. Masih banyak rubrik andalan yang bisa anda simak. Kerabat kami, Bimo Nugoho dan Martin melaporkan kondisi Timor-Timur, propinsi "bungsu" di negeri kita yang sering dilanda gejolak. Ada banyak kejadian "panas-dingin" yang dialami Bimo dan Martin. Satu roll film hasil jepretan Bimo berpindah tangan ke petugas keamanan di kuburan Santa Cruz. Sudah pasti, bukan hanya itu yang patut disimak dari laporan perjalanan ini. Nah Pembaca, selamat menikmati!

Penjaga Dapur

BALAIRUNG

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

☐ **Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ☐ **Ijin Terbit** SK MENPEN RI No.1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK REKTOR No.UGM/UM/01/37 ☐ International Standard Serial Number (ISSN):0215-076 X ☐ **Pelindung**: Prof.Dr.Ir.Mochamad Adnan,M.Sc (Rektor UGM) ☐ **Penasehat:** Ir.Haryana,M.Arch. (Purek III UGM), Prof.Dr. Koesnadi Hardjasumantri,S.H., Drs.Amir Effendi Siregar,M.A., Drs. Jakob Oetama, Ir. Abdulhamid Dipopramono.☐ **Pemimpin Umum/PenanggungJawab**: Yuswohady ☐ **Sekretaris Umum:** Mardiyah ☐ **Pemimpin Redaksi**: Teguh Kresno Utomo ☐ **Wakil Pemimpin Redaksi**: Sunarto ☐ **Sekretaris Redaksi**: Suluh Pratithasari☐ **Pemimpin Perusahaan**: Dewi Ratnawulan ☐**Sekretaris Perusahaan:** Rahmi Lestarini ☐ **Kabag.Iklan:** I.Putu.Mandau W ☐ **Kabag Distribusi**: I.M.Agus Dwiatmika ☐ **Kabag.Keuangan**: Hastarini ☐ **Kabag Litbang:** Hendrasmo, Staf: Jamil Gunawan, Bimo Nugroho, Dwi Soufnita.. ☐ Staf Administrasi: Ratna Susy ☐ **Redaktur**: Mardiyah, Dewi R., Kurniawan, Sunarto, S. Pratitasari, Hendrasmo,Indriaswati D.S., Misrin A.A., Danarti W.,Anthony D.Martin, Bimo Nugroho, Rat na Susy I., Rahmi Lestarini ☐ **Redaktur Foto:** Suyono Prihantoro ☐ **Fotografer**: Kelik Supriyanto, Budi Fajriansyah ☐ **Redaktur Artistik**: M.Arifin ☐ Staf: Ratih Pratiwi, Bambang Supinardi, Pedy Artsanti, Sisdaryono, ☐ **Reporter** : Ririn Fatmasari D., Jamil Gunawan, Titin Rejeki, Frans Surdiasis, Timbul Sunoto, Dwi Soufnita,M.I mam Baskoro, Nasir Syar'an, Ahmad Fahmi, Rinda Runi Anitasari ☐ Staf Perusahaan: Sisdaryono, Dewi Nilasari, Aris, Timbul Sunoto ☐ **Alamat Redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp.88688 psw 1071 ☐ **Percetakan:** Liberty Offset, Jl.Jayengprawiran 21Yogyakarta, Telp.2908. Isi di luar tanggung jawab percetakan



Ketua Umum : Kurniawan ☐ **Sekretaris Umum** : Sunarto ☐ **Bendahara Umum**: Sri Naida ☐ **Ketua Departemen Pengkajian dan Pelatihan:** Rommy Fibri ☐ **Ketua Bidang Pelatihan**: Yulianto Sigit ☐ **Ketua Bidang Pengkajian**:Taufiqurrohman ☐ **Ketua Bidang Data dan Informasi**: Suyanto ☐ **Ketua Departemen Majalah**: Yuswohady ☐ **Ketua Departemen Surat Kabar**: Israr Ardiansyah.

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman folio. Yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai perangko secukupnya. Isi tulisan tidak mesti sejalan dengan pendapat redaksi.

BALAIRUNG

BERITA TEMA

IDEOLOGIKU TERBANG TINGGI

Praduga besar di penghujung millenium 2000 ini adalah ideologi, apapun alirannya akan tersingkir. Benarkah sinyalemen ini? Jika ideologi disepakati sebagai suatu sistem panutan dasar yang mempengaruhi pola berpikir dan bertindak suatu bangsa, kemudian hancur berkeping-keping. Lantas ikatan apalagi yang sanggunp menyatukan heterogenitas bangsa tersebut dari ancamanperpecahan lantaran perang saudara?

11




MANDAU

INSAN WAWASAN

YUSUF ARBIANTO

34

Danamon mencapai puncak sukses dari tangan dinginnya. Dia juga sosok yang peduli pada kita-kita yang di bawah. Juga, selalu setia merangkul mesra almamater yang telah membesarkannya. Dia ngomong dari kiat managemen, kredit macet sampai kesukaannya mengayun raket.

COVER : AMIR FATAH SOFYAN

Bogor, Jawa Barat.
Demikian informasi ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tony Alamsyah
aktivis ISES di Jakarta

Setelah kami cek kembali transkrip dan hasil rekaman wawancara dengan saudara Beathor Suryadi, memang saudara Beathor tidak menyebutkan apakah para tapol mahasiswa itu masih berstatus tahanan atau sudah bebas. Kesimpulan redaksi adalah bahwa nama-nama yang disebutkan saudara Beathor adalah nama-nama tapol yang pernah bersama-sama saudara Beathor mendiami LP Cipinang antara tahun 1989-1992.

KELIK SUPRIYANTO



Kepeleset

Yogya memang terkenal *pelesetan*-nya,yang jadi korban kali ini Coca Cola

Informasi

Saya ingin meluruskan informasi yang disampaikan oleh saudara Beathor dalam BALAIRUNG edisi 17/Th.VII/93, halaman 62 yang menyatakan bahwa di LP Cipinang Jakarta, Beathor menyebutkan masih banyak terdapat mahasiswa yang menjadi tahanan politik dengan besar hukuman berkisar antara satu sampai sepuluh tahun. Mereka adalah Erlangga dari Universitas Jayabaya, divonis tujuh tahun. Sepengetahuan saya, saudara Erlangga telah dibebaskan dari LP Cipinang sebagai tahanan politik sejak Agustus 1990, dan kembali melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya, juga melanjutkan studinya di Pasca Sarjana UI dengan mengambil bidang Ilmu Sosiologi Industri. Disamping kuliah, dia juga sebagai staf pengajar di Universitas Ibnu Khaldun,

Kode Etik

Saya mengusulkan kepada BALAIRUNG agar mulai merintis pembentukan Forum Komunikasi di kalangan pers mahasiswa Indonesia agar antar sesama aktivis terdapat tukar menukar informasi dan pengalaman, dan memperkecil adanya kegiatan pembajakan berita antar sesama pers mahasiswa. Setidaknya kasus majalah FE ECPOSE UNEJ edisi No. 10/Th.V/April 93 yang secara terang-terangan membajak AKADEMIKA penerbitan membuat tulisan yang sama sampai ke bahasa redaksionalnya. Bagaimana menurut pendapat BALAIRUNG tentang pelanggaran kode etik jurnalistik yang jelas-jelas dilakukan oleh ECPOSE ?

C.Jenyanad
Fakultas Teknik Universitas
Udayana, Bali.

Catatan redaksi : Tahun lalu sudah terbentuk PPMI, Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia . Melalui forum ini diharapkan kasus jiplak-menjiplak antar pers mahasiswa tidak terjadi lagi.

Melacak Penyair

Yth. BALAIRUNG,

Saya pikir BALAIRUNG perlu--sekali-sekali atau tiap kali-- melacak calon-calon atau yang sudah jadi penyair atau sastrawan UGM, untuk diekspos di majalah kampus tersebut. Tentu dengan penelusuran yang intens terhadap kreativitas dan produktivitas tokoh yang mau diangkat dan karyanya ditampilkan di 1 atau 2 halaman majalah ini. *Eh,* hitung-hitung menghibur dunia sastra kampus yang dilanda "represif" hingga seperti mati

Dimulya J.Amalik,
Mahasiswa Fak.Filasafat UGM

Kami nanti karya anda, siapa mulai?

Biasa-Biasa Saja

Mulanya saya agak kaget juga waktu membaca spanduk BALAIRUNG yang terentang cukup panjang di boulevard Bulaksumur beberapa hari lalu. Bagaimana tidak, BALAIRUNG mengucapkan "Selamat Datang Mahasiswa yang Biasa-biasa Saja," justru di saat spanduk lain berbunyi megah dan tak jarang berkesan bombastis, misalnya "Selamat Datang Intelektual Muda," "Selamat Datang Calon Pemimpin Bangsa," dan sejenisnya. Namun setelah saya renungkan, mungkin BALAIRUNG punya maksud lain dengan spanduk yang biasa-biasa tadi. Memang mahasiswa sekarang cenderung terbawa *mainstream* , arus besar yang melanda saat ini. Ingin cepat lulus, cepat kerja, dan cepat menempati kelas istimewa yang dilambangkan oleh mobil seperti kata Odili dalam buku Sosok Seorang Pejuang. Tentu saja, *mainstream* yang begini kurang sehat. Sebab tak bisa diingkari tanggung jawab mahasiswa sebagai intelektual muda tak sekedar mengasah ilmu serta kepandaian teknis lainnya. Apakah memang tujuan BALAIRUNG semacam otokritik terhadap *mainstream* yang seperti ini, saya kurang tahu. Tapi bagaimanapun, saya salut atas BALAIRUNG yang berani tampil beda.

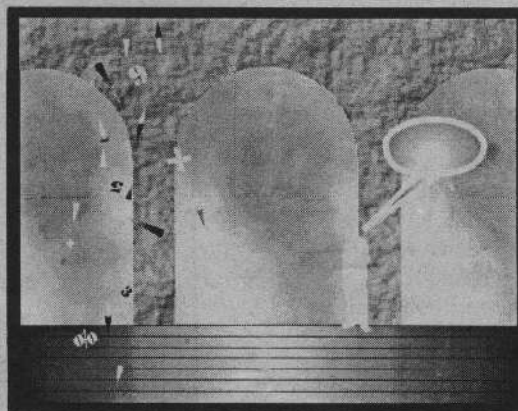
Landung Suhartanto
Jakarta.

Kurang lebih memang begitu maksud kami. Dan perlu Anda ingat, kata-kata tersebut pernah diucapkan Einstein di depan massa mahasiswa Universitas California, AS, yang kemudian dikutip oleh So Hok Gie dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran.

UGM dan Kepemimpinan Bangsa



Rektor UGM, Pof.Dr.Ir. Moch. Adnan, M.Sc, ketika diwawancarai setelah pembentukan Kabinet Pembangunan (KP) VI berkomentar, "Syukurlah ada dua alumni UGM yang duduk dalam kabinet, yaitu Menteri Kehutanan dan Gubernur BI". Dan hampir setiap KP alumni UGM tetap terwakili. Hanya saja seringkali tidak dalam posisi strategis. Alasannya, karena UGM terletak di pedalaman dan cukup jauh dari pusat kekuasaan. Karenanya ada yang mengatakan bahwa UGM sebagai universitas pedalaman posisinya cukup sebagai pengamat. Julukan pedalaman ternyata dapat membawa berkah. Salah satu ciri dari orang pedalaman ialah kuatnya ikatan kekeluargaan. Hal ini dinyatakan dalam wujud Kagama. Sebagai paguyuban alumni Perguruan Tinggi, Kagama memiliki anggota terbesar yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Di samping itu sebagai organisasi ia (baca: Kagama) dianggap yang relatif paling baik dibandingkan paguyuban sejenis. Kagama memang cukup disegani oleh banyak pihak, bahkan beberapa tahun yang lalu Kagama sempat memberikan usulan-usulan bernas dalam GBHN. Konon, alumni UGM banyak sekali yang menduduki posisi eselon satu. Jadi tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa UGM merupakan sumber penting sebagai penyedia SDM untuk birokrasi.


SISDARYONO

Bagaimana dengan kalangan cendikiawannya? Bila media cetak kita jadikan ukuran, dengan berani kita katakan bahwa keterlibatan cendikiawan UGM dalam kancah nasional sangat berarti. Cendikiawan politik, sosial, dan humaniora komentar maupun tulisannya banyak kita jumpai di koran dan majalah. Mungkin yang menyamai posisi UGM dalam konteks ini hanyalah UI. Pernah pula diadakan survei terhadap halaman artikel untuk koran *Kedaulatan Rakyat* dan *Kompas*, ternyata penulis dari UGM menempati peringkat pertama. Hanya saja di bidang iptek harus diakui bahwa posisi UGM mungkin di bawah ITB. Dalam bidang ini gaung UGM "kurang dikenal". Sedangkan dalam bidang agro, cendikiawan UGM harus bersaing ketat dengan IPB.

Kepemimpinan mahasiswa UGM dalam kancah nasional masih terbilang "lumayan". Berita tentang kegiatan mereka cukup deras diliput media cetak. Mulai dari isu SDSB, BPPC, Palestina, Bosnia, dan demonstrasi tertentu cukup mendapat perhatian. Keberadaan Jamaah Shalahuddin selama dalam waktu yang cukup panjang dengan aneka kegiatannya juga merupakan rekor tersendiri dibandingkan dengan kegiatan sejenis di kampus lain. Begitu pula kelompok-kelompok penelitian dan penerbitan menunjukkan kegiatan yang cukup berarti. Mungkin untuk bidang olah raga dan seni kegiatan mahasiswa UGM relatif miskin.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan kaca bagi kita bahwa UGM hingga saat ini masih terlibat aktif baik langsung maupun tidak langsung dalam proses kaderisasi pemimpin bangsa. Sementara itu kondisi di luar kampus berubah dengan cepat. Kompetisi yang ketat di tingkat global dalam segala bidang terutama ideologi dan ekonomi, juga menyentuh dunia kampus. Tuntutan-tuntutan baru telah muncul, seperti kualifikasi dari pengguna terhadap lulusan Perguruan Tinggi yang makin tinggi. Dengan berakhirnya perang dingin, isu keterbukaan makin ramai digaungkan. Pembangunan dituntut agar lebih bersahabat dengan alam dan banyak lainnya. Bagaimana mengakomodasi tuntutan tersebut? Dapatkah UGM tetap berperan sebagai *supplier* pemimpin di masa datang sebagaimana yang telah pernah dilakukannya? Bagaimana kesiapan perangkat institusi dalam menghadapi perubahan tersebut?

Sebuah mingguan beberapa saat yang lalu melansir bahwa UGM saat ini sedang paceklik Guru Besar(?) Padahal keberadaan Guru Besar dalam jumlah yang memadai merupakan keharusan bagi universitas besar seperti UGM. Bagaimana tanggapan Senat Guru Besar UGM tentang kritik tersebut? Nampaknya UGM telah berupaya keras untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara baik. Hanya saja untuk bidang-bidang tertentu, seperti ilmu-ilmu dasar, fasilitas tersebut jauh dari mencukupi. Fasilitas lain yang lebih penting lagi adalah usaha merekayasa atmosfer akademis agar UGM lebih kondusif terhadap ide baru yang terus-menerus datang. Karena, dalam atmosfer dan lingkungan yang baik kader-kader bangsa itu akan lahir. Akankah UGM tetap dan makin berfungsi sebagai fasilitator untuk munculnya kader-kader bangsa yang kualifikasinya pada masa-masa mendatang akan makin tinggi? Hal itu hanya mungkin dicapai bila ada kesediaan di kalangan sivitas akademika, utamanya staf pengajar dan mahasiswa untuk senantiasa membuka diri dan berdialog.

Drs. Chairil Anwar, M.Sc
adalah Staf Pengajar FMIPA UGM

Surat kepada Bapakku di Kampung TANAH MERAH

aku maklum bahwa semangat "Tentara Rakyat" yang masih sensual dalam nyali Bapak, memang bisa menyemburkan retorika perjuangan untuk mempertahankan Tanah Merah sampai titik darah penghabisan. maka itu sudah bisa kutebak jika para warga yang rumah-rumah kardusnya sudah rata dengan tanah oleh buldoser pihak penjajah, mau saja bergerilya membela Tanah Merah yang merupakan hak legal dari Allah Yang Maha Pemberi buat setiap makhluk yang bernama "Manusia!".

akan tetapi, selaku mahasiswa sekaligus anak Bapak yang baik, yang dulu ketika mau berangkat kuliah dari Tanah Merah menuju Yogya diupacarai dengan kenduri Yaasin-an oleh semua kerabat dan tetangga, aku ingin mengingatkan bahwa Bapak tidak boleh lupa bahwa musuh kita bukan lagi Kumpeni dari Belanda atau Nippon dari Asia, melainkan kemiskinan dan kebodohan yang sedang dibebankan dan dihidangkan didalam soal-soal ujian untuk kami pecahkan di atas meja sekolah.

ketika aku menolak melanjutkan sekolah selepas SMA karena berat meninggalkan Dik Fatimah, Bapak meletup-letupkan amarah dengan argumen yang sulit dibantah yaitu bahwa negara kita sudah merdeka sejak Proklamasi 17 Algustus 1945 sehingga pendidikan dan kekayaan bumi negeri ini -- termasuk Tanah Merah di dalamnya -- adalah milik kita yang sah selagi kita memakainya tanpa serakah.waktu itu, bukankah Bapak juga menampilkan ayat-ayat Qur'an tentang manusia progresif pengubah sejarah sebagai fitrah kemerdekaan dan kebebasan manusia dari thaughut atau tiran. Fitrah yang berdiri atas nama jihad fi-sabilillah, tanpa tendensi mengorupsi dan memanipulasi ayat-ayat suci untuk kepentingan pribadi. Lantas, Bapak mengatakan bahwa jika aku sekolah dan menjadi sarjana, itu sudah merupakan hak saya sebagaiputra bangsa, sebagai manifestasi politik etis yang benar-benar etis tanpa teror psikis yang menakutkan seperti jaman feodalis, jaman setiap titah Raja selalu menjafi hukum yang memaksa, waktu tak ada korespondensinya dengan fakta, walau tak ada pengacara yang membela.



Bapak, secara jujur aku simpati dengan kepemimpinan Bapak yang berani mengerahkan orang-orang kampung kita melakukan aksi membela diri mempertahankan Tanah Merah, walau hanya dengan mogok bertani setengah hari. Namun demikian, perlu Bapak mawas diri bahwa Bapak hanyalah mantan "Tentara Rakyat" yang tidak punya kartu pensiun sebagai veteran. jadi,



komitmen yang tinggi bukanlah ukuran untuk menjadi saksi atas harga diri dan martabat kita yang dikangkangi sebab jaman sudah merdeka dan musuh kita bukan lagi Kumpeni dari Belanda atau Nippon dari Asia.

dalam nurani, aku hanya ingin bersaksi, apakah Dik Itong mengerti tentang photocopy pernyataan sikap membela diri yang Bapak bagi- bagikan pada warga termasuk padanya? *"die 'kan bute aksare!"* terus, apa Dik Minah paham tentang isi yel-yel Bapak ketika tampil di mimbar aksi? *"tuh anak ngartinya ngomong Betawi doang!"* .na, kalau saja Bapak memperjuangkan lapangan bola kaki, Dik Pitung dan kesebelasannya yang terletak di dekat lembah pembuangan sampah, atau memperjuangkan tanaman apotik hijau di pekarangan Bi Mun, yakinlah bahwa mereka pasti lebih realistis dalam gerakan "pagar betis". dus, slogan-slogan secanggih sang orator Bung Karno pun tak usah lagi diberi catatan kaki.

terlepas dari semuanya, bagaimana pun aku tetap ingin menjadi anak yang sholeh dengan amal jariyah yang tak putus sampai ke Rahmatullah. aku tetap memintakan taufik dan hidayah kepada Allah Yang Maha Kaya buat Bapak dan Emak yang ikhlas memelihara, mengasuh dan menyusuiku hingga besar, hingga dewasa dan bisa sekolah seperti saat ini.

namun begitu, aku belum bisa menerima segala pernyataan surat Bapak seminggu yang lalu, yang merupakan balasan atas suratku tempo hari. isinya terlalu menyudutkan arti kemahasiswaanku yang Bapak cap secara general berbau "kiri-baru" dengan referensi "kanan" yang pro-Iran.

aku menyesal mengirimkan beberapa majalah kampus yang memuat tulisan-tulisanku dua bulan lalu sebab istilah-istilah yang dituduhkan padaku itu justru Bapak kutip dari isi artikel-artikel karyaku sendiri.

lebih dari itu, aku mengakui salut ats keberpihakan Bapak. semoga sikap itu mendapat ridha Tuhan hingga perjuangan rakyat Tanah Merah sampai ke pintu gerbang kemenangan yang gemilang. masalahnya, aku kuatir, kalau rumah-rumah kita sudar ibarat Bandung Lautan Api tempo dulu, lantas Dik Fat mau tidur dimana? bukankah dia sudah dewasa yang harus menjaga auratnya?

Yogyakarta, Agustus 1993

Dimulya J. Amalik
Penyair muda, tinggal di Yogyakarta


SIWO 93



Ideologi di antara intelektual dan PENGUASA

Mencari kata sepakat dalam memaknai ideologi ibarat mempertemukan sepasang garis sejajar pada satu titik simpul yang sama. Meskipun secara matematis ada yang mengatakan "bisa" pada jarak yang tak terhingga. Tapi jangan latah,* toh *ideologi bukan ilmu pasti.



Meminjam pendapat Soetjipto Wirosardjono, ideologi merupakan gagasan dalam kerangka premis filsafat. Dimulai pada akhir abad XIX sampai menjelang awal abad XX yang berlandaskan pada idealisasi manusia dan masyarakat yang dicita-citakan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Artinya, tentu saja ideologi tidak selalu kongruen dengan realitas sosial yang melatarbelakanginya karena secara implisit terlihat adanya suatu pengakuan bahwa *das sollen* belumlah menjadi *das sein*.

Lebih jauh, ideologi berbeda dengan utopia sebab ia (baca: ideologi) praidealisasi harus terlebih dahulu membedah realitas sosial dan berpijak pada kenyataan historis. Konsekuensi logis- nya, mau tidak mau ideologi pun sarat dengan muatan politik. Dus, berpengaruh pada pembentukan dan perubahan struktur sosial. Masih dalam konteks ini, adanya perbedaan dalam menyikapi dan memahami apa makna sebuah ideologi semakin tak terelakkan. Intelektual dan penguasa, misalnya. Harus diakui dengan arif bahwa kelahiran dan artikulasi ideologi selalu muncul di kalangan intelektual, yang dengan instrumen analisisnya selalu memandang ideologi secara lebih berimbang, luas, dan netral sebagai *a system of interrelated ideas and belief*. Kemudian merujukkannya dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dan yang lebih utama, intelektual tidak berkepentingan untuk menggunakan ideologi sebagai senjata konseptual untuk "menyerang" mitra dialognya. Dan berupaya mencegah agar ideologi tidak terjebak menjadi semacam "agama politik" seperti yang dilontarkan David Apter. Sebaliknya penguasa cenderung menerima dan mengoperasionalisasikan ideologi sebagai patokan-patokan baku yang mutlak dipertahankan dan mendiskualifikasikan pendapat lain yang "mungkin" berbeda. Atau menurut Prof. Karl Mannheim, menggunakan pemikiran yang mengideologis demi kepentingan tertentu yang notabene penuh dengan subyektifitas (*Ideologi dan Utopia, 1991*).

Senada dengan di atas, lantas apa peranan dan kontribusi mahasiswa? Jangan lupa, mahasiswa pada dasarnya adalah "intelektual muda", begitu yang sering diungkapkan Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. (mantan rektor UGM) dalam berbagai kesempatan. Dan dengan tegas menolak istilah "calon intelektual". Kalau begitu, salahkah jika kemudian mahasiswa pun ikut peduli dengan adanya fenomena kesenjangan antara ideologi sebagai etika dan pelaksanaannya (*Kompas*, 30/8-1991) dan sama sekali bukan mempersoalkan eksistensinya? Bagaimanakah dengan makna pernyataan ideologi terbuka? Ingat, pada hakekatnya perguruan tinggi bukanlah "Menara Gading" yang secara populer dipahami sebagai kehidupan suatu elite intelektual yang menyepi sendiri dalam suatu *splendid isolation*.

Pada akhirnya, pengabdian masyarakat bukanlah hanya sekedar salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi, melainkan pilar utama ilmu pengetahuan yang merupakan implikasi kalbu dari pikiran yang jernih dilandasi keikhlasan. Apabila ini pun kemudian dimaknai "hitam-putih" maka sebagian dari mereka akan bingung dan sedih. Dan, jangan salahkan pula jika kelak sebagian lainnya mungkin akan menjadi manusia-manusia bebal dan narsistik yang "serba tahu" tapi lepas dari konteks realitas sosialnya.

Teguh Utomo

Ideologiku terbang tinggi



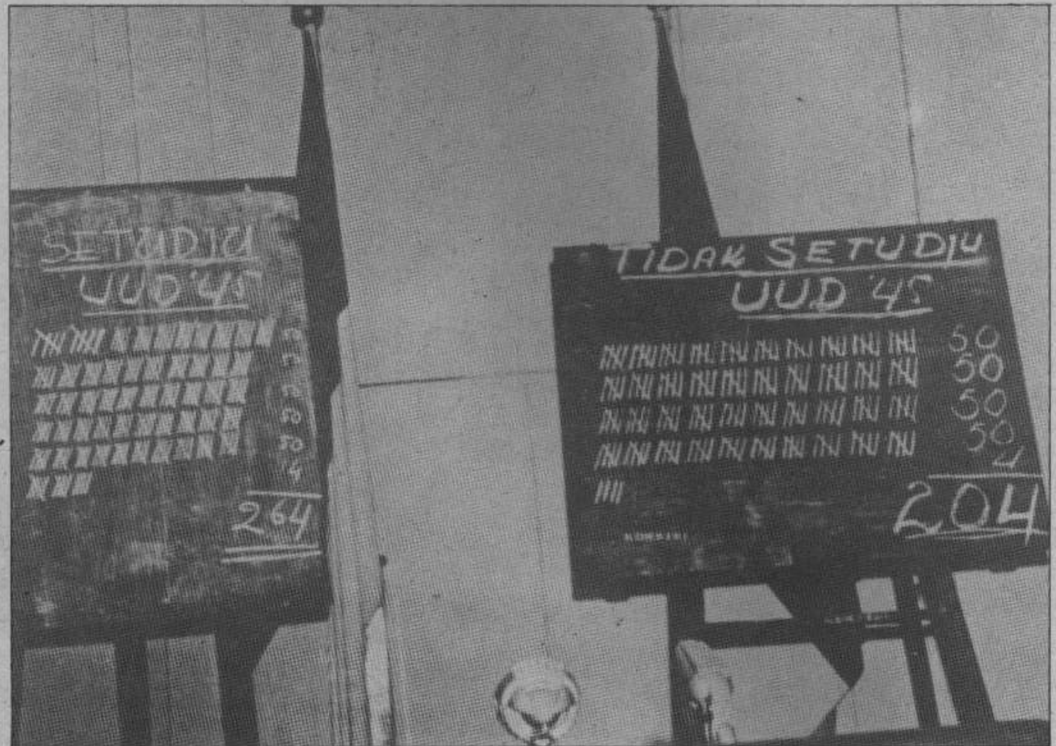
"Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri- kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan. Pantja Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saja sedjak berpuluh tahun.



TETAPI , saudara-saudara diterima atau tidak , terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saja sendiri mengerti seinsjaf-insjafnya, bahwa tidak ada satu Weltanschuung dapat mendjelma dengan sendirinja, menjadi *realiteit* dengan sendirinja. Tidak ada satu Weltanschuung dapat mendjadi kenjataan, mendjadi realiteit djika tidak dengan perdjoangan!" seru Bung Karno di depan sidang Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dua setengah bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan 48 tahun lalu.

Satu titik genting sejarah terlampaui setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil mensahkan Pancasila sebagai dasar negara RI. "Pancasila sebagai Dasar Negara RI sudah bukan persoalan lagi," tulis Ruslan Abdul Gani, Ketua Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7). Alasannya karena Pancasila sudah diterima oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

Ada baiknya sebuah pertanyaan dilontarkan mengenai dasar negara kita ini, mengacu pada pidato Bung Karno di atas: apakah Pancasila sudah menjadi realitas, sebuah kenyataan, atau masih berupa segumpal norma dengan 36 butir mutiaranya yang selalu berkilau di buku P4? Dalam kenyataan, Pancasila sudah tidak boleh dipermasalahkan lagi. Pancasila sudah menjadi keramat, begitu keramatnya sehingga M.Yogi S.M. secara tegas menyatakan bahwa tidak masanya lagi mengungkit-ungkit ideologi nasional.



Konstituante
Kompromi maksimal yang belum rampung

Sikap ABRI pun sebagai "pengawal" Pancasila yang sudah bersumpah setia dengan Sapta Marganya tidak berbeda jauh. Pada satu kesempatan Brigjen (Pol) Roekmini Soedjono telah menegaskan bahwa walaupun menerima perbedaan pendapat dalam pengembangan kehidupan demokrasi di negeri ini, ABRI tetap bersikap hitam putih bila perbedaan itu sampai mengganggu keutuhan sistem Pancasila. Seolah-olah membicarakan Pancasila sedikit saja bisa dicap subversif, keluar dari "kesepakatan nasional", atau tidak Pancasilais.



Perjalanan Ideologi

Merunut perjalan ideologi Pancasila sendiri, Cak Rus - sebutan akrab Dr.H. Ruslan Abdul Gani - mengakui bahwa pada awalnya Pancasila cuma menjadi dasar negara berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Tetapi pada perkembangannya Pancasila lalu menjadi ideologi negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, dan sederet sebutan lain yang di satu sisi memang mengokohkannya tapi di sisi lain membebani Pancasila itu sendiri.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI, ada usaha untuk meninjau kembali UUD'45 dengan dibentuknya Konstituante. Di tengah pergolakan di daerah-daerah, Konstituante memulai persidangannya pada tanggal 10 November 1956. Perwakilan-perwakilan dari puluhan partai berkumpul. Bisa dibayangkan bagaimana pergolakan pemikiran terjadi di dalamnya mengingat peserta sidang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda dan sukar dipertemukan. Dua tahun berlalu tanpa berhasil merumuskan UUD. Berbagai petisi dan demonstrasi bermunculan.

Konstituante - atas persetujuan Presiden Soekarno - akhirnya memutuskan untuk melakukan pemungutan suara untuk menetapkan UUD'45 sebagai UUD RI. Tiga kali pemungutan suara gagal mencapai jumlah 2/3 suara yang disyaratkan pasal 137 UUDS 1950. Setelah gagal pada pemungutan suara tanggal 2 Juni 1959, Konstituante reses. Presiden Soekarno akhirnya segera mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD'45.

Abdurrahman Wahid dalam Prisma nomor 6/Th.XIV/1985 menulis:" Usaha Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959 disusul dengan Demokrasi terpimpin tetap tidak dapat menolong memudarnya nyala nasionalisme itu. Segala macam usaha, seperti pemaduan berbagai ideologi dalam slogan Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunis), guna merangsang semangat kesatuan yang akan mendukung persatuan nasional dalam artinya yang dalam, akhirnya hanya berkesudahan pada kemacetan ideologis yang dicoba diatasi dengan menciptakan ancaman bahaya dari luar , yaitu Nekolim (Neokolonialisme) dan sebangsanya. Paham kebangsaan yang berwatak negatif, yang dihasilkan oleh cara-cara untuk menolong keadaan itu, akhirnya tidak dapat menahan proses irrelevansi itu. Setelah Orde Baru muncul, paham kebangsaan itu akhirnya disubordinasikan kepada sesuatu yang sama sekali tidak ideologis: pembangunan ekonomi".

Masa ini disinyalir Abdurrahman Wahid sebagai masa merosotnya peranan ideologi. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. berbagai pendekatan substitusif ditampilkan untuk menghilangkan ketergantungan terlalu tinggi kepada ideologi, dari dorongan berolah raga hingga terbentuknya kelompok-kelompok minat di kalangan remaja dalam berbagai bidang kehidupan.

Daniel Bell bahkan menyimpulkan lebih keras bahwa ideologi sudah mati, *The End of Ideology*, meski diakui olehnya bahwa ada masa dimana ideologi merupakan pembuka jalan bagi aksi. Tidak hanya merombak cara berpikir, tetapi dapat pula merombak keadaan rakyatnya. Namun pada satu titik akhirnya ideologi menemui jalan buntu karena terkena infeksi pragmatisme dan oprtunisme kaum teknokrat.

Namum Abdurrahman Wahid tidak sependapat dengan Daniel Bell. Pemimpin Nahdatul Ulama yang berkaca mata silinder itu melihat bahwa di negara-negara berkembang justru muncul re-ideologisasi dan re-tradisionalisasi yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada berbagai gerakan fundamentalistik dan militan dalam Islam, komunalisme orang Melayu di Malaysia, dan theologia pembebasan pada sejumlah aktivis Katolik di Amerika Latin. Reaksi penguasa menghadapi munculnya ideologi alternatif itu lalu membuat refleksi sendiri atas ideologi formal yang telah diterima semula, dengan demikian memantapkan kembali arti ideologi yang dah mapan seperti terlihat dalam pelbagai Penataran P4 dan Kewaspadaan Nasional di Indonesia.

Persoalan yang muncul dari perkembangan ini adalah tuntutan untuk menyusun suatu ideologi yang utuh dan lengkap yang menghimpun semua kekayaan yang terkandung pada bangsa Indonesia. Harapannya ideologi formal ini menjadi kekuatan dahsyat yang mampu menghadapi berbagai pengaruh ideologi luar dan meredam kemunculan ideologi tandingan di dalam. Berikutnya Prof. Dr. Notonagoro mencoba menyempurnakan Pancasila secara ilmiah menjadi suatu sistem filsafat. Karya besarnya, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, menjadi babon bagi peneliti dan pengajar Pancasila. Untuk menunjang usaha tersebut Laboratorium Pancasila berdiri di IKIP Malang dua puluh enam tahun yang lalu.

Sejak kekuasaan atas republik ini dipegang oleh Orde Baru, pembangunan ideologi mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan nasional bahkan dikokohkan dengan Tap MPR nomor II tahun 1978 yang menguraikan pedoman melaksanakan dan menghayati Pancasila. Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979 dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Kelembagaan BP7 ini dibangun dari tingkat pusat hingga Daerah Tingkat II yang secara intensif menyelenggarakan Penataran P4.

ISTIMEWA



Proklamasi
Pancasila disepakati sejak awal berdirinya Republik ini

Sayangnya, sosialisasi ideologi nasional ini tampaknya terlalu berlebihan. Beberapa mahasiswa Fakultas Filasafat UGM misalnya, bercerita tentang betapa sulitnya membuat skripsi, karena ada tuntutan dari pihak fakultas untuk selalu mengaitkan isi skripsinya dengan Pancasila yang kadangkala relevansi itu dipaksakan masuk. Sebuah ide baru dilontarkan Pangdam/Ketua Bakorstanasda Jaya Mayjen TNI AM Hendropriyono belum lama ini yang mencoba mentradisikan penulisan kertas karya perorangan (taskap) bagi setiap napi politik atau tersangkut perkara subversif yang hendak memperoleh pembebasan bersyarat. Materi taskap tersebut berkisar pada pemahaman, kesadaran, dan penghayatan tentang Pancasila dan UUD'45. Tradisi ini dilakukan pertama kali kepada Andi Mappatehan Fatwa yang divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terlibat kasus peledakan kantor Bank central Asia Jakarta, 1984 lalu.


ISTIMEWA

Penataran P4
Membuat bosan ?

Pemitosan Ideologi



Perdebatan soal arti ideologi memiliki tempat tersendiri dalam khasanah sejarah pergulatan pemikiran kaum cendikiawan. Dari rumusan etimologis oleh Destutt de Tracy (1754-1836), "kesadaran palsu" yang dituduhkan oleh Karl Marx (1818-1883), hingga Vilfredo Pareto dan Sosiologi Pengetahuannya Karl Mannheim.

Frans Magnis Suseno merumuskan ideologi dalam dua pengertian. Ideologi merupakan sistem nilai, kesadaran, cita-cita luhur, yang menjadi acuan suatu masyarakat dan tertanam secara implisit di batin warga negaranya. Ideologi dalam hal ini dimaknai ideologi terbuka, bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Artinya, ketika ideologi hanya menjadi sekedar alat bagi suatu kelompok tertentu untuk melegitimasi kekuasaan, maka dia tidak lebih dari sebuah "kesadaran palsu". Ketika itulah ideologi terjebak menjadi "ideologis", bersifat dogmatis, eksklusif, intoleran, dan totaliter. Ideologi semacam ini adalah idelologi tertutup yang secara historis terbukti gagal. Kegagalan komunisme di Uni Soviet dapat menjadi suatu contoh yang bagi Cornelis Lay merupakan cermin wajah keliru pelaksanaan ideologi Marxis.

Bagaimana dengan Pancasila? Dimana-mana pemerintah, baik presiden maupun aparatnya, selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Namun ada semacam tuduhan bahwa Pancasila telah dikeramatkan, dimitoskan, tidak boleh lagi diutak-atik, dan tertutup. Bagaimana tuduhan ini bisa timbul?

Dari polling yang disebar BALAIRUNG pada 560 mahasiswa UGM baru- baru ini, diperoleh pendapat bahwa hanya 60 % responden yang tahu bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Apakah ini mengindikasikan gagalnya transfer pengetahuan tentang ideologi nasional ini, padahal transfer pengetahuan itu telah dilakukan sejak di bangku Sekolah Dasar lewat pelajaran Pendidikan Moral Pancasila hingga kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi?

Berkaitan dengan pengeramatan Pancasila, 57,86 % responden setuju bahwa sekarang ini Pancasila telah dikeramatkan untuk melegitimasi perilaku



SISDARYONO

pihak-pihak tertentu. Pola pengeramatan dan pemitosan Pancasila bisa dilihat dari masih disosialisasikannya rasa takut terhadap bahaya laten komunis, seperti dengan membedakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang punya kaitan baik historis mapun genetis dengan G30S/PKI yang membuat warga tersebut terisolasi dari masyarakat umum dan menyebabkan perbedaan perlakuan di berbagai bidang kehidupan, juga pertanyaan-pertanyaan waktu membuat Surat Kelakuan Baik di kepolisian yang irelevan dengan masyarakat sekarang yang sebagian besar lahir pasca 1965. Padahal menurut 33,39 % responden BALAIRUNG, komunisme tidak lagi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara RI. Selain itu sikap hitam putih ABRI terhadap Pancasila, maupun kata-kata mujarab Pancasila yang sering dilekatkan pada kata-kata lain semacam Ekonomi Pancasila, Demokrasi Pancasila, Manusia Pancasila, dan seterusnya.

Tuduhan pemitosan ini nampaknya berdasarkan adanya asumsi bahwa Pancasila hanya boleh diiterpretasikan sepihak oleh penguasa, tanpa toleransi adanya kritik dan mekanismenya pun top down (Lihat "Menggali Kekuatan Ideologi"). Sehingga batas-batas wilayah perbincangan soal ideologi sangat kabur bagi masyarakat awam, sementara masyarakat akademis (seperti mahasiswa misalnya) nampaknya lebih suka "melarikan diri" dengan "adu jangkrik" tentang ideologi-ideologi besar semacam kapitalisme, komunisme, sosialisme.



Penataran P-4 Masih Perlu di Perguruan Tinggi :

Mengenai fenomena di dunia mahasiswa ini, kepada BALAIRUNG Frans Magnis Suseno yang meraih gelar doktor di Universitas Munchen dengan tesis tentang Marxisme itu melihat dua alasan. "Yang satu itu, pada mahasiswa ada kejenuhan dengan omongan tentang Pancasila. Saya berpendapat belum tentu ada kejenuhan terhadap Pancasila, tetapi Pancasila terlalu banyak diomongkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak hakiki Pancasila. Jadi Pancasila dengan lain kata sering dipakai secara ideologis untuk membenarkan macam-macam pembatasan. Misalnya kalau kita melihat Pancasila, sama sekali tidak jelas mengapa itu Pancasilais. Jadi orang mendengar terus. Kamu *nggak* boleh itu, kamu harus itu karena Pancasila." Hal inilah yang kemungkinan besar menyebabkan 46,07 % responden BALAIRUNG menganggap tidak perlu lagi adanya Penataran P4 di Perguruan Tinggi. Ini nyaris sebanding dengan 39,82 % yang masih menganggap perlu.

Romo Magnis melihat bahwa Pancasila hanya menjadi slogan dan menjadi ideologisasi berbagai pembatasan yang sebetulnya tak bersangkut paut dengan Pancasila. Satu lagi alasan yang diberikan romo yang suka mendaki gunung ini adalah: "Pancasila tidak dapat memecahkan berbagai persoalan operasional." Mengenai alasan terakhir ini, 30,18 % responden BALAIRUNG setuju atas pendapat Romo Magnis.



Komunisme Masih Menjadi Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia :



Reideologisasi dan Reposisi Ideologi

Globalisasi yang melanda dunia tidak bisa tidak mempengaruhi pula alam pikiran bangsa Indonesia. Tuntutan Amerika tentang kejelasan

hak-hak asasi manusia di Indonesia yang berpengaruh pada kebijakan politik dan ekonomi mereka bisa menjadi contoh. Belum lagi mata-mata negara luar yang bagaikan polisi dunia yang sok tahu urusan negara lain terus memfokuskan pandangannya pada negeri kita yang tercinta ini. Peristiwa sekecil apapun di Bumi Pertiwi ini jadi sorotan yang membuat kita lebih waspada dalam bertindak dan bicara.

Pada konteks kekinian, nampaknya ada tuntutan untuk lebih mengkongkritkan ideologi. Ideologi tidak cuma diharapkan bergerak di dataran ieal-normatif tapi lebih pada manifestasinya dalam kenyataan sehari-hari. Tidak cuma slogan kosong tapi lebih pada tindakan nyata.

Dalam Dialog Nasional 46 Tahun Kemerdekaan RI yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro tahun 1991 lalu di Jakarta, disimpulkan bahwa Pancasila sebagai etika bangsa telah terpisah dari kenyataan sehari-hari. Karena itu dibutuhkan upaya menumbuhkan motivasi kepada setiap individu bangsa untuk memajukan diri sehingga mampu mewujudkan yang ideal itu dalam kenyataan. Semestinya hal ini mempertahankan kekuasaan," lanjut Alfian.

Sebagai ideologi, menurut Alfian lebih jauh, Pancasila memiliki sifat



Telah Terjadi Kesenjangan Antara Pancasila Sebagai Sistem Nilai dan Dalam Pelaksanaannya :

SISDARYONO

mungkin dilakukan bila ideologinya sendiri terbuka terhadap perkembangan zaman.

"Ideologi yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat, terbuka dan dipersepsikan secara wajar dan sehat akan mampu menggerakkan bangsanya menjadi masyarakat industri modern dan maju," ujar Dr. Alfian pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V di Jakarta, September 1991 lalu. "Sebaliknya suatu ideologi yang tertutup apalagi dikeramatkan membuka peluang untuk menjadi alat manipulasi untuk terbuka. "Hanya saja," katanya,"bangsa kita masih mengalami kesulitan untuk memiliki sikap yang wajar dan sehat terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini karena bangsa Indonesia tidak memiliki kesempatan yang wajar untuk memahami, menghayati, apalagi mengamalkan Pancasila."

Apa yang disimpulkan Alfian tidak jauh berbeda dengan 508 atau 90 persen lebih responden BALAIRUNG yang setuju pada tuntutan bahwa Pancasila sekarang harus lebih terbuka untuk ditafsirkan dan didialogkan. Pendapat ini muncul tentunya karena adanya pandangan bahwa sampai sekarang belum terbuka untuk didialogkan dan ditafsirkan Tentu ini layak menjadi masukan bagi pemerintah sekarang dalam meningkatkan kwalitas mental manusia Indonesia untuk menyongsong masa depan. Untuk mewujudkan itu ada baiknya kita mengingat kembali apa yang diucapkan Soekarno dulu bahwa tidak ada satu Weltanschuung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas jika tidak dengan perjoangan. Perjuangan disini menuntut keterbukaan dengan dada lapang tanpa rasa curiga kecuali bahwa kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan itu. Bagaimanapun juga, potensi untuk tetap mempertahankan Pancasila adalah besar sekali.



Pancasila Harus Lebih Terbuka Untuk Ditafsirkan dan Didialogkan :

SISDARYONO

Langkah yang perlu segera diambil sekarang adalah melakukan reposisi atas Pancasila. "Kita perlu *repositioning,* Pancasila harus kita aktualisasikan dan fungsionalisasikan secara efektif," tegas Profesor Kunto Wibisono. Selain itu Kunto Wibisono melihat bahwa Pancasila sebagai ideologi dapat terintegrasi dengan norma dasar, fakta obyektif, dan teori ilmiah, sehingga reidelogisasi atas Pancasila dapat dilakukan.

Dari sini dapatlah diharapkan bahwa ideologi kita tidak terlalu tinggi terbangnya dibawa Sang Garuda, tapi masih bisa dilihat, dirasakan, dan diraih. Kesenjangan antara ideologi sebagai sistem normatif dimungkinkan untuk dijembatani menuju realitas yang diharapkan.

Kurniawan

Menggali KEKUATAN IDEOLOGI

suatu masyarakat tertendang balik pada primordialisme yang primitif suku, agama, ras ,dan antargolongan. Ataukah ini merupakan sublimasi nyata ketika ideologi kebal terhadap kritik? Sepakat dengan gugatan *Mashab Frankfurt* yang didalangi Adorno dan muridnya, Habermas bahwa suatu bangsa pasti melewati tahap rasional kritis ketika membangun ideologinya. Tetapi setelah jadi, ideologi itu menjadi irasional, sebuah doktrin yang otoriter dan menindas daya kritis masyarakat

Praduga besar di penghujung millenium 2000 ini adalah ideologi, apapun alirannya akan tersingkir. Benarkah sinyalemen ini? Jika ideologi disepakati sebagai suatu sistem panutan dasar yang mempengaruhi pola berpikir dan bertindak suatu bangsa, kemudian tiba - tiba hancur berkeping - keping. Lantas ikatan apalagi yang sanggup menyatukan heterogenitas bangsa tersebut dari ancaman perpecahan lantaran perang saudara?



KITA barangkali masih tak habis pikir ketika terbangun pada suatu pagi dan mendengar berita bahwa Uni Soviet yang adidaya sudah tidak ada lagi. Pudarnya tali pengikat Soviet sebagai satu kesatuan ternyata berbuntut kekeruhan politik yang panjang dari Rusia sampai Nagorno Karabakh. Masih di belahan dunia yang sama, Yugoslavia, misalnya, seolah menjadi cermin rapuhnya ideologi sebagai pemersatu ketika ia hanya bertumpu pada kharisma sang pemimpin Yosef Brozs Tito. Kini mantan Yugoslavia tercabik-cabik perang antaretnis yang makin membuncah dalam adukan sentimen agama yang berbeda.

Peta dunia di Eropa Timur seakan begitu cepat berubah hanya dalam hitungan beberapa tahun. Ideologi mereka, komunisme, mengalami kebangkrutan. Disusul runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 3 Oktober 1989 menjadi simbol kongkrit dari kegagalan sebuah ideologi untuk membumi. Namun buru-buru Ralf Dahrendorf mengingatkan bahwa ini bukan potret kekalahan komunisme *vis a vis* kapitalisme. Amerika Serikat, yang meng*agul-agul*-kan kapitalisme liberal, ternyata tak sanggup menyembunyikan parahnya luka yang mereka derita selama ini, kebencian rasial dan frustrasi kolektif yang menghela individu pada sektarianisme. Kerusuhan rasial di Los Angeles dan aksi bakar diri massal para pengikut David Koresh yang dikepung FBI, dari kacamata psikologi sosial, hanyalah puncak-puncak kasus dari gunung es yang membenam dalam samudera kapitalisme liberal. Inikah era *The End of Ideology* yang disumbarkan Daniel Bell? Ketika orang sudah mulai tersenyum sinis pada ideologinya sendiri. Ketika

bangsa.

Nah, bagaimana dengan Indonesia? Atau mungkin dengan sedikit berbisik, bagaimana dengan Pancasila? BALAIRUNG mengangkat problematika ini untuk membuka katup-katup dialog tentang ideologi, Pancasila pada khususnya. Tentu saja dengan maksud baik demi persatuan dan kesatuan bangsa tercinta ini. Untuk Temu Wicara kali ini, BALAIRUNG mengundang Prof. Dr.

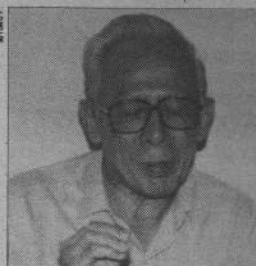
Koento Wibisono (Guru Besar Fakultas Filsafat UGM yang juga rektor UNS Surakarta), Drs. Cornelis Lay, M.A. (staf pengajar Fisipol UGM), Dwi Joko Winarno (mahasiswa Fakultas Teknik UGM), Saefulloh (mahasiswa Fakultas Filsafat UGM), dan Eric Hearrie (mahasiswa Fisipol UGM). Temu Wicara dipandu oleh Bimo Nugroho Sekundatmo yang sekaligus menuliskannya.

Kekuatan Ideologi

Berangkat dari lontaran pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua peristiwa di atas? Prof.Dr. Koento Wibisono mengabstrasikan abad ini sebagai abad ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai temuan-temuan yang sangat mencengangkan, bahkan mungkin tidak terduga oleh para ahli yang terlibat dalam riset dan penelitian itu sendiri. Iptek kemudian menjadi sesuatu yang substantif, dalam arti sangat menentukan kehidupan umat manusia. Koento menggarisbawahi jawabannya, "Dengan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi secara ekspansif telah mengubah gaya hidup manusia". Sejalan dengan fenomena tersebut, terjadilah tiga proses transformasi masyarakat. Pertama, transformasi masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat industri. Termasuk di dalamnya terjadi perubahan dasar pola pikir dari *mithos* ke *logos* yang merombak tata nilai, cara kerja dan mobilitas sosial. Kedua, transformasi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional. Dan ketiga, transformasi hubungan nasional menjadi global mondial. Maka untuk mengakomodasikannya, diperlukanlah suatu ideologi sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Memperkuat pendapatnya, Koento menambahkan, "Ideologi menjadi sangat dibutuhkan sebagai penyaring yang kuat untuk menghadapi perkembangan politik internasional yang mengimbas politik nasional"


Eric Hearrie

Argumen di atas kemudian ditolak oleh Eric Hearrie. Pemimpin Umum Majalah Sintesa Fisipol UGM ini menandaskan :"ideologi merupakan korban kepentingan penguasa dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan...". Jika Koento lebih memijak basis kultural, agaknya Eric cenderung menggunakan landasan struktural. Sambungnya, "Sebab pada kenyataannya, ideologi sangat efektif dan efisien sebagai pembenar perilaku negara". Lihat saja kalau sesuatu sudah diembel-embeli kata Pancasila, orang tidak berani lagi mengutak-utik, di situlah titik lemah ideologi. Sementara Saefulloh, dengan menyitir Habermas, mempertanyakan daya kritis ideologi. Pada awalnya ideologi dilahirkan lewat refleksi para bapak pendiri bangsa dengan diskursus yang sangat intelektual dan kritis, tetapi mengapa ketika diterapkan, ideologi menjurus pada pemaksaan dan menjadi alat legitimasi kekuasaan? "Masalahnya jadi makin rumit ketika ideologi hanya diinterpretasikan oleh penguasa tanpa toleransi terhadap adanya kritik. Mekanismenya pun *top down*. Kesannya kita ini harus makan bubur terus, padahal bubur itu tidak kita sukai." ujar Saefulloh.


Koento Wibisono

Sedangkan Cornelis Lay menilai wajar kalau setiap penguasa dimanapun dan dengan cara apapun selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya. "Adalah goblok kalau penguasa tidak suka *status quo*. Logika kekuasaan adalah satu pihak yang berkuasa mempertahankan kekuasaannya melawan pihak lain yang berusaha merebut kekuasaan." Cornelis menekankan, "Bagaimanapun ideologi adalah suatu doktrin, tetapi tidak tepat jika harus disosialisasikan dengan cara indoktrinasi".

Memang harus dipisahkan ideologi sebagai landasan ideal dan ideologi sebagai manifestasi sejarah. Sebagai landasan ideal, ideologi Pancasila tidak bisa dinilai gagal misalnya dengan melihat merajalelanya korupsi pada birokrasi pemerintahan. Sedang pada level manifestasi sejarah, semua ideologi pernah gagal. Namun ideologi terus mengalami transformasi. Runtuhnya Tembok Berlin sebagai lambang kegagalan komunisme bisa dianggap akhir dari sebuah sejarah tapi bisa juga dianggap sebagai awal dari sebuah sejarah yang baru. Cornelis menambahkan, "Menurut saya, gagalnya komunisme adalah cermin wajah keliru pelaksanaan ideologi marxist".

Menanggapi pernyataan tersebut, Dwi Joko Winarno berpendapat bahwa ideologi dalam dataran aksi agaknya cenderung menciptakan keruwetan sosial yang pada akhirnya makin meningkatkan kemiskinan. Lantaran manusia tidak ditempatkan sebagai aktor, dan kekuatan - kekuatan tandingan selama ini selalu dianggap konfrontatif, tidak dianggap sebagai mitra. Menurut Pemimpin Umum Majalah Clapeyron Teknik Sipil UGM yang akrab dipanggil Jokwin ini, ideologi mustinya selalu terbuka dalam arti yang sebenarnya. "Keterbukaan bisa diawali dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan tandingan. Protes pembelaan lingkungan hidup dan konsumen misalnya, sebetulnya efektif menekan niat buruk kapitalis yang cenderung serakah. Selain dari dalam negeri, bisa jadi kekuatan itu datang dari luar negeri. Belajar dari Insiden Dili, bisa jadi reaksi pemerintah bakal lain apabila tekanan dari luar tidak segencar saat itu." ungkap Jokwin.

Tetapi sekalipun tidak ada desakan gencar yang direkayasa, sesungguhnya secara alamiah penguasa akan dipaksa memberikan hak bagi pemikiran-pemikiran alternatif untuk menginterpretasikan

ideologi. Cornelis mencantumkan agenda penyusutan sejumlah sumberdaya alam sebagai pemicu untuk memberikan kemudahan politik pada sekelompok kelas. Jelas tidak akan mungkin penguasa menanggung seluruh biaya pembangunan. Peran swasta akan semakin besar dalam memberi kontribusi, baik berupa pajak maupun investasi. "Dengan sendirinya mendorong pemerintah untuk membagi akses politik, termasuk melepaskan monopoli interpretasi terhadap Pancasila", ungkap Cornelis.

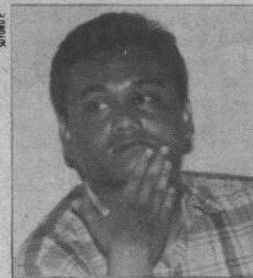

Cornelis Lay

Kuncinya: Pendidikan Politik

Lantas infrastruktur apa yang perlu diperkuat? Koento yakin jawabannya adalah pendidikan. Sebab, "Hanya manusia yang sadar dan terdidiklah yang bisa diajak melakukan perubahan struktural", tegasnya. Hakekat pendidikan dalam pengertian ini mengacu pada *a matter of having* dan *a matter of being*. Yang pertama maksudnya, manusia dididik untuk kritis menguasai iptek dan pengalaman akademis. Sementara yang kedua berarti pendidikan membentuk jati diri manusia yang mengakar. Ini penting untuk membongkar realitas yang masih harus terus diperbarui. Sebab demikian pula dahulu Pancasila dilahirkan. "Pancasila lahir dari masyarakat yang harus kita bentuk dengan membongkar realitas kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan" komentar Koento.


Saefulloh

Sekarang, bagaimana caranya? Profesor *sepuh* yang masih tampak gagah ini sepakat dengan Cornelis bahwa ideologi Pancasila tidak bisa diajarkan dengan cara indoktrinasi. "Kita perlu *repositioning*, Pancasila harus kita aktualisasikan dan fungsionalisasikan secara efektif. Pertama, pemerintah harus memberikan suri tauladan yang baik. Kedua, memperkuat pendidikan sebagai *a matter of being*. Dan ketiga, *Political will* yang seimbang dengan *Political encouragement*". Lebih praksis lagi, Eric mengusulkan demokratisasi yang memberi kebebasan berpikir, termasuk dalam masalah ideologi. "Penguasa jangan seenaknya main tangkap dan memenjarakan orang diskusi" ujar Eric berapi-api. Di lain pihak Eric mengkritik dengan pedas mahasiswa kekinian yang tidak berpikir ideologis, melainkan sangat pragmatis. Membalik kritik Eric, Cornelis dengan sinis menyindir mahasiswa yang tidak demokratis dalam keseharian kampus. Sering mahasiswa itu tidak bisa mendengarkan pendapat temannya sendiri. "Itu saja dengan rekan sederajat, apalagi jika esok ia jadi pemimpin bangsa menghadapi rakyat yang ada di bawahnya" sergah pakar PDI ini. Korupsi di birokrasi juga tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba, tak usah menutup mata bahwa dalam berbagai kegiatannya, mahasiswa juga belajar melakukan korupsi dengan teknik yang canggih, tandasnya lebih lanjut.


Dwi Jokowinarno

Jokwin dan Saefulloh lebih menyorot pada pola pendekatan. "Saya mengusulkan reideologisasi dengan pendekatan komplementer radikal, yakni reideologisasi untuk melengkapi apa yang telah ada dan baik, dan ini harus dilaksanakan dengan tegas" kata Jokwin. Sementara Saefullah mensyaratkan pembebasan dari mitos-mitos Pancasila yang dilebih-lebihkan. "Sebab, ini akan semakin menjauhkan Pancasila sebagai norma ideal dengan realitas yang ada" demikian argumentasi Saefullah. Menurut Koento semua itu bisa dilaksanakan dengan metode integralistik. Pancasila sebagai ideologi terintegrasi dengan norma dasar, fakta obyektif, dan teori ilmiah. "Kalau hanya mengawang-awang pada norma, kita akan terjebak pada fanatisme yang dogmatis. Sebaliknya teori saja, ya jadinya teoritikal. Dan kalau cuma berpijak pada data, bisa-bisa kita kehilangan idealisme dan menjadi pesimis" timpal Koento.

Aktor-aktor Ideologi

Usai membahas budaya, sistem, dan metode yang menjadi variabel penting ideologi, perbincangan sengaja tidak dialirkan ke masalah teknis seperti penataran P4 untuk menghindari muara sekedar perbaikan teknik dan cara. Problem yang lebih fundamental menyangkut personifikasi kekuasaan. Tak bisa tidak Temu Wicara bakal menganalisis struktur kekuasaan dan wilayah perbincangan pun menukik pada sebuah pertanyaan, siapa *The Real Power*? Semua pembicara sepakat bahwa sebagian besar *aparatus ideology* dibesarkan dalam iklim militer. "Harus diakui bahwa pendidikan ABRI sekarang lebih sistematis dan disiplin," ungkap Koento yang juga mengajar di LEMHANAS. "Hasilnya mereka lebih rasional dalam mengelola kekuasaan, termasuk dalam menerapkan ideologi. Jenjang struktur mereka runtut dan terseleksi, kelemahannya, mereka cenderung memakai sistem komando dan indoktriner," tambah Koento dengan bijak. Untuk itu diperlukan kekuatan pengimbang yang meredusir kelemahan tersebut, baik yang bergulat di dalam struktur maupun di luar struktur. Lantaran pada akhirnya ideologi akan hancur kalau ia tak mampu mengangkat harkakemanusiaan. Menyitir kalimat Jokwin, "Sudah semestinya ideologi memanusiakan manusia" □

Bimo Nugroho



Tidak semua orang mahfum akan ideologi. Dia adalah barang 'mewah' milik segelintir orang.Dan konon penginterpretasiannyapun menjadi monopoli segelintir orang. Berangkat dari situ, kami ingin mendapatkan perspektif lain mengenai ideologi tersebut. Tentu saja dengan maksud melengkapi Laporan Utama kali ini.

Untuk itu Tim Laput kami memburu beberapa nara sumber. Kurniawan bersama Dewi Ratnawulan menemui filosof STF Driyarkara Frans Magnis Suseno, Roeslan Abdulgani, Ketua P7, serta Jend.(Purn.) A.H. Nasution , mantan Ketua MPRS. Sedangkan Teguh Utomo dan Suyono Prihantoro memburu Abdurrahman Wahid, ketua PB NU dan ketua Pokja Forum Demokrasi. Bersama Gus Dur Wawancara berlangsung di RS Ciptomangunkusumo disela kesibukannya menunggu istrinya yang terkulai sakit. Petikan hasil wawancara kami turunkan secara berurutan dari Gus Dur, Roeslan Abdul gani, Frans Magnis Suseno, yang ditutupNasution

Gus Dur : "Political Will, Omong Kosong!"

K.H. ABDURRAHMAN WAHID



Menurut Anda, apa makna suatu ideologi?

Harus dibedakan 2 macam ideologi. Pertama, ideologi sebagai sistem resmi yang mengatur kehidupan suatu bangsa, seperti Pancasila dsb. Kedua, ada lagi ideologi sebagai secara umum, yaitu pandangan atau wawasan suatu bangsa secara umum tentang kehidupannya sendiri dan apa yang dia ingini. Itu namanya ideologi sosial, tentunya bukan suatu yang resmi atau doktriner tapi berkembang sebagai suatu tujuan utama. Karena itu tidak perlu harus utuh atau jelas rumusannya, cukup terasa saja. Contohnya dalam bangsa kita posisi agama yang ikut campur dalam segala hal seperti politik, ekonomi, dll. Berarti ideologi sosial bangsa kita mengacu kepada masalah keagamaan. Sekarang lebih tinggi daripada masa lalu, tidak tahu bagaimana nanti.

Bagaimana dengan Pancasila dalam konteks ini?

Lho, Pancasila kan doktrin. Ajaran-ajaran doktrin yang mengatur kehidupan bangsa kita.

Dr. Soedjatmoko (alm.) pernah mensinyalir bahwa suatu ketika ideologi-ideologi di dunia akan mengalami kebangkrutan, sebagai ilustrasi komunisme, misalnya. Bagaimana Pancasila menyikapi realitas ini?

Ada satu yang harus kita sadari bahwa ideologi itu akan langgeng bila ada kegunaannya. Artinya, ada pengajawantahannya dalam kehidupan. Nah, dalam dunia komunis salah satu aspek kehidupan egalitarian hilang. Munculnya aparat partai menjadi kelas baru. Berarti paham komunis yang menghendaki persamaan penuh tidak tercapai. Harapan yang dijanjikan oleh Marxisme-Leninisme terasa kosong, tidak ada arti apa-apa bagi bangsa dan rakyat, lalu ditinggal. Yang ada semata-mata hanyalah tafsiran dari atas oleh elite-elitenya yang tidak dimengerti oleh yang di bawahnya. Bagaimana dengan Pancasila? Ya sama saja, kalau Pancasila diperlakukan demikian!

Andaikan ada perbedaanaan interpretasi dalam memaknai Pancasila di tingkat elite dengan massa rakyat, bagaimana menjembataninya?

Tidak bisa dijembatani! Suatu ideologi formal itu harus menuntut legalitas yang sama karena dia alat untuk mengukur basis kehidupan kehidupan bangsa, apa yang dicapai dll. Dengan demikian maka tidak bisa dalam suatu bangsa ada 2 tafsiran ideologi. Pancasila itu suatu kompromi: Suatu pandangan di mana dasar-dasar negara a, b, c,



SUYONO P.

K.H. Abdurrahman Wahid

dst. Kompromi ini pertama-tama menghasilkan tidak ada negara agama di Indonesia.

Negara Sekuler ?

Bukan sekuler! Jakarta Charter dihapuskan dari pembukaan UUD 1945. Ini kan namanya kompromi politik.

Tentang konsep Pancasila sebagai ideologi yang terbuka?

Ya harus obyektif. Pancasila harus dipertahankan! Dia berlaku untuk semua, itu lho. Jangan hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil yang harus ber-Pancasila. Yang lain nyatanya masih korupsi

Dengan demikian dalam tataran normatif-ideologis Pancasila tetap baik kan?

Nggak ada gunanya ngomong normatif-ideologis, sebab norma itu terasa sebagai suatu paksaan. Masa kita aja yang dipaksa ber-Pancasila, yang di atas enak-enakan. Perasaan itu sekarang meluas. Sebetulnya kalau dilihat secara klinik-patologis Pancasila sudah berada pada stadium yang mengkhawatirkan.

Maksudnya?

Ya mengkhawatirkan. Buktinya kelakuannya itu tidak satupun yang cocok dengan Pancasila. Semuanya ber-Pancasila tidak lebih sebagai tata krama. Artinya, pengertian Pancasila secara sungguh-sungguh sudah tidak ada, baik rakyat maupun pemerintahnya. Kalau Pancasila jalan terus kan nggak ada korupsi. Mulai dari bikin KTP sampai dengan masuk Akmil ada korupsi. Itu rakyat sudah tahu semua.

Lantas persoalannya cara menyikapi kondisi ini?

Ya nggak bisa dibiarkan terus! Nanti bisa timbul revolusi sosial. Semua orang tahu kok, cuma nggak berani ngomong saja. Lho, rakyat sudah ambil tindakan sendiri-sendiri kok. Ada copet dipukulin sampai mati. Itu kan tindakan main hakim sendiri. Bikin larangan dijebol, ada rambu-rambu lalu-lintas dilanggar. Semua maunya sendiri.

Apakah pandangan seperti itu terlalu revolusioner?

Lho, itu kenyataan kok. Itu kan proses, selama kita tidak mampu mencarikan saluran yang benar, akan meletus. Ada kemungkinan kepada Cina, kepada agama-agama lain selain agama Islam.

Situasinya chaos?

Ya mungkin ke sana. Mudah-mudahan saja ada kesadaran orang- orang tertentu, terutama elite-elitenya ini.

Berarti kita mengharapkan adanya political-will?

Ah, political-will itu omong kosong! Kita muak dengan slogan- slogan, seolah-olah persoalan rumit bisa beres dengan political-will. Omong apa itu! Para ilmuwan itu sama saja dengan penjahat menutup-nutupi kebobrokan yang ada dengan slogan- slogan ilmiah.

Mungkin perlu diantisipasi dengan UU?

Bagaimana mau jalan, tiap-tiap buat UU diakali begitu rupa supaya nggak kena dia. Setiap orang begitu mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Apapun dibikin perkecualian, agar kelompok "saya" tidak terkena. Saya katakan harus ada obyektivikasi Pancasila. Sesuatu yang berlaku obyektif bagi semua, termasuk sanksi-sanksi Pancasila, yaitu sanksi-sanksi hukum.

Dari fenomena di atas, mungkin kita harus membuat suatu agenda sosial apa yang mesti dilakukan?

Nomor satu, kenyataan hidup itu sendiri yang harus dibenahi. Tidak bisa dong Pancasila itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ngomong begitu kan P-4! Dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam arti mari kita tegakkan peraturan ini bersama-sama. Kalau kena, ya kena termasuk yang paling gede sekalipun tanpa penghindaran-penghindaran Ini jelas butuh dialog terbuka. Bukan monolog seperti selama ini. Kita ngomong sendiri, sana ngomong sendiri. Kita tidak bicara Pancasila an sich, tapi rakyat terus terang tidak bisa menerima pelaksanaan Pancasila yang gombal!.Mahasiswa juga harus menyadari benar problem Pncasila bahwa dia hanya berhenti pada slogan,kenyataan praktek kehidupannya lain.

Roeslan Abdulgani :

"Mana Mungkin Buto Jadi Satrio"

DR. ROESLAN ABDULGANI



Dalam pelaksanaannya banyak terjadi kesenjangan antara Pancasila sebagai sebuah sistem dan Pancasila dalam dataran empiris.

Bagaimana pendapat bapak tentang fenomena ini?

Saudara mestinya mengikuti keadaan sekarang ini dari perspektif sejarah. Sebab kalau tidak tahu asal mulanya, nanti bisa kacau. Pancasila itu, secara primer adalah dasar negara, yaitu waktu Pak Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan pada dewan itu, "Dasar Indonesia merdeka ini apa?" Bung Karno yang menjawab pertanyaan ini. Lewat pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Akhirnya, tahun 1950-an, setelah melalui berbagai *macem-macem*, tahun 1959 kita kembali ke UUD 1945, ada pikiran supaya Pancasila juga diartikan sebagai ideologi.,bukan hanya sebagai dasar negara. Tahun 1965, waktu PKI menikam dari belakang, Pak Harto bilang bahwa Pancasila harus kita lestarikan, sehingga kemudian timbul TAP MPR NO.II/1978 yang mengatakan bahwa Pancasila itu selain dasar negara juga sebagai ideologi, juga pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Kita dalam negara Pancasila punya pandangan tentang demokrasi, saya tidak tertarik untuk menggunakan demokrasi Pancasila. Saya lebih tertarik untuk mengatakan bahwa dalam negara Pancasila itu ada kekhususan demokrasi. Sama halnya dengan kita bilang konsekuen terhadap UUD 1945, tapi tidak dibaca, ya sama saja.

Lantas, fungsi Pancasila sebagai ideologi itu apa?

Ideologi adalah satu rangkaian kesatuan dari *idea* dan *ideal*, gagasan dan cita-cita. Tapi itu masih ngambang kalau tidak dipaku dalam negara. Ya sudah, dipaku sebagai dasar negara. Misalnya, kalau sudah kita sepakati berbicara demokrasi, demokrasi bukan tujuan, dia sekedar alat.

Demokrasi jadi nomor dua?

Dalam perkembangan selanjutnya, boleh berubah. Karena bukan tujuan, tapi alat. Tujuan itu keadilan sosial. Dulu, tahun 1955, banyak asrama ABRI yang milih PKI. Bung Karno, Nasution kaget. Untuk mencegahnya, tentara nggak boleh milih, tapi dikasih jatah. Nah, sekarang, tentara dianggap stabilisator, *macem-macem* "tor" dari Pancasila Itu memang bisa dimengerti karena PKI. Tapi sekarang kan nggak. Semua sudah Pancasila, baik PDI, maupun PPP, maupun Golkar. Pada waktu itu saya mengusulkan pada pimpinan AD untuk kalau saudara besok sudah anggap tidak ada lagi bahaya, saudara milih saja lagi. Sebab, dimana-mana tentara ikut milih. Cuma di Indonesia yang tidak. Ada waktu itu seorang menteri berkata, "Di seluruh dunia tidak ada tentara yang memilih." Nah, itu menterinya yang *bego*. Tentara dimana-mana milih. Tapi, terus ada yang tanya, "Pak, kalau nanti kita milih, siapa yang kita pilih?" Ya, terserah. Golkar *kek*, PDI *kek*, PPP *kek*, semua kan Pancasila. Terus tanya lagi, "Siapa yang mewakili kita?" Ya nggak ada, nggak ada jatah. Mereka nggak mau. Apa ini bertentangan dengan Pancasila? Jadi, saban kali kita mesti tanya, hati nuranimu *yok opo*?


Dr. Roeslan Abdulgani

Kalau saudara sekarang melihat, gimana DPR kok diam saja? *Lha wong* yang duduk di DPR itu eksekutif yang sudah *dijejeli* KORPRI. Sedikit yang dari masyarakat. Nggak ada yang berani ngomong. Bahwa ada orang yang menyalahgunakan Pancasila itu jelas. *Wong* menyalahgunakan agama saja ada kok.

Bagaimana dengan efektivitas Penataran P4 sekarang?

. Manusia Indonesia itu satu persatu mau dijadikan baik, ditatar semua. *Lha*, tapi kan soalnya, sekarang saya tanya, apakah buto cakil, buto-buto itu, bisa ditatar menjadi satria? Nah, Filsafat Jawa itu turun-temurun. Di masyarakat mana pun juga, ada masyarakat yang sifatnya buto, Betara Kala, ada yang satria. Satria digambarkan orang Jawa kurus-kurus dan gagah, tapi buto digambarkan gemuk-gemuk dan rakus. Tapi, apa bisa buto ditatar jadi satria, apalagi buto yang tersembunyi. Jadi, di sini memerlukan perjuangan.

Banyak yang bilang, penataran sudah jenuh, bikin bosan . Bagaimana pendapat Bapak?i

Penataran itu ada segi positifnya. Tapi kemudian, *sing diomongno* itu soal klasik. Siapa penggali Pancasila, Bung Karno atau Yamin, atau ini, atau itu. Bosan orang! Apalagi kalau dikaitkan persyaratan, kalau keliru jawab nggak lulus. Anak-anak kita dididik jadi pengecut. Pernah anak saya bilang, "Pak, kata guru saya, kalau saya nulis Bung Karno, saya dicoret. Tapi, kalau saya nulis Yamin, saya lulus." Terus saya tanya, "Lha kamu ingin lulus apa ingin dicoret? " "Ya, ingin lulus," katanya. *"Yo, mbujuko wae!"* (ya, bohong sajalah-Red). Tapi hatinya nggak, ini yang berbahaya.

Maka saya usul, itu jangan dibicarakan lagi. Bicaralah problem sekarang : globalisasi, jatuhnya komunis tapi di RRC masih, kapitalis. Jadi, materi SD tidak diulang lagi di SMP atau di SMA. Kejenuhan itu bukan karena tidak baik. Tapi karena *kapiken* (terlalu baik-Red). Coba, saudara saya suguhi bakmi enak saban hari. Saban hari bakmi terus, kan *kepingin* tempe. Jenuh. Kejenuhan itu karena terus-menerus.

Oh ya Pak, tentang komunis tadi, apakah masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia ?

Ancaman yang sekarang bukan lagi komunisme, tapi kapitalisme. Komunisme sudah berantakan, kecuali di RRC. Kapitalisme

sekarang, ada tiga : Jepang, Amerika dan Eropa. Bung Karno dan Bung Hatta sudah meninggal. Andaikata masih hidup, pasti juga heran. Ini orang Indonesia bicara apa, kok masih ngomong itu-itu saja.. Generasi sekarang kan situasinya sudah lain.

yang sebetulnya tidak hakiki Pancasila.

Jadi Pancasila dengan lain kata serinng dipakai secara ideologis untuk membenarkan macam-macam pembatasan, misalnya kalau kita melihat Pancasila sama sekali tidak jelas mengapa itu tersangkut dengan Pancasila. Entah sangkut paut dengan apa. Dengan sistem sekarang, cita-cita Pancasila justru untuk sebagian belum terlaksana. Misalnya cita-cita sila ke-4, cita-cita Keadilan Sosial, tetapi juga persatuan nasional. Dalam arti tertentu kita melihat bahwa mereka yang justru secara profesional harus memajukannya, yaitu para pejabat yang justru memperlihatkan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini membuat orang jenuh. Ini penyalahgunaan ideologis. Tapi saya kira ada satu alasan lain, Pancasila tak mampu memecahkan berbagai persoalan operasional. Misalnya keadilan sosial. Keadilan sosial bagi saya membongkar struktur ketidakadilan, terutama struktur-struktur yang mempertahankan orang dalam kemiskinan, struktur-struktur ketergantungan yang sudah ada. Demokratisasi salah satunya, adalah cara untuk mengusahakan keadilan sosial. Nah, apakah keadilan sosial itu mau dicapai dengan jalan kapitalisme murni? Hanya pertumbuhan. Atau suatu ekonomi campuran dengan negara impresionis. Atau masyarakat dengan ekonomi yang agak birokratis dan direncanakan. Atau dengan masyarakat yang betul-betul sosial, tanpa milik pribadi atau alat-alat produksi. Itu dalam Pancasila tidak disebutkan. Nah, kalau mahasiswa lalu berdebat tentang sosialisme atau kapitalisme itu wajar. Karena sedang mencari operasionalisasi Pancasila. Pancasila itu bukan suatu operasionalisasi, tapi nilai-nilai. Kita masih bertanya bagaimana mewujudkannya. Itu yang akan kita cari. Mungkin kadang-kadang yang kontroversial harus dibicarakan. Jadi menurut saya, sayang sekali yang didiskusikan bukan Pancasila, tapi konflik atau kontroversi. Mungkin kalau ada penyalahgunaan Pancasila, itulah yang bisa didiskusikan.

Tetapi ada asumsi bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diganggu gugat.

Nah, tidak boleh diganggu gugat. Tetapi kalau betul Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka, maka dia tidak boleh terus- menerus begitu. Ya, digugat saja...!.

Saya dapat membandingkan dengan *Declaration of Independent*-nya AS. Kalau seorang Amerika mengganggu gugat deklarasi itu, misalnya dengan mengatakan bahwa di sana banyak pikiran liberalisnya, tapi dalam kenyataannya-baik

Frans Magnis Suseno : "Ya, Gugat Saja"

DR. FRANS MAGNIS SUSENO

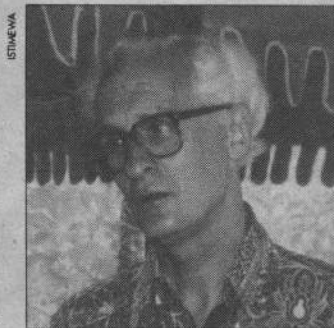


Demikian lama kita telah menerima Pancasila sebagai ideologi negara, tapi mengapa kalangan rakyat bawah dan mahasiswa sendiri enggan berbicara soal ideologinya sendiri?

Saya kira ada beberapa alasan. Kalau mahasiswa, saya melihat minimal dua alasan. Yang satu itu, pada mahasiswa ada kejenuhan dengan omongan tentang Pancasila. Saya berpendapat belum tentu ada kejenuhan tentang Pancasila, tetapi Pancasila terlalu banyak diomongkan untuk hal-hal Pancasilais. Jadi orang mendengar terus. Kamu nggak boleh itu, kamu harus itu karena Pancasila. Harusnya ia mengatakan nggak bener itu Pancasila. Tapi lama-lama ya bosan. Ia juga bosan dengan Pancasila. Jadi yang dibosani itu Pancasila yang diomongkan.

Jadi, Pancasila sebagai slogan ?

Ya, sebagai slogan juga sebagai ideologisasi berbagai pembatasan yang sebetulnya tidak


ISTIMEWA

Dr. Frans Magnis Suseno

kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya-mereka masih sering menyeleweng dari semangat atau implikasi deklarasi itu. Semangat deklarasi itu memang dijiwai oleh Soekarno, tapi bukan berarti terus semua kebijakan mereka diterapkan di sini, karena boleh jadi banyak kemunafikan padal mereka. Mereka terus-menerus mengkoreksi diri dengan cita-cita mereka. Dan, kadang-kadang saya kagum , karena Amerika masih sering berhasil keluar dari bermacam-macam kemunafikan dan kebohongan dengan mengacu pada cita-cita mereka.

Nah, kita juga harus terus mengisinya. Misalnya ada tantangan dalam ekonomi. Sekarang sudah berbeda, saya sendiri berpendapat bahwa sosialisme kapitalisme itu baik. Pancasila tidak memecahkan masalah kita secara operasional, melainkan merupakan acuan pemecahannya. Tetapi pemecahan sendiri harus berdasarkan keahlian kita, juga harus berdasarkan wawasan atau cakrawala nilai-nilai aktual yang kita hadapi.

A. H. Nasution : "Itu Hanya Taktik"

A.H. NASUTION

Bagaimana cerita kompromi maksimal antar golongan, sampai tercapai konsensus nasional?

Kok saya yang ditanya?

Karena Bapak , kan sebagai pelaku sejarah, sebagai ketua MPRS ketika Dekrit 5 Juli

Memang ada panitia penyatuan tafsir yang terdiri dari semua golongan. Hasilnya, kalau sudah dibawa ke soal itu, yah begitulah. Biarpun dikasih waktu satu tahun, ya *nggak* selesai. Itu pengalaman saya. Mengertilah apa yang saya maksud.

Maksudnya?

Kami pada waktu itu sebagai pimpinan MPRS, sudah berkonsensus tentang pengamalan Pancasila. Pancasila itu nilai-nilai, perlu norma. Nilai itu tentang baik buruk dan untuk pelaksanaannya perlu norma. Yang penting itu norma-norma, itulah UUD 45. Kalau ini sudah dilaksanakan, berarti sudah tercapai apa yang dimaksud oleh UUD 45.

Jadi yang penting itu normanya?

Ya. Konsensus kami terakhir sebelum kami dibubarkan, itu berarti sudah semua unsur ada di



DOK PRIBADI

A.H. Nasution

situ (Badan Konstituante). Tapi pemerintah punya pandangan lain. Mengapa orang-orang Indonesia selalu saja tidak lepas dari konflik kepentingan politik? Selalu saja ada orang yang bilang jangan percaya dan terima Pancasila. Itu hanya taktik. Atau ada yang bilang, "Ah, Pancasila apa itu!" Ya, sebenarnya pembicaraan tentang politik memang mengasyikkan. Tidak pernah selesai. Kalauorang mau makan, ya makanan itu selalu ada. Kami semua sudah sepakat, karena sudah lari di tempat begitu lama. Soal itu sebenarnya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu normatifnya adalah melaksanakan konsekuensi UUD.

Bahwa ada perbedaan pendapat di dalamnya, menurut umat Islam itu rahmat.

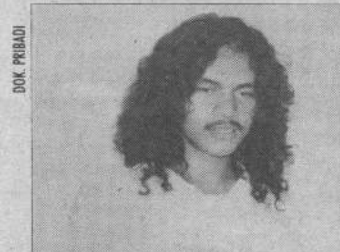
Jadi, saat itu apakah memang dasar negara dibicarakan?

Ya, memang dibicarakan. Dan saya bilang konsekuen dengan UUD 45. Tapi orang semakin tidak menyebut UUD-nya, tapi semakin menyebut Pancasila-nya. Ini saya kira obyek diskusi yang enak. Tapi untuk mencari penyelesainnya, karena bermacam-macamnya, orang tidak bisa merumuskan semuanya secara pasti.

Bagaimana mengenai peranan ABRI disini?

Peran ABRI menjaga norma-norma itu dengan melaksanakan Sapta Marga. Hubungan ABRI dan Pancasila itu adalah membela ideologi tanpa kompromi. Sedangkan Sapta Marga yang ketiga itu adalah ajaran dari Pak Dirman.

Ideologi dan Formasi Sosial Kita


DOK. PRIBADI

Nezar Patria
Wakil Pemimpin Umum
Majalah Pijar Fakultas Filsafat UGM



Diskursus tentang ideologi agaknya kembali menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini. Diskusi rumit soal itu seakan mendapat kontekstualitasnya, manakala dunia terhenyak menyaksikan tumbangnya ideologi negara-negara blok Timur, sosialisme. Sebelumnya, orang tak pernah mengira kalau Tembok Berlin bakal runtuh dan eksperimen sosialis yang muncul sebagai kritik terhadap ekonomi pasar bebas, mengalami kebangkrutan seperti saat ini.

Analisa yang muncul berkaitan dengan fenomena itu pun bermacam-macam. Ada yang bilang kejatuhan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur lainnya karena birokraksinya berwatak sentralistis dan otoriter. Sementara bagi kaum pascamodernis, fenomena itu sendiri menjadi bukti dari dekonstruksi sejarah atas ideologi-ideologi besar. Ini sekaligus menjadi penolakan terhadap otoritas suatu kekuasaan untuk merumuskan kebenaran. Bagi pascamodernis, yang sedang getol diakrabi oleh intelektual kita saat ini, kebenaran berfilsafat plural, *hic et nuc*, tanpa perlu peduli pada rantai historis.

Tapi, lepas dari itu, pluralitas memang menjadi persoalan bagi negara heterogen dan mempunyai bingkai ideologi tersendiri. Pluralitas mengandaikan adanya kepentingan yang beragam. Oleh karenanya ia menjadi persoalan tersendiri bagi negara yang mempunyai legitimasi ideologi yang khas. Untuk Indonesia misalnya, apakah Pancasila dapat mengakomodir perbedaan kepentingan tersebut sehingga ia mampu menjadi sebuah sistem representasi yang eksis dan punya peranan sejarah dalam masyarakat? Pertanyaan ini, sebelum terjawab, agaknya memancing tuntutan untuk menyinggung ideologi secara definitif.

Pada awalnya, istilah ideologi dipakai oleh Antonie Destutt de Tracy sekitar akhir abad XVIII di Perancis. Bersama kawan- kawannya, dan di bawah pengaruh filsuf Perancis Bonot de Condillac (1715 - 1780), bercita-cita menemukan hukum-hukum pikiran. Tapi dalam arti kontemporer, kata ideologi sekan-akan melekat dengan vokabulari marxis. Menurut Karl Marx, cara manusia berpikir dan menilai mempunyai fungsi yang mendukung struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pandangan-pandangan tentang moral, budaya, sistem hukum adalah "ideologi", yang merupakan bagian dari superstruktur. Bagi Marx, ideologi adalah kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral tertinggi tapi sekaligus menyelubungi kenyataan akan kepentingan egois dari kelas yang berkuasa. Jadi, ideologi dianggap sebagai sistem berpikir yang sudah terkena distorsi dan dipakai sebagai sarana kelas yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Kemudian, pandangan marxis ortodok menguraikan bahwa ideologi hanyalah superstruktur, suatu epifenomena dari struktur sosial ekonomi yang merupakan basis struktur dalam masyarakat. Sebagai suatu epifenomena, ia tak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Faktor-faktor yang menentukan eksistensinya, wataknya, berasal dari luar. Singkat kata, struktur sosial ekonomi sebagai basis inilah yang menentukan. Apabila formasi sosial ekonomi suatu masyarakat berubah, maka berubah pula ideologi yang ada di atasnya.

Lebih lanjut, di kalangan pemikir marxis sendiri, hubungan basis dan superstruktur itu juga menjadi problematis. Kadangkala superstruktur itu juga mampu merombak basis atau "sisa" superstruktur lama yang masih memiliki kekuatan dapat terus hidup, walaupun basisnya telah berubah secara substansial. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan "feodal" yang masih hidup di dalam masyarakat kapitalis Jepang, terlihat pada kesetiaan buruh terhadap majikannya masih sangat kuat.

Maka, masalah superstruktur ideologi pun kemudian mendapat perhatian serius di kalangan pemikir marxis seperti Mahzab Frankfurt di Jerman (Horkheimer, Adorno, Habermas, dan lain- lain). Yang menarik barangkali adalah apa yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci, dalam tulisannya *The Formation of Intellectuals,* yang ditulis ketika filsuf Italia itu mendekam di Penjara tahun 1926. Menurutnya, masyarakat superstruktur dapat diidentifikasi dalam dua tingkat. Pertama, *political society,* yang berfungsi meredam setiap pembangkangan dalam konformitas untuk mengatur hukum dan peraturan-peraturan. Kedua, *civil society,* yaitu organisasi-organisasi swasta (gereja, koran, sastra rakyat, dan lain-lain) yang mengoperasikan hegemoni ideologi dan menghasilkan perhatian spontan dari masyarakat untuk mengatur *social order.* Artinya, di dalam masyarakat sipil (terutama masyarakat kapitalis industri matang) kekuasaan negara tidak cuma pada penguasaan ekonomi dan militer, tetapi juga pada ideologi yang telah diproduksikan dan direproduksi oleh berbagai lembaga sosial seperti gereja dan juga sekolah-sekolah. Dan ideologi ini dijalankan dengan

"persetujuan", termasuk dari kelas yang tertindas dalam masyarakat itu, yang kemudian membentuk negara sebagai sebuah pemerintahan yang hegemonik. Untuk itu, menurut Gramsci, masyarakat sipil tak cukup mengambil alih kekuasaan negara dengan cara fisik belaka, tetapi juga harus melakukan *counter ideology* dengan baik. Dengan kata lain, seseorang dalam kenyataannya harus memenangkan pertempuran ideologi dalam rangka memenangkan kekuasaan hegemonik.

Lantas dalam konteks ini bagaimanakah dengan Pancasila sebagai Ideologi bisa dipahami? Memang, pernyataan resmi yang disepakati adalah Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Artinya, ia merupakan perumusan dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sifat yang terbuka itu, menurut Franz Magnis-Suseno, karena ia hanya mengenai orientasi dasar. Sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma politik-sosial selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan cita-cita masyarakat lainnya. Tapi, realitas yang tak dapat ditampik, operasionalnya seringkali membawa makna yang kabur. Dalam kata lain, ada kesenjangan tajam antara Pancasila sebagai dekor mati yang sama sekali terpisah dari realitas sosial. Kerinduan bahwa Pancasila dapat menjadi ideologi yang operatif dan mampu menjadi gerakan sosial kiranya masih menjadi impian. Kenyataan itu melahirkan asumsi bahwa negara terlalu dominan dalam melakukan interpretasi terhadap Pancasila. Akibatnya, ia tidak menjadi kesadaran yang tumbuh dari bawah, tapi lebih banyak dipakai untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan negara, yang harus diterima sebagai kebenaran bagi rakyat. Negara tampil sebagai kekuatan yang melayani kepentingannya sendiri (*state 'for its own'*) dan seakan-akan terpisah dari masyarakat. Hal ini menjadi mungkin karena negara mempunyai basis materialnya sendiri, dengan bertumpu pada sektor pajak, BUMN, minyak bumi dan modal asing. Ditambah lagi dengan aparat militer dan birokrasi yang kuat.

Sementara itu, pada masyarakat sipil sendiri tidak tumbuh kekuatan sosial yang dapat mengimbangi kekuasaan negara. Kelas menengah di Indonesia, seperti yang diungkapkan banyak pengamat politik, belum lagi mampu berperan sebagaimana mestinya. Agaknya ini karena adanya perbedaan proses pembentukan formasi sosial di Indonesia, sehingga kelas menengahnya tidak muncul sebagai kelas pembaharu. Memang, munculnya kelas menengah di Indonesia haruslah dibedakan dengan kelahiran kelas menengah di Eropa pada abad XVIII. Kelas menengah Eropa muncul sebagai akibat kontradiksi internal dari masyarakat feodal yang berupa pergeseran kekuatan- kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang berlangsung sejak abad XV. Perubahan-perubahan ekonomi yang sangat radikal seiring dengan berkembangnya revolusi industri dan ide renesans, semakin memperkokoh basis ekonomi kelas menengah (borjuasi) Eropa. Kemenangan di tingkat basis struktrur itu diikuti pula dengan kemenangan di tingkat politik dan ideologis. Maka, bisa dibayangkan betapa berartinya semboyan Revolusi Perancis *liberte, egalite*, dan *fraternite* bagi rakyat Perancis yang merasakan penindasan feodalisme pada masa itu. Ia seakan menjadi *counter ideology* dari hegemoni ideologi "Negara adalah Aku"-nya Lois XIV. Kemenangan politik yang paling nyata dari kelas borjuasi ini adalah ditelorkanya negara modern yang disahkan sebagai lembaga umum yang pada esensinya untuk mempertahankan kelangsungan perekonomian, tempat borjuasi berpijak dan memperkuat diri. Sedangkan kemenangan ideologis yang dipetik adalah tumbuhnya paham-paham yang didasarkan pada hak asasi manusia, kedaulatan hukum dan demokrasi. Dan ini sebenarnya juga untuk melindungi kepemilikan pribadi dan limitasinya bagi kelas borjuis.

Kerinduan bahwa Pancasila dapat menjadi ideologi yang operatif dan mampu menjadi gerakan sosial kiranya masih menjadi impian

Di Indonesia sendiri, seperti juga negara dunia ketiga lainnya, kelahiran kelas menengah mengalami *"sungsang"*, karena ada distorsi akibat kolonialisme. Ekspansi kolonial Belanda telah lebih dulu menghancurkan "bibit-bibit" kelas menengah domestik yang dapat mengulang pengalaman di Eropa. Dengan alasan politis, perkembangannya memang sengaja diperlambat. Kondisi kelas menengah kita saat ini juga tidak terlalu berbeda jauh dengan masa kolonial, walaupun negara mengalami kemerosotan basis materalnya (dengan jatuhnya harga minyak di pasaran dunia), tapi dominasinya masih terasa. Wajah negara memang tampil lebih lembut dalam kebijakan swastanisasi lewat berbagai bentuk deregulasi dan debirokratisasi. Tapi, liberalisasi itu cuma sebatas sektor ekonomi untuk memudahkan masuknya modal asing yang menjadi tumpuan hidup negara setelah minyak sudah tidak dapat diandalkan lagi.

Penjelasan di atas sebenarnya mau mengungkapkan bahwa perbincangan tentang ideologi niscaya harus dikaitkan dengan fakta empiris atau basis struktur yang sedang berjalan. Pernyataan bahwa ideologi adalah perwakilan dari seperangkat sistem keyakinan agaknya masih kurang. Dari kacamata ideal barangkali ia bukan merupakan masalah, tetapi menjadi problem berat ketika kondisi material berbicara lain. Artinya, sebuah ideologi bila tidak mencerminkan realitas yang ada, maka ia tidak ubahnya seperti retorika yang tak bermakna □

Pancasila dalam Struktur Kebudayaan



Indonesia sebagai sebuah masyarakat negara, secara *de jure* dan *de facto* baru ada setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sedangkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia telah hidup dan berkembang jauh sebelum ada dan diakuinya masyarakat Indonesia (Budhisantoso 1983 :). Indonesia, semenjak permulaan sejarahnya bercorak "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ungkapan tersebut menjadi motto Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan suatu kemampuan yang kuat baik di kalangan pemimpin maupun rakyat, untuk mencapai suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, sekalipun terdapat unsur-unsur yang berbeda-beda. Keinginan bersama itu mendasari kebudayaan Indonesia yang bertumpu pada masyarakat majemuk, baik dalam soal agama, bahasa, suku, maupun kultural.

Struktur Kebudayaan

Struktur kebudayaan dalam arti luas dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, nilai budaya sebagai lapisan yang paling abstrak serta luas ruang lingkupnya, berisi gagasan yang mengkonsepsikan hal yang paling bernilai dalam kehidupan. Konsep serupa itu biasanya luas dan kabur, tetapi walaupun demikian atau justru karena tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian paling emosional dari alam jiwa manusia (Koentjaraningrat 1977 :). Menurut kerangka dari Clydekluckhon yang kemudian dikembangkan oleh istrinya Florence Kluckhon, bahwa sistem nilai budaya dalam semua semua kebudayaan di dunia itu sebenarnya terdiri dari lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yang berupa masalah mengenai hakekat hidup manusia dengan alam sekitarnya, hakekat hubungan manusia dengan sesamanya (Koentjaraningrat 1977):. Kedua, nilai budaya akan mempengaruhi pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan abstraksi dari pengalaman hidup, pandangan itu dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi sosial, kelakuan, peristiwa-peristiwa dan segi-segi lain dari pengalaman. Pandangan hidup adalah sebuah pengaturan mental dari pengalaman itu. Ketiga, pandangan hidup mempengaruhi sistem normatif yang akan diterapkan. Sistem normatif terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupan adalah banyak. Manusia sering berubah peran dari saat ke saat. Tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peran tersebut. Sistem normatif meliputi: (1). Sistem normatif moral yang menyangkut baik buruk, benar salah manusia dalam perannya. (2). Sistem normatif adat yang oleh Prof. Moh. Koesnoe diterangkan bahwa adat adalah keseluruhan ajaran-ajaran dan amalan-amalannya yang mengatur cara hidup manusia di dalam masyarakat, ajaran dan amalan itu langsung dilahirkan dari tanggapan rakyat tentang manusia dan dunia. Adat adalah tatanan hidup yang bersumber dari rasa susilanya (Soetapa 1991) .(3). Sistem normatif hukum yang sudah jelas mengenai bermacam sektor kehidupan yang sudah terang batas ruang lingkupnya (Koentjaraningrat 1977) : . Terakhir, (4). Sistem normatif aturan khusus, yang mengatur aktivitas yang jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat, itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat kongkrit sifatnya dan banyak diantaranya terkait dengan sistem hukum dan ada pula yang tidak terkait dengan sistem hukum (Koentjaraningrat 1977) : . Keempat, sistem normatif akan mempengaruhi sikap hidup. Kelima, sikap hidup mempengaruhi tingkah laku dan keputusan tindakan yang secara sadar dilakukan. Keenam, keputusan



DOK. PRIBADI

Drs. Achmad Charis Zubair,S.U.
Pengurus Pusat Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia

tindakan akan tecermin dalam hasil tindakan yang dapat berupa bentuk-bentuk fisik, dan atau kesenian yang berkembang.

Apabila struktur di atas sebagai realitas budaya secara keseluruhan bisa dikatakan sebagai suatu sistem, maka ada tiga subsistem yang mendukung berupa subsistem nonfisik, subsistem normatif, dan subsistem fisik. Saya berpendapat bahwa filsafat di Indonesia tecermin dalam kebudayaannya. Cara yang paling tepat adalah melibatkan diri untuk memahami (*verstehen*).

Letak Filsafat Indonesia dalam Struktur Kebuadayaan

Pada kebudayaan yang mapan hubungan antara subsistem tersebut tampak jelas. Tidak terjadi keterputusan antara ketiganya. Subsistem fisik merupakan

penampilan lahiriah akibat dan hasil tindakan subsistem normatif yang didasarkan atas subsistem nonfisik. Secara metodologis filsafat tidak melihat subsistem fisik realitas kebudayaan dalam arti sesungguhnya, tetapi harus diteliti konsepsi dasar yang meresapi seluruh hidup masyarakat.

Di Indonesia subsistem fisik menampakkan keanekaragaman sebagaimana yang ditunjukkan dalam kemajemukan kulturalnya. Subsistem ini dapat berupa hasil tindakan yang berupa kesenian, arsitektur pada lingkup fisik buatan tempat kegiatan hidup berlangsung, dll. Setiap suku bangsa memilikinya sendiri-sendiri dan menampakkan ciri khas masing-masing. Subsistem normatif menampakkan diri dalam keanekaragaman agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sutan Takdir Alisyahbana menulis bahwa subsistem normatif Indonesia tidak semata-mata bersifat homogen tetapi dipengaruhi oleh (1). Kebudayaan dan kepercayaan Indonesia asli yang berciri pada kesadaran tentang adanya zat "gaib" yang menaungi hal ikhwal insani. Selanjutnya manusia menyadari bahwa hidupnya bergantung pada alam semesta. (2). Kebudayaan dan agama Hindu, yang walaupun tidak pernah menjadi "*popular religion*" di Indonesia, tetapi mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosio-religius yang sudah ada. (3). Kebudayaan dan agama Islam, yang berkembang menjadi "*popular religion*" serta secara kultural, sosial menjadi teramat berpengaruh walaupun secara politik formal "negara Islam" tidak pernah terjadi di Indonesia merdeka. (4). Kebudayaan barat modern, yang dipercepat dengan adanya pendidikan dan bentuk barat melalui sekolah-sekolah. (5) Kebudayaan dan agama Kristen, dianut oleh lebih-kurang 7,86% penduduk (Soetapa 1991) :

Pada subsistem normatif, sebagaimana terjadi pada subsistem fisik, Indonesia merupakan suatu tempat bercampurnya bermacam-macam norma. Meskipun bermacam-macam norma itu berada bersama-sama di Indonesia namun sifatnya, meminjam istilah Soetapa, *mixed but not homogenize* .. Maka persoalannya subsistem normatif yang menampakkan diri dalam keanekaragaman agama dan kepercayaan, demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman menjadi realitas serta bagaimana menuju persatuan dan kesatuan menjadi masalah. Pancasila dipakai sebagai sistem normatif yang menopang serta mengawal subsistem normatif yang ada, serta terbukti efektif baik terhadap keberbedaan maupun terhadap kesatuan Indonesia. Sebagaimana T.B. Simatupang menyebutkan "*The Five Principles (Pancasila) are a wide enough umbrella for everybody. Nobody has anything againts them, people can accept them, we can all live together under them*" (Soetapa 1991):

Efektivitas Pancasila nampak dalam kemampuannya untuk menanggulangi setiap usaha yang "merusak" keanekaragaman Indonesia. Sebagai suatu ideologi yang salah satu fungsinya mempersatukan yang berbeda-beda, maka Pancasila terbukti mempersatukan keanekaragaman serta keberbedaan masyarakat Indonesia. Dengan gambaran di atas filsafat Indonesia dapat dilacak dari "benang merah" yang terentang dari subsistem fisik dan subsistem normatif untuk memahami subsistem nonfisiknya. Filsafat Indonesia ada pada nilai budaya, pandangan dunia, serta pandangan hidup yang mendasari seluruh kebudayaan Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dapat terwujud sebagai berikut: (1). Pada karya-karya yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis maupun lisan, secara sistematis-metodis, dan dipertanggungjawabkan secara kritis. (2). Sebagai suatu ideologi yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis maupun lisan, namum lebih berupa slogan, pepatah, peribahasa, syair daripada berupa sistematis-metodis. (3). Sebagai pemahaman yang mungkin sudah diungkapkan secara frgamentaris, tetapi masih bersifat implisit, yaitu tersembunyi dalam gejala-gejala hidup bersama.

Efektivitas Pancasila nampak dalam kemampuannya untuk menanggulangi setiap usaha yang "merusak" keanekaragaman Indonesia.

Tugas Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

(1). Secara lebih jelas mengeksplisitkan Pancasila sebagai konsepsi-konsepsi dasar, pandangan-pandangan dasar bangsa Indonesia. Tentu saja rumusan-rumusannya harus lebih bersifat ilmiah-akademis daripada sebagai rumusan politik. Apa yang telah dilakukan oleh Prof.. Notonagoro (alm.) merupakan contoh yang memadai, perlu dilanjutkan dengan tambahan-tambahan yang lebih aktual. (2). Mensistematisasikan semua unsur dari pandangan dasar. Dengan demikian terbentuk suatu struktur dan keterarahan yang menyeluruh mengenai filsafat (bangsa) Indonesia. Ideologi bangsa yang disusun atas dasar filsafat bangsa merupakan kekuatan luar biasa untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. (3). Dari hal-hal tersebut, dapat dilacak sejauh mana konsistensi logis dalam pandangan dasar yang terwujud dalam ideologi sebagai "sesuatu" yang berdaya praktis untuk kebudayaan bangsa Indonesia dalam arti menyeluruh dan luas. Apakah terjadi keterputusan atau tidak, utamanya yang tecermin dalam sikap, tingkah laku, keputusan tindakan, serta hasil tindakan bangsa Indonesia.

Pena Mahasiswa


SISDARYONO

Nun demi pena dan apa-apa yang mereka tuliskan (Al-Qur'an 68 : 1). Pena adalah pena. Dia tak mampu melahirkan manfaat maupun mudlarat meskipun ujungnya runcing memang. Sedangkan mahasiswa adalah jiwa, semangat, dan aksi! Pena mahasiswa adalah pena yang berjiwa, mengalirkan tinta semangat dan bermuara pada aksi. Hampir semua orang di dunia ini pegang pena. Tapi tak semua beruntung sebab pena.

.......Leo Trotsky, mati sebab pena.

.......Salman Rushdie, sengsara sebab pena.

.......Muchtar Lubis, masuk bui sebab pena.

Tapi, sebab pena orang bisa jadi pahlawan atau pengkhianat. Kartini, puteri Bupati Jepara itu, jadi pahlawan kebebasan kaumnya sebab pena. Tapi siapa yang mau jadi pengkhianat sebab pena? Untuk amannya sebut saja, koruptor, dosen penjual nilai, mahasiswa penjiplak skripsi.....gampang toch(?)

Multatuli, dicerca bangsanya, Belanda. Tapi disanjung musuh bangsanya. Pers mahasiswa, adalah pena mahasiswa. Dengan pers, mahasiswa bisa buat apa saja, seribu peristiwa bisa dibuat, seribu peristiwa bisa dicatat, dan seribu peristiwa bisa diperistiwakan. Dengan pers, mahasiswa bisa jadi pahlawan. Dengan pers, mahasiswa bisa jadi pengecut. Dengan pers, mahasiswa bisa buat orang jadi berang. "Kalian ini semuanya setan!", katanya. Ada yang kikuk sebab pers mahasiswa. Ada yang serba salah sebab pers mahasiswa. Tapi ada juga yang terbahak-bahak sebab pers mahasiswa. Sementara resi arif bijaksana cukup menganggukanggukkan dagunya dan sambil mengelus-elus janggut putihnya menghela nafas tuanya.

Pena milik semua orang. Namun pena di tangan sastrawan akan beda dengan pena di tangan pemungut pajak, akan beda dengan pena di tangan wartawan. Bagaimana pena di tangan mahasiswa? Ia adalah keluguan di balik keterpelajaran. Ia adalah belati di balik kecemasan. Kita semua sakit. Karena kita tak punya kampus lagi. Kampus yang dulu kita banggakan, kini jadi milik orang lain. Ya, kita semuanya sakit. Ada yang tak tahan, lalu teriak. Mengutuk kiri-kanan. Membangunkan tetangga. Kemudian mereka bersepakat bahwa kita mengalami *psychische afwijking* (otak miring) dan ini tidak normal! Maka harus dinormalkan. Ada yang terus berjuang sambil menahan pedih. Tapi lebih banyak yang tak mengerti. Mereka butuh stabilitas demi acara *rendevouz* dan acara *genieten van de jeugd en van het zorgeloos leven* (mempergunakan waktu mudanya untuk memuaskan hawa nafsu).

Prof. Dr. T. Jacob, mantan rektor UGM, ketika menyambut kelahiran majalah mahasiswa Balairung menulis begini, "Tetapi mahasiswa UGM angkatan sekarang sudah siap untuk menerbitkan majalah mahasiswa yang baru, yang dinamakan Balairung. Persiapan kiranya sudah cukup dilakukan, prinsip-prinsip sudah dikaji, sehingga tidak akan terjadi salah langkah yang besar, yang dapat merugikan semua pihak....." Tapi bagimana caranya kearifan dapat kita timba dari anak muda? Tapi, mungkinkah mulut ditinju karena menguap? Memang mahasiswa tak pernah lega hatinya. Tahun 1913, mahasiswa dihadapkan masalah belenggu penjajahan, tahun 1965, mahasiswa dihadapkan masalah rakyat yang lapar, tahun 1993, mahasiswa dihadapkan masalah.....? Maaf, Anda lebih tahu dari saya. *"Wir sind jung und das ist schon"* - untungnya kita muda!

Muhammad Alfaris
Mhs. Teknik Sipil UGM

Lebih Aman LOBBY

LOBBY dan penelitian adalah rangkaian dari "gerakan intelektual", yang diluncurkan SM UGM. Tapi sebagian mahasiswa menilai, SM berorientasi keluar, sehingga permasalahan mahasiswa sendiri kurang terurus.

MAHASISWA menyambangi Gedung DPR tanpa poster adalah hal yang ganjil. Tapi itulah yang dilakukan Senat Mahasiswa Gadjah Mada pada akhir Agustus dan awal September ini. Mereka tidak lagi garang, namun tampil dengan pakaian rapi, memasuki ruang ber AC. Memang, masih ada sejumput kata-kata nakal. Tapi itu bukan sumpah serapah, seperti yang sering terjadi di ujung boulevard. Itu adalah bagian dari konsep yang telah mereka persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka mencoba untuk menggulirkan isu akan pentingnya dibuat UU yang mengatur lembaga kepresidenan. Bukannya bermaksud melecehkan pengetahuan para anggota DPR, lebih dari itu menggulirkan isu dan mengetuk keberanian.

Sebuah "gerakan" model baru? Agaknya, mirip dengan apa yang diprediksikan Philip G. Altbach bahwa dimasa depan, gerakan politik mahasiswa akan bersifat damai, dengan teknik lobby, argumentasi berdasarkan penelitian dan pendekatan lingkungan. Walau sebetulnya prediksi Altbach ini berlaku untuk negara-negara industri, tetapi sengaja atau tidak, Senat Mahasiswa UGM, telah mengikuti alur itu. Dimulai tahun lalu, pada masa kepemimpinan Anies Rasyied Baswedan, diantaranya dengan penelitian tentang tata-niaga cengkeh, pengajuan konsep UULAJ dan serangkaian lobby baik pada birokrat kampus maupun negara. Anies menyebutnya dengan 'gerakan intelektual'. Jelas ini mendekonstruksi arti gerakan. Karena konsep gerakan akan selalu identik dengan spontanitas, dipimpin oleh sosok yang kharismatis, penuh antusiasme, dan anti kemapanan. Bisakah gerakan ini menjadi model baru gerakan mahasiswa Indonesia?



ISTIMEWA

Senat Mahasiswa UGM saat di DPR
Berorientasi keluar

Barangkali terlalu gegabah untuk menjawab pertanyaan itu karena efektifitas gerakan model ini belum pernah ditakar. Tetapi pertanyaan terus mendera. Mengapa Senat Mahasiswa mengikuti model ini? Kemana arahan gerakan ini? Dan mengapa kegiatan yang dilakukan cenderung elitis dan tidak melibatkan massa?

Beberapa pengamat mengatakan, karena Senat Mahasiswa tidak mempunyai basis massa. Bisa jadi lantaran kondisi kemahasiswaan sekarang cenderung apatis terhadap politik dan pragmatis. Hampir seluruh mahasiswa *pengin* cepat lulus, dengan IP tinggi dan lekas mendapat pekerjaan. Kemungkinan lain karena Senat Mahasiswa, belum menyentuh kepentingan mahasiswa secara langsung, alias Senat Mahasiswa cenderung elitis

Mengenai sikap pragmatisme ini menurut Dr. Ichlasul Amal, tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa saja, melainkan juga fenomena masyarakat keseluruhan. "Jadi, harus disadari bahwa mahasiswa hanyalah refleksi dari masyarakat," tambah Dekan Fisipol yang pernah meneliti kelompok studi ini.

Masyarakat memang memandang kuliah sebagai sarana mobilitas vertikal. Artinya kuliah merupakan alat untuk mendongkrak status sosio-ekonomi masyarakat. Mahasiswa juga semakin terspesialisasi oleh bidangnya dan bertindak secara fungsional.

Mencari Biang Apatisme

Mencari musabab apatisme mahasiswa terhadap politik, walau tidak seluruhnya benar, akan selalu tertuju pada depolitisasi kampus yang dijalankan secara sistematis selama ini. Penyulutnya adalah meruyaknya tindakan politik praktis mahasiswa, berupa aksi-aksi turun ke jalan yang mengerahkan massa.

Pasca 66 terhitung ada dua gelombang demontrasi besar, yaitu Malari 1974 dan penolakan pencalonan Soeharto sebagai presiden menjelang SU tahun 1978. Akibatnya, tanpa ampun Mendikbud Daoed Joesoef

mengibaskan pedang NKK/BKK. Konsepnya sendiri berasal dari Kaskopkamtib Soedomo, waktu itu. Tak satupun bentuk aktivitas mahasiswa yang selamat dari kelebat pedang. Dewan Mahasiswa (Dema) sebagai pusat koordinasi aktivitas dikerat menjadi kepingan-kepingan organisasi di tingkat fakultas. Orang secara *guyon* menamainya dengan sebutan OMASIS (Organisasi Mahasiswa Intra Sekolah) sebagai *plesetan* dari OSIS, karena segala keputusan ada di tangan "Kepala Sekolah". Sedangkan organisasi ekstra yang memasok kader-kader lembaga kemahasiswaan, ditendang dari komisariatnya di kampus.

Menurut Daoed Joesoef, mahasiswa hanya boleh berpolitik dalam arti konsep. Apabila mahasiswa bergerak dalam politik seperti itu, masih menurut Daoed, ia telah melaksanakan hak politiknya sesuai dengan hakekat kemahasiswaannya. Sedangkan bila berpolitik dalam artian aksi dan kebijakan, berati mengingkari hakekat kemahasiswaan. Inilah yang dituduhkannya sebagai biang keonaran, serta merubah dunia mahasiswa menjadi dunia sindikat. Maka dilakukanlah apa yang dinamakan transpolitisasi, artinya mahasiswa boleh berpolitik asal dilakukan di luar kampus.

Kemudian mahasiswa dikembalikan lagi ke bangku-bangku kuliah untuk menyiapkan diri sebagai *Man of Analisys*, yang akan. terjun kedalam teknostruktur masyarakat mengisi pembangunan. Dari sinilah aktivitas gerakan berangsur surut, sampai pada ekstrim terendah. Menurut hasil diskusi PRISMA, 1987 kemlempeman itu terjadi karena adanya pergeseran artikulasi dalam kegiatan mahasiswa, dari aksi massa menjadi aksi informal. Dari politik praktis menjadi politik teoritis. Dan dari gugatan politis terhadap struktur kekuasaan secara langsung menjadi penyadaran subyektif masyarakat. Kebanyakan para aktivis keluar kampus dan banyak bergabung dengan LSM.

Kemudian bercucuranlah pendapat yang menentang NKK/BKK . Emil Salim pada tahun 1988 berujar:"Dalam kondisi yang sudah stabil ini, NKK dan BKK perlu dihapuskan. Kalangan mahasiswa perlu diberi kebebasan melakukan aktivitas organisasi di kampus." Pendapat lain mengatakan, kebijakan NKK/BKK berarti memangkas kader-kader sipil, yang seharusnya dipupuk sebagai aset kepemimpinan masa depan. Bagaimana mungkin menciptakan kader yang memiliki komitmen terhadap masyarakat apabila kegairahan untuk memahami permasalahan sosial kenegaraan dilumpuhkan.



Kelik Supriyanto

Demo Menolak SMPT
Tidak ada kesepakatan

Lalu muncul 'pendatang baru' SMPT, yang diterima skeptis oleh mahasiswa. Bahkan pada tahun 1991, di kampus UGM terjadi demonstrasi yang ditentang dengan demonstrasi pula. Pihak pertama menolak SMPT alasannya, itu tak lain adalah kepanjangan tangan rektor. Pihak kedua menerima SMPT karena pada SK tersebut terdapat kemungkinan untuk disesuaikan dengan keinginan mahasiswa. Sementara ITB dengan tegas menolak dan lebih senang membentuk Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (FKHJ).

Melacak Pilihan Elitis

SMPT hadir di tengah-tengah tradisi kemahasiswaan yang telah mapan. Telah ada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang melaksanakan fungsinya di tingkat universitas. Sehingga untuk membentuk senat yang harus mewadahi UKM dan fakultas akan menemukan benturan-benturan.

Muncul semacam dikotomi antara wakil-wakil fakultas yang dipilih melalui pemilu dan wakil UKM yang dipilih melalui pengangkatan. Rebutan kursi? Barangkali benar. Di Unair, bahkan SMPT dibekukan rektor, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Sedangkan di ITS, tidak ada SMPT karena masalah yang sama.

Bagi pengurus UKM yang hadir lebih dulu di tingkat universitas, bagaimanapun juga SM ini adalah lembaga baru, sehingga meletakkan UKM dibawah struktur SM menimbulkan masalah psikologis. Oleh pengurus UKM dikhawatirkan menambah jalur birokrasi. Namun secara tidak sadar UKM telah mendukung BKK karena langsung dibawah komando PR III.

Di UGM, benturan itu berakhir di atas kertas dengan dibentuknya Keluarga Mahasiswa (KM) sebagai nama organisasi. Mengapa keluarga? Barangkali Goenawan Mohamad benar bahwa keluarga adalah sebuah impian akan kerukunan. KM tercipta oleh adanya tuntutan dari atas akan 'kerukunan' dunia kampus.

Tetapi jangan ditanya alur logika dari struktur ini, karena tidak akan ditemukan jawabannya. Di dalam KM itu SM dan

UKM adalah kelengkapan organisasi di tingkat universitas. SM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari KM. Namun UKM tetap otonom. Kemudian muncul Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sebagai unsur pelaksana. "Ini merupakan tuntutan, karena organisasi yang sehat memerlukan pemisahan yang jelas antara fungsi legislatif dan eksekutif," jelas Elan Satriawan Ketua Umum SM periode 1993/94.

Padahal, fungsi-fungsi eksekutif sebelumnya telah dikerjakan oleh UKM. Jadinya, BEM hanyalah menjalankan program- program yang telah dirumuskan dalam GBHK, yang merupakan kegiatan-kegiatan elitis, seperti seminar, panel, diskusi, penelitian dan lain-lain. Sedangkan kegiatan-kegiatan populis semacam POR DIES, pentas seni, bahkan Gadjah Mada Fair tetap dipegang oleh UKM.

Dari sini barangkali bisa ditangkap, mengapa SM sulit untuk mengakar,untuk tidak mengatakan diragukan eksistensinya. Dalam konteks gerakanpun SM cenderung elitis dan rapuh. Ini berlanjut dengan fenomena pasifnya pengurus yang telah dilantik. Dari Lebih 100 pengurus senat ketika dilantik, biasanya terpangkas menjadi sekitar 15-20 orang pada saat SM memulai kerjanya. Mereka hanya riuh waktu kampanye dan konggres saja.

Agar tetap eksis SM UGM lalu melakukan lompatan. Melontarkan isu-isu nasional, sekaligus loby-loby seperti kunjungan ke DPR diatas,

Dicari Tokoh yang PROGRESIF

Dr. Ichlasul Amal

DALAM perkembangannya trend radikalisme di kalangan mahasiswa seluruh dunia mengalami masa naik turun. Baik itu di kawasan Asia, Eropa, Amerika, maupun di Indonesia. Kondisinya sama. Dan sekarang gerakan mahasiswa yang radikal mengalami masa turun. Karena memang tidak ada lagi ideologi tandingan yang membuat mahasiswa menjadi radikal. Apalagi sejak hancurnya komunisme di negara Eropa Timur dan Rusia, secara otomatis ideologi liberal maju di percaturan dunia tanpa saingan. Kondisi ini mempengaruhi gerakan mahasiswa, begitu juga di Indonesia.Memang masalah sosial bisa memancing massa. Tetapi tidak semua mahasiswa tertarik pada masalah itu, sebab fenoma masyarakat

mahasiswa sekarang sudah terkotak-kotak dalam kepentingan masing-masing.aya pikir, gerakan mahasiswa yang tidak radikal bukan karena disebabkan oleh depolitisasi. Sebab, seperti gerakan tahun 1985 dulu masih radikal. Ini dilihat dari banyaknya kelompok diskusi yang ingin perobahan. Walau senat melempem, mereka masih maju untuk mengadakan gerakan kontrol sosial demi pembaharuan. Kalau kondisi sekarang kecenderungan pragmatis, sebenarnya bukan cuma mahasiswa saja, tetapi semua masyrakat sudah cenderung pragmatis. Disinilah perlu kita sadari bahwa kehidupan mahasiswa itu sebenarnua merupakan refleksi dari masyarakat. Jadi, rasanya sulit menyalahkan mahasiswa yang memilih cara demikian. Ini adalah proses alami.Disamping itu penyebab tidak kuatnya kontrol sosial yang digerakkan oleh mahasiswa, karena tidak adanya isu yang menonjol, yang bisa menarik perhatian mahasiswa untuk mengkritisinya.Kare na memang memiliki kekuatan moral sebagai senjata. Isu- isu yang pernah menonjol seperti tekanan militer yang kuat, pertentangan ideologi kiri dan kanan, antara kelompok sosialis dengan kelompok Orang Kaya Baru, memotivasi mereka untuk bergerak. Sedangkan isu-isu yang muncul sekarang hanyalah isu-isu kecil dan menengah yang hanya menarik perhatian sebagian kecil mahasiswa saja.Disamping itu saya juga melihat sudah hilangnya kepercayaan terhadap lembaga. Dan sekarang Senat Mahasiswa sebagai lembaga formal juga mengalami nasib yang sama. Kemungkinan, setiap pemilih mempertanyakan apakah lembaga ini bisa mengaktualisasikan komitmen mereka terhadap kondisi sosial yang ada. Padahal saya lihat UGM sudah akomodatif terhadap lembaga. Hanya saja timbul masalah-masalah seperti diatas. Apalagi kondisi dan permasalahan masyarakat mahasiswa semakin kompleks, maka diperlukan persamaan orientasi dan dasar yang sama dalam lembaga.Kurangnya kondisi-kondisi yang mendororng mahasiswa untuk berbuat sesuatu dan kecenderungan prgmatisme menyebabkan sedikit lahirnya pemimpin-pemimpin yang matang. Oleh sebab itu, mahasiswa yang ingin perubahan carilah tantangan terus menerus, supaya cepat matang. Dan harus ada tokoh yang selalu progresif.


REPRO

Dwi Soufnita

yang hanya butuh segelintir orang. Mengapa loby? Agaknya, loby adalah pilihan yang tidak mempunyai resiko politik, alias aman ketimbang turun di jalan. Dan dengan loby ini pula citra mahasiswa sebagai manusia pemberang bisa dikikis. Lebih dari itu, gayungpun bersambut. Dari sini SM akan tampak eksistensinya melalui publikasi media massa yang tak kalah oleh publikasi gerakan demo di jalan misalnya.

Apa kontribusi 'lompatan' ini bagi mahasiswa. Bisa jadi, senat akan semakin dianggap elitis oleh mahasiswa. Permasalahan nyata mahasiswa yang ada di depan mata kadang tak tersentuh. Pernahkah SM mempermasalahkan dosen *killer* atau dosen yang sering mangkir kuliah lantaran banyak proyek? Pernahkah SM mempermasalahkan perpustakaan yang tidak lengkap, pembuatan tempat parkir karena kendaraan sering kepanasan, perluasan tempat latihan olah raga yang sudah sumpek, regristasi yang terlalu birokratis? Kalau mau diurut tentu bak rangkaian panjang kereta api.

Mengerling Dema

Agaknya Dewan Mahasiswa di era 70-an menarik untuk dikerling. Karena Dema selain tenggap terhadap isu-isu nasional, juga tidak melupakan kepentingan mahasiswa sendiri. Ini memang logika sebuah lembaga perwakilan Pada jaman Dema fungsi eksekutif-legislatif telah dipisahkan dengan tegas.' Organisasi induknya sendiri bernama BKM. Dema berfungsi sebagai eksekutif dan Majlis Mahasiswa (MM) sebagai legislatif. Bedanya, di tingkat fakultas ada Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema) yang langsung dikontrol oleh MM pusat. Seluruh kegiatan di tingkat universitas ada di bawah koordinasi Dema. Kegiatan itu terbagi dalam bidang-bidang seperti Sie Olahraga, Sie Kesenian, Sie Diskusi dan lain-lain. Praktis semua kegiatan formal di tingkat Universitas ada di bawah bendera Dema. Dengan demikian Dema akarnya menghujam kuat di kalangan mahasiswa. Karena merupakan integrasi dari seluruh kekuatan mahasiswa maka Dema memiliki *bargaining position* yang kuat. Gerakan yang dimotori Dema selalu mendapatkan dukungan dari mahasiswa. Bukan itu saja. Dema memberikan kontribusi langsung kepada mahasiswa. Lembaga ini mampu menterjemahkan apa yang disebut sebagai *Student Interest, Student Right, Student Welfare.* Ambil satu contoh saja. Mahasiswa butuh transport yang murah, Dema mengusahakannya dengan colt Kampus.Tetapi, pemisahan antara legislatif dan eksekutif, bukanlah jaminan bagi terakomodasinya semua aspirasi mahasiswa. Walau terlalu mengada, coba bandingkan dengan model senat di luar negeri. Ambil saja contoh James Cock University di Townville Australia. Disana lembaga kemahasiswaannya bernama Student Union, atau sering disebut Union saja. Tidak ada legislatifnya. Yang ada hanya ketua (president), sekretaris umum dan komisi-komisi (offiser), seperti komisi pendidikan, komisi kesejahteraan, komisi wanita, olahraga, komisi part timer dan lain-lain. Namun, peranannya sangat menonjol. Union mempunyai pengaruh terhadap kebijakan universitas maupun permasalahan univeritas. Union akan bersedia membantu menuntut mahasiswa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh universitas. Tentu saja ini menyangkut kepentingan akademik, kesejahteraan dan lain-lain. Union juga akan mengkampanyekan pembaharuan kehidupan universitas, seperti yang diinginkan mahasiswa. Disamping itu Union mempunyai pengaruh pada kebijakan pemerintah, baik lokal maupun federal.


ISTIMEWA

Pemilu Mahasiswa
Ramai sesaat



ISTIMEWA

Kongres Senat Mahasiswa
Kompromi maksimal UKM - fakultas

Ternyata, dukungan dari mahasiswa bisa didapatkan dengan sendirinya, bila lembaga itu memang memberikan kontribusi kepada mahasiswa. Berarti, "gerakan -gerakan" yang berorientasi keluar akan di*cuekan* begitu saja selama kepentingan mahasiswa sendiri belum tersentuh. Sepertinya, masalah ini merupakan masalah yang perlu segera ditangani. Seperti apa yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, "Mengenai hubungan ke atas, Senat Mahasiswa sudah tidak ada masalah. Sekarang masalahnya tinggal membina hubungan ke bawah." Tetapi Pak Koes buru-buru menambahkan, "Sebagai lembaga yang baru dilahirkan, Senat Mahasiswa butuh waktu untuk berjalan dan berkembang. Maka berilah kesempatan untuk melaksanakan tugasnya."

Sunarto, M.Imam Baskoro, Dwi Soufnita

REMANG-REMANG WARUNG KOBOI

Yogyakarta menjelang tengah malam. Ketika semua warga kota terlelap dalam tidurnya dan jalanan mulai sepi tanpa lalu lalang kendaraan, sebuah warung remang-remang dengan nyala lampu teplok di bilangan Bulaksumur justru nampak hidup.

KETIKA JAKARTA DEMAM HARDROCK CAFE, NEWS CAFE DAN SEMACAMNYA, DIAM-DIAM CAFE-CAFE YANG LEBIH "PROLETAR" MEWABAH DI SELA-SELA JALAN KOTA YOGYA DAN SOLO.

Beberapa mahasiswa asyik menikmati sebungkus nasi, wedang jahe, dan penganan sambil seenaknya menaikkan sebelah kakinya di bangku kayu. Sambil makan mereka asyik *ngobrol ngalor-ngidul.* Macam-macam saja yang mereka obrolkan. Dari masalah kuliah,soal keseharian, organisasi, sampai tight money policy, demokrasi dll. Tak jarang banyolan- banyolan segar dan *saru* keluar dari mulut seorang di antaranya yang disusul tawa gerr oleh yang lainnya.

Sementara itu Semi, si penjual, sibuk melayani pembeli dan mencuci gelas maupun sendok yang kotor. Sesekali ia ikut mengomentari obrolan pembelinya. Dan ketika dirasa tidak ada lagi yang harus dikerjakan, ia memilih untuk duduk satu bangku dengan pembeli-pembelinya, tenggelam dalam obrolan panjang mengasikkan.

Suasana akrab di warung *senthir* atau yang oleh masyarakat Yogya biasa dijuluki warung *hik* atau warung koboi, tidak

hanya terdapat di Kampus UGM Bulaksumur saja. Jika Anda menyempatkan diri mampir di warung-warung koboi yang menjamur di pinggir-pinggir jalan di Yogyakarta, suasana santai, akrab, dan mungkin (sedikit) jorok akan Anda temui. Tetapi, sebentar, jangan lantas menuduh bahwa warung koboi yang terkesan jorok itu hanya milik kalangan kelas bawah.

Sigit, misalnya. Mahasiswa UGM jurusan Teknologi Pertanian ini malah mengaku sudah sejak tujuh tahun yang lalu akrab dengan dunia warung koboi. Ketika masih tinggal di Solo, Sigit bergaul akrab dengan pedagang-pedagang warung koboi. Lantas, apa yang membuatnya begitu betah bersahabat dengan warung koboi? "Saya menyukai suasananya, santai dan akrab. Kita bisa makan dan duduk sepuasnya, bila perlu sampai pagi pun nggak ada yang marah," akunya.

Hal serupa diakui pula oleh Siska. Mahasiswi ISI angkatan '89 ini biasa menghabiskan malam panjangnya bersama rekan- rekan sekampus di warung koboi depan Senisono. Siska merasa lebih *sreg* ngobrol di warung koboi karena suasananya yang santai, dan tenang membuatnya merasa menyatu dengan alam. Dan yang lebih penting, kebiasaan ini membuatnya menemukan banyak inspirasi yang membantunya mempertajam kreativitasnya sebagai mahasiswi seni.

Tak hanya Sigit dan Siska saja yang gemar bersantap malam di warung koboi. Jika dihitung, mungkin puluhan jumlah mahasiswa setiap malamnya menyempatkan diri singgah di warung koboi. Terutama warung-warung koboi yang mangkal di sekitar kompleks kampus, misalnya UGM, IAIN, maupun IKIP. Boleh jadi mereka hanya membeli suasana yang ditawarkan warung koboi.



Warung Koboi
Hard Rock Cafe-nya Mahasiswa

Lalu, siapakah sebenarnya mereka yang telah menciptakan *trend* warung koboi? Dunia warung koboi yang memberikan suasana akrab itu hampir tak bisa dipisahkan dengan warga kecamatan Bayat-Klaten. Ya, karena sebagian besar penjual makanan dan minuman dalam gerobak dorong tersebut berasal dari sana. Entah siapa yang pertama kali menjadi pelopor. Yang jelas, usaha ini hadir dari keterbatasan ekonomi petani Bayat.

Bagi warga Bayat, hasil dari tanah pertanian tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana bisa cukup jika tanah pertanian mereka hanya mampu memberikan panen padi setahun sekali karena masih menggunakan sistem tadah hujan. Di samping itu, sebagian besar penduduknya tidak memiliki tanah pertanian sendiri. Mereka menjadi buruh tani dan menyewa tanah pertanian milik orang lain selama setahun. "Di sini kira-kira hanya 12 orang saja yang mempunyai sawah pribadi," kata Semi seorang warga desa Ngerangan Kecamatan Bayat yang sudah sejak tahun 1972 mulai merantau. Keduabelas orang pemilik tanah itupun menurut Semi bukanlah orang kaya. Mereka juga miskin sehingga mau menyewakan tanah miliknya pada orang lain untuk mencari tambahan penghasilan, "jadi mereka sendiri malah menggarap sebagian kecil dari tanahnya," lanjut Semi.

Kemiskinan memang telah membelenggu warga Bayat,seiring dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan rendahnya daya dukung sektor formal pedesaan. Tak heran jika kemudian mereka berusaha mencari tambahan penghasilan di luar sektor pertanian.

Salah satu alternatif adalah dan bekerja di kota. Berdasarkan Laporan Monografis Dinamis bulan Oktober-Desember 1992 kecamatan Bayat, tercatat 5812 warga menjadi buruh tani, 5178 buruh industri, 1211 buruh bangunan, dan 2253 menjadi pedagang. "Lebih dari seratus orang telah mencoba mengadu nasib di kota, seperti di Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta," kata Sri Sutatno, sekretaris desa ngerangan kecamatan Bayat

Umumnya mereka menjadi pedagang kaki lima dan buruh industri di kota. Di Semarang misalnya, sebagian warga Bayat banyak yang berdagang mie kopyok dan tahu gimbal. Sementara di Solo dan Yogyakarta banyak dijumpai pedagang warung koboi yang berasal dari Bayat. Sedangkan di Jakarta mereka umumnya bekerja sebagai buruh. "Sebelum berjualan wedang di Yogya saya sudah mencoba jualan mie kopyok di Semarang kurang lebih tujuh tahun. Kemudian coba-coba ke Yogya berjualan wedang mengikuti teman- teman, dan ternyata hasilnya lebih banyak daripada jualan mie kopyok," kata Semi yang warungnya menjadi langganan para aktivis kampus Gadjah Mada.

Warung koboi yang menjamur di Yogyakarta ini memang berawal dari coba-coba yang dilakukan para urban asal Bayat. Sebelum terjun ke dunia dagang warung koboi atau yang oleh mereka dikenal dengan sebutan warung

wedang, banyak di antara mereka yang bekerja sebagai buruh atau tukang becak. Seperti yang dialami Pak Mardi, 36, penduduk desa Kedung Ampel. "Sebelum jualan wedang, *Bapake* sudah *mbecak* selama beberapa tahun di Yogya," kata Suwarni, istrinya, ketika ditemui BALAIRUNG di rumahnya. Menurutnya, hasil dari menarik becak masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Mardi lantas melirik sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan. Ia mengumpulkan uang untuk membeli gerobak nasi seharga Rp 250.000,00 dan memulai hidup baru dengan berjualan wedang. "Saya berjualan di sini kurang lebih sudah dua setengah tahun," kata Pak Mardi di warungnya yang mangkal di depan kantor Telkom, Kotabaru.

Bagaimana penghasilan yang diperoleh dari warung koboi, apakah lebih banyak daripada menarik becak? "Tidak banyak, yang penting asap dapur tetap mengepul," kata Pak Mardi ketika ditanya berapa keuntungannya semalam. Tetapi istrinya mengaku merasa lebih enak hidup sekarang dibanding ketika suaminya masih menarik becak. Dari hasil itu pula ia dapat membangun rumahnya yang semula terbuat dari dinding kayu diubah menjadi dinding bata. Hal serupa dialami pula oleh pedagang-pedagang warung koboi lainnya. Semi, misalnya, ia mengaku bisa untung antara Rp 6000 - Rp 10.000 semalam dan sudah dapat memperbaiki rumahnya dan menikahkan kedua anaknya. Lain lagi dengan Mulyono, 26, bujangan berambut gondrong ini bisa membeli sepeda motor dari berjualan wedang di depan kampus IKIP Karangmalang. "Memang, sejak mereka bekerja di kota kehidupan warga desa Ngerangan jauh lebih baik daripada dulu. Rata-rata mereka bisa memiliki kendaraan roda dua, meskipun bekas," jelas Pak Sekdes.

Menurut Sutrisno yang mengkoordinir ratusan pedagang dari Bayat, Cawas, Pedan, dan Wedi, rata-rata anak buahnya menghabiskan 2 - 9 kg gula semalam dengan untung Rp. 3000 per kilo, "Kalau daerah laris seperti kampus UGM bisa sampai 9 kilo semalam," katanya.

Kota boleh jadi tempat yang penuh harapan bagi urban asal Bayat. Tetapi untuk mengadu nasib di kota dan menemukan pekerjaan yang baik tidaklah mudah. Sebagai petani *gurem*, kota adalah dunia baru yang

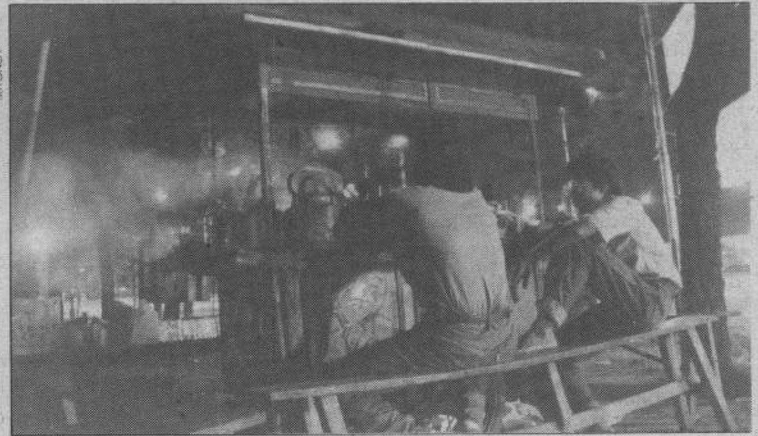
SUTRISNO, GODFATHER ala Bayat

DIA memang tak berdasi, kantornya bukan ruangan AC di puluhan tingkat gedung pencakar langit di bilangan Manhattan. Bahkan tak sepeserpun dia dibayar. Tapi soal *leadership* dan jurus bisnis tak kalah oleh seorang Iacoca atau Morita. Bayangkan, melalui "perusahaanya" dia mampu dalam waktu singkat membangun "*Corporate culture*", membentuk kepercayaan dan fanatisme "karyawan" yang tak kalah oleh konsep *lifetime employment*-nya Jepang. Dia juga mampu menciptakan perilaku dan budaya konsumennya untuk loyal pada "produk"nya. Hal terakhir bisa dibuktikan dari munculnya "budaya " baru masyarakat Yogya. Yaitu keluar pada petang dan malam untuk makan malam dan *kongko-kongko* di warung koboi. Mereka bahkan bisa sampai berjam-jam, tentu dengan isi kantong yang semakin terkuras. Ini bisa anda amati di remang-remang sore jalan-jalan sekitar kampus UGM, Malioboro, Jalan Solo, Kampus IKIP dan lain- lain. Belum lagi *selling strategy* yang "swalayan" dan pola kedekatan penjual-pembeli khas Bayat yang ditawarkan warung koboi yang tak kalah oleh Kentucky atau Mc Donald sekalipun.

Namanya Sutrisno, seperti sebagian anak buahnya berasal dari desa Bayat, Klaten. Dia bisa disebut *Godfather*-nya warung koboi di Yogya. Sekitar 200 angkring (gerobak) dengan 500-an pedagang, dan 25 pemasok makanan dari mendoan sampai nasi kucing, dari Bayat, Cawas, Pedan, Wedi dll. berada di bawah komandonya. Mereka tersebar pada beberapa tempat kelompok pedagang di daerah Terban, Sagan, Blimbingsari, Kentungan, Gading dan terminal Redjowinangun Yogya. Di tiap lokasi itu berkumpul belasan hingga puluhan pedagang, merupakan unit yang mengurusi keseharian warung koboi mulai dari logistik, keuangan, pembagian lokasi jual, pengadaan *angkring*, penentuan *shift* antar pedagang ketika sebagian mereka harus pulang ke desa untuk *tandur* atau *derep*, penentuan jumlah pasokan dagangan tiap hari dll. Unit-unit ini langsung dibawah kordinasi dan pengawasan Sutrisno. "Tiap hari mereka satu persatu lapor ke saya", ungkap laki-laki 50-an tahun ini. Dengan cara ini dia mengaku mampu memantau pedagang asal bayat di seluruh Yogya. Dari 'kantornya' yang sempit berdinding gedheg, di sela-sela kebisingan terminal Terban, Sutrisno mengeluarkan jurus-jurus manajemennya, memberi advis dan solusi bagi pedagang yang datang mengadu. Disini pula dia melakukan "seleksi" terhadap pedagang baru yang ingin bergabung dalam kelompoknya. Memang tidak sembarang orang bisa masuk menjadi pedagang warung koboi. Sutrisno menetapkan beberapa syarat melalui seleksi, "*Sorot ati meniko ketingal saking pasuryan*". (Budi

menjanjikan tapi juga menakutkan. Ganasnya kehidupan kota membuat mereka harus tetap bersatu selama tinggal di kota. Bersama teman-teman sekerabat atau teman sekampung yang sama-sama mencari nafkah di kota mereka hidup mengelompok dan saling bahu membahu. Mereka menyewa sebuah rumah yang sangat sederhana, Tidak ada bilik-bilik di dalamnya. Hanya sebuah ruangan dan tikar untuk alas tidur mereka. Hanya beberapa jam saja mereka mnempati rumah sewanya. "Sejak jam tiga sore kami sudah harus menyiapkan gerobak dan menata makanan, kemudian berangkat berjualan dan baru kembali lagi kira-kira jam empat pagi. Praktis kami hanya tidur sebentar," kata Pak Mardi menjelaskan.

Sementara itu biaya sewa rumah mereka tanggung bersama. Pak Mardi dan kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 40 orang mempunyai kebiasaan menyisihkan Rp 200,00 setaip harinya untuk membayar sewa rumah di daerah Sagan yang sampai menelan biaya sebesar Rp 2.000.000,00 setiap tahunnya. Itu belum termasuk biaya rekening listrik yang harus mereka tebus per bulannya.



SUYONO P

Akrab

Bukan sekedar hubungan jual-beli

Di rumah sewaan itu biasanya tingal pula tuan rumah yang kemudian dijuluki *juragan* oleh para penyewaa rumahnya. Kehadiran seorang juragan bagi para pedagan warung koboi memang sangat diharapkan. Juragan tidak hanya membantu menyediakan gula dan teh yang bisa dibeli anak buahnya, tetapi bagi mereka juragan diharapkan menjadi seorang *patron* yang siap

dan karakter seseorang terlihat dari air mukanya), katanya tentang "seleksi" itu.

Karena berasal dari desa yang sama, pedagang-pedagang ini biasanya memiliki loyalitas kelompok yang sangat besar. "Kalau tak percaya coba Anda memasukkan dagangan ke mereka, serta merta pasti mereka menolak dan minta agar menemui saya", tantang Trisno. Loyalitas yang sama mereka tunjukkaan pada sang *Godfather* Ini tak mengherankan karena proses penunjukkan Trisno memang sangat ketat dari bawah. "Mereka dari beberapa kelompok mengusulkan satu calon kemudian dibuat kemufakatan untuk menentukkan ketua", ujarnya. Sebagian besar pedagang adalah lulusan SD yamng umumnya awam terhadap kerasnya kota sehingga mereka membutuhkan figur sebagai pelindung dan pengayom yang cakap dan arif. Rupanya Trisno memiliki itu. Trisno sendiri mengaku belum pernah menjadi pedagang maupun pemasok makanan, disini dia murni berfungsi sebagai "manajer" walaupun tanpa gaji, *"Bapak ampun mande, sedoyo kebetahan bapak rencang-rencang ingkang bade nyekapi"*, (Bapak tidak usah bekerja, segala kebutuhan bapak biar kami yang mencukupi), katanya menirukan bujukan beberapa anak buahnya.



SUYONO P

Seluruh kegiatan organisasi pedagang warung koboi Bayat ini dikelola secara subsistem, tradisional dalam nafas kultur Bayat yang teduh, saling pengertian dan gotong royong. Mereka tak mengenal bank, "Bank itu seperti buto, tukang sita, mereka pada takut" ungkapnya sambil memandang beberapa anak buahnya yang sibuk meyiapkan dagangan di halaman rumahnya. Mengenai kebutuhan dana yang lebih besar Trisno menjawab tak ada masalah. "Setiap hari para pedagang dan pemasok makanan menyisihkan Rp 50- Rp 100 untuk kas", lanjutnya. Rupanya dari sini dana segar mereka peroleh. Dari uang kas ini pula anggota dapat meminjam uang untuk kebutuhan mendadak seperti sakit misalnya. Segala bentuk campur tangan dan dukungan pemerintah juga coba dihindari karena memang mereka tidak terbiasa dengan prosedur birokrasi yang sering rumit. Karena dikelola secara subsistem, tidak terdapat adanya usaha mereka untuk meleberkan usaha dengan memiliki lebih dari satu *angkring* sehingga tak terjadi penguasaan pemilikan warung oleh segelintir orang, jadi masing-masing pedagang menjalankan sekaligus memiliki sendiri usahanya.

Tak berlebihan menyebut Sutrisno sebagai pahlawan kaum marjinal. Karena melalui dia sekian ratus masyarakat pasca sawah yang menganggur di desanya di pedalaman Klaten mampu hidup lebih baik melalui sektor informal perkotaan tanpa meninggalkan desanya. Di masa koperasi semakin tersuruk, fenomena Sutrisno dengan "koperasi"nya adalah mutiara. Inilah obsesi Hatta puluhan tahun lalu, yang kian menjadi utopi.

Yuswohady

memberikan perlindungan.Tekanan ekonomi sosial di kota membuat mereka sangat membutuhkan seseorang yang dianggap mampu melindunginya. Ketika salah seorang diantaranya membutuhkan bantuan, misalnya, juragan adalah orang yang dianggap tepat untuk dimintai uluran tangannya. Karenanya mereka berusaha menciptakan hubungan emosi yang sangat kuat dengan juragannya. "Tapi juragan kami itu hanya memikirkan kebutuhannya saja," kata Mulyono. Menurutnya hubungan juragan dengan mereka hanya sebatas hubungan ekonomi. Juragan jarang sekali memperhatikan keluhan-keluhan anak buahnya. "Ketika ada salah satu diantara kami yang sakit, ia tidak mau menengok. Paling- paling hanya *titip*," tambahnya. Padahal, yang mereka harapkan adalah kedekatan emosi, bukan materi. "Kalau kami mau, kami bisa saja mencari kontrakan lain supaya ia tahu rasa. *Lha,* kalau kami pindah bisa miskin dia! Apalagi dia itu doyan beli *buntutan*," tambah Pak Mardi yang juga satu atap dengan Mulyono.

Memang, terlepas dari "eksploitasi" yang dilakukan juragan, anak buah tak akan begitu saja meninggalkannnya. Secara psikologis mereka sangat membutuhkan seseorang yang dapat dijadikan tempat berteduh karena ikatan sosial dan emosi yang erat akan mampu meminimalisir kegelisahan mereka hidup di kota. Terhadap orang-orang yang menitip makanan dan pembeli-pembelinya pun mereka berusaha bersikap kekeluargaan. "Karena sudah merasa dekat kami bisa pinjam meminjam uang. Atau jika ada pembeli yang *ngutang* dulu, kami tidak keberatan," kata Pak Mardi. Yang dialami Semi lain lagi. Kedekatannya dengan mahasiswa membuat ia menjadi banyak tahu tentang dunia mahasiswa. "Waktu unit Basket mengadakan acara saya juga diundang makan-makan di Gelanggang," lanjut Semi. Bagi mahasiswa sendiri Semi bukan lagi sekedar penjual nasi *kucing*, tapi sudah merupakan kerabat. Sehingga tak heranlah jika beberapa aktivis Gelanggang juga turut prihatin ketika istri Semi dirawat di rumah sakit.


SUYONO P.

Sentra Warung Koboi
Di sini "angkring" dipersiapkan

Perjuangan sosial psikologis untuk tetap bertahan hidup di kota itu masih ditambah dengan tanggung jawabnya terhadap sepetak sawah di desa yang tak bisa begitu saja diabaikan. Biar bagaimanapun juga pertanian adalah sumber utama kehidupan keluarganya. Mereka masih harus pulang ke desa untuk menggarap sawahnya atau sekedar melepas rindu pada anak istrinya, sementara itu kegiatan berdagang di kota diambil alih oleh salah seorang familinya. Setelah dirasa cukup mereka segera kembali ke kota, begitu seterusnya. Dan semua itu dilakukan semata-mata untuk meneruskan nyala tungku istrinya di desa.

Dalam bekerja mereka nampak tak pernah *ngoyo*, tidak perlu memaksakan diri. Baginya asal kebutuhan pokok yang berupa *sandang, pangan,* dan *papan* terpenuhi mereka sudah bersyukur. Tak heranlah jika mereka betah menjadi pedagang nasi kucing. Bahkan untuk pindah mencari tempat kerja yang lain pun mereka enggan. Mulyono, misalnya, malah melepaskan pekerjaannya di Jakarta hanya untuk menjadi seorang pedagang warung koboi. "Saya merasa lebih enak kerja begini, meskipun gaji di Jakarta jauh lebih banyak," kata bujangan 26 tahun ini.

Lalu, apa sebenarnya yang membuat mereka betah dan merasa puas dengan berdagang seperti itu? Sebagai orang Jawa, pola berpikir dan pandangan hidup mereka juga dipengaruhi kebudayaan Jawa. Persepsi mereka tentang kebahagiaan hidup yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa. Karenanya, konsep *nrima ing pandum* yang begitu lekat dengan orang Jawa tak dapat dipisahkan dari usaha petani-petani Bayat ini.Sementara itu munculnya rasa puas terhadap pekerjaan dan penghasilannya bukan saja karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan tetapi juga karena rendahnya tingkat pendidikan yang sempat mereka nikmati. Rata-rata dari pedagang warung koboi ini hanya menikmati bangku pendidikan sampai SD. Beberapa di antaranya ada yang sampai bangku SMP, dan bisa dihitung dengan jari yang sempat merasakan bangku SMA. Wajarlah jika mereka enggan berusaha mencari kerja lain. Dan mensyukuri kondisi yang sudah ada adalah upaya kritis untuk menghadapi kontradiksi yang dialami dalam kehidupan nyata.

Entah sampai kapan perjuangan hidup pedagang-pedagang marginal ini berakhir. Yang jelas, mereka merasa bersyukur dengan pekerjaannya itu. Malah, seorang di antaranya sempat berseloroh, "Kehadiran kami di sini kan malah memberi lapangan pekerjaan bagi orang kota. Mereka bisa menitipkan makanannya pada kami. Kami yang akan membantu menjualkannya."

Suluh Pratitasari

PESTA NOL TIGA PLUS TIGA



Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala,
Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama,
Bernyanyi dan menarilah bersama, dalam segala sukacita,
Hanya biarkanlah masing masing meghayati ketunggalannya,

(Kahlil Gibran)



Sholawat mengalun memecah kesunyian penduduk Indralaya, Sakatiga. Hentakan rebana bersahutan tiada henti. Bujang dan gadis beriring memasuki desa. Tak lupa membawa pisang emas yang melambangkan kemantapan hati pihak orang tua si bujang untuk melamar si gadis. Juga, gula batu yang melambangkan suatu harapan kiranya lamaran memperoleh hasil yang menyenangkan. Berarak bagai raja dan ratu dengan payung susun tiga. Bedanya, kalau raja dapat memperpanjang kekuasaannya seenak perutnya. sedangkan pengantin hanya berkuasa beberapa hari saja dan sesudahnya kembali menjadi rakyat biasa. Bermuara di rumah pengantin wanita. Ijab qobul disaksikan sanak keluarga. Diikuti jamuan bebek panggang ala Sumatra.

Mereka telah memenangkan separuh agamanya.

Perkawinan akan menjaga dari kerusakan akhlaknya. Terjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan serta membentengi kemaluan. **Abu Sulaiman Al-Darani** berkata : "Sabar menanggung penderitaan disebabkan jauh dari kaum wanita, lebih baik dari pada sabar menanggung derita akibat gangguan mereka. Akan tetapi sabar menanggung derita akibat gangguan mereka lebih baik dari pada menanggung derita neraka."

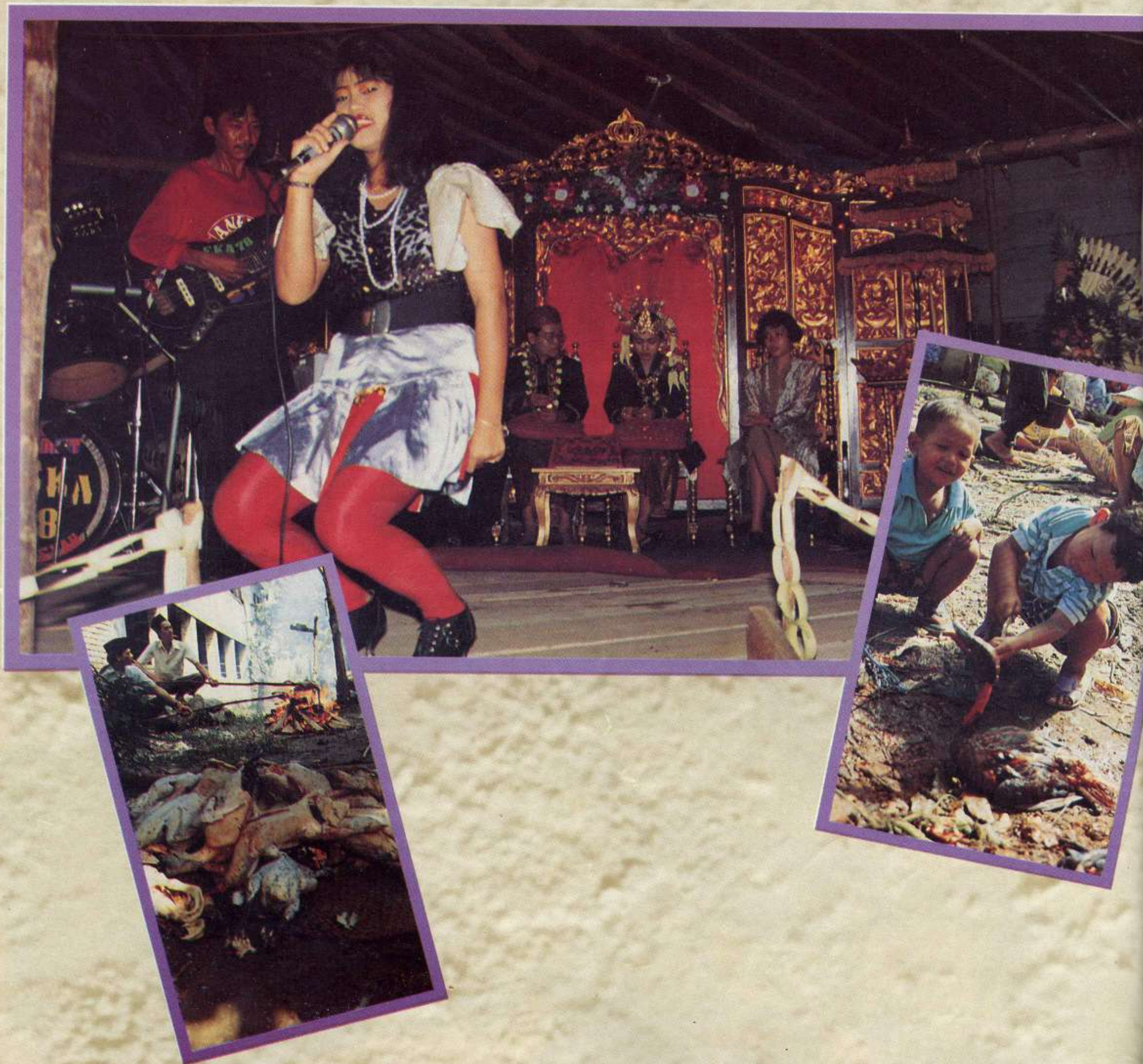








Bila hari telah mulai senja. Berdatanganlah bujang dan gadis pada acara pesta. Diiringi orkes mereka saling bertegur sapa. Menanti lelang kue dibuka. Acara khas **Ogan Komering Ilir, Palembang**. Kembang desa bergiliran membawa kue. Para bujang bersaing untuk mendapatkan kue yang dibawa oleh gadis pujaan hatinya. Sebuah kue kadang mencapai ratusan ribu rupiah. Suka ria berakhir bila subuh telah tiba.



Perkawinan telah menjadi acara yang meriah dimana-mana. Bermunculanlah berbagai bisnis dalam penyelenggaraan perkawinan.Penyewaan pakaian pengantin, katering, sampai kepanitiaan perkawinan ditawarkan. Berbagai atraksi menarik diadakan. Pentas musik, tari, sampai peragaan sulap ditawarkan di berbagai hotel berbintang. Berbagai biro perjalanan menyediakan paket bulan madu. Dari yang dalam negeri sampai ke manca negara. Dari Asia sampai ke Eropa.

Berapa bebek yang disembelih untuk pesta. Berapa mas kawin yang diterima. Berapa lama pesta telah terlaksana. Pesta perkawinan menjadi cerita menarik dimana-mana. Simbol status harga diri keluarga. Keluarga berada akan berpesta beberapa hari lamanya. Dan biayanya, **nol bisa berjajar tiga plus tiga.**

Foto dan Naskah oleh Kelik Suprianto

MASTER PLAN KAMPUS :

Benarkah Tambal Sulam ?

Bongkar pasang di sana-sini,bahkan tak jarang mengorbankan berpuluh batang pohon rindang mewarnai pembangunan kampus. Benarkah Master Plan Kampus memang tambal sulam ?

"YOGYA tanpa UGM mana bisa hidup ...", begitu *joke* yang biasa beredar di kalangan mahasiswa? Memang terkesan arogan, namun harus diakui bahwa kehadiran kurang lebih 30.000 mahasiswa cukup sebagai variabel penentu dinamika kota ini. Jumlah migrasi ke dalam kota terus mengalami peningkatan terutama untuk usia sekolah.

Keadaan ini menimbulkan masalah yang cukup kompleks bagi kondisi lingkungan kampus. Indikasinya, mulai tahun 1987 terdeteksi adanya pencemaran akibat kandungan debu yang melebihi ambang batas. Bahkan di beberapa tempat kondisinya terbilang parah..

Menurut penelitian yang dilakukan Depkes pada tahun 1987 diketahui bahwa kadar debu di sekitar simpang lima Bulaksumur telah mencapai 0,42 mg/m3. Tentu saja, ini kondisi yang sangat jelek. Sebab, kadar debu 0,26 mg/m3adalah ambang batas yang ditetapkan KLH tahun 1988.

. Padahal keadaan buruk ini diperkirakan terus meningkat pada tiap tahunnya. Di sisi lain, kepadatan penduduk yang terus meningkat makin mempersempit lahan yang bisa digunakan sebagai paru-paru kota.

Master Plan, Jawaban Sebuah Keprihatinan

Ketika isu lingkungan mulai dihembuskan, bahkan saat ini telah menjadi suatu keprihatinan yang mendunia kita terusik untuk mempertanyakan keterlibatan institusi berjubah masyarakat intelektual ini. Yang kemudian muncul ke permukaan adalah aksi macam sehari bebas polusi yang digelar oleh SM-UGM beberapa waktu yang lalu atau acara bersih kampus yang biasa dilakukan sebelum berangkat KKN, dan gerakan kembangisasi kampus yang langsung melibatkan mahasiswa sebagai pioner sekaligus pelakunya,berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh pihak rektorat, dengan kebijakan yang tertuang dalam sebuah Master Plan, lebih terlihat sebagai usaha dalam diam. Tanpa publikasi dan mungkin luput dari perhatian khalayak. Hal ini terjadi karena Master Plan tersebut memang lebih berorientasi ke dalam, berisi konsep pengembangan universitas, yang lebih akrab dikenal dengan istilah RIP (Rencana Induk Pengembangan). Konsep yang rata-rata diperbaharui tiap sepuluh tahun sekali ini memang sarat mengatur segala perihal pengembangan universitas. Aspek fisik secara kongkrit terwujud dalam penyediaan fasilitas fisik penunjang perkuliahan. Adapun aspek sosialnya mengarah pada keselarasan dengan lingkungan sekitar.

Lewat bidang yang menjadi kewenangan bagian perencanaan dan pengembangan inilah perhatian terhadap lingkungan tumpah. Setiap universitas memiliki otonomi dalam penyusunan master plan dimana tahap pengembangannya sangat tergantung pada universitas yang bersangkutan. Biasanya pengembangan tersebut sangat lekat dengan kondisi lingkungan sekitar.

UGM misalnya, jika dirunut, masterplan yang telah ada bahkan jauh sebelum tahun 1963 ini telah menjadi bagian yang utuh dari *grand-design* kota Yogya. Empat puluh enam tahun yang lalu tata kota Yogya yang dikembangkan Ir. Putuhena selaku Menteri Pekerjaan Umum telah menempatkan UGM sebagai inti kota bagian

utara. Penempatan ini disadari atau tidak, turut menentukan orientasi Master Plan yang ada. "Master plan kita memang berorientasi ke kota Yogya walau sebagian besar UGM berlokasi di kabupaten Sleman. Kabupaten ini sendiri akhirnya hanya berfungsi sebagai wilayah pendukung," tutur Ir. Soewandi Indanoe, M.Sce kepala bagian pengembangan UGM. Lantaran itu pula menurut orang yang juga tercatat sebagai dosen di jurusan teknik arsitektur ini, masalah yang membelit kota pada akhirnya juga menjadi masalah kampus.

Menyiasati Polusi

Seperti tertuang dalam master plan, nantinya wilayah kampus yang terbagi menjadi empat zone akademik ini akan terdapat delapan kantong parkir. Saat ini baru terealisasi sebanyak dua

SUYONO P.



Kantong Parkir
Proyek "Hijau" Yang Mahal

buah, satu di sebelah selatan FH dan yang lain disebelah timur FKG. Selain itu atas usul Prof. DR. Koesnadi lahirlah jalan setapak sebagai jalur penghubung utama dalam kampus. Mahasiswa, karyawan atau dosen sekalipun dengan sistem ini akan semakin akrab dengan jalan kaki, sebab semua jenis alat transportasi harus disimpan dalam kantong-kantong yang tersedia. Karena sistem ini pula kondisi kampus yang selama ini sangat terbuka dapat teratasi. "Ibarat rumah, tentu kampus juga memiliki wilayah yang orang luar tidak boleh masuk," tutur Soewandi lebih lanjut.

Bersamaan dengan program ini juga diadakan pembenahan pintu keluar-masuk kampus menjadi sembilan pintu. Tentu saja ini akan mengakibatkan adanya perubahan pada rute transportasi yang ada. Ringroad kampus misalnya, akan menjadi jalur utama angkutan umum yang melewati kampus, sekaligus akan memberikan peluang yang strategis untuk jalur yang dilewati. Ini memungkinkan dibangunnya berbagai sarana yang dapat dimanfaatkan umum. Sport centre misalnya, atau Campus Mall yang

SUYONO P.



Bunderan Bulaksumur
Kadar debunya di atas ambang

sedianya akan dibangun disebelahnya, walau sampai sekarang belum terealisasi.

Pembangunan kantong parkir dan jalur hijau ini bermula dari keprihatinan pihak kampus terhadap kondisi lingkungan yang kian gersang dan memburuk. Selain itu dirasakan sia-sia mencoba mengurangi kadar polusi jika tanpa mengurangi sumber polutannya.

"Hampir sebagian besar mahasiswa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, belum lagi arus lalu lintas di jalan Kaliurang, jalan yang membelah kampus menghubungkan pusat kota dengan bagian utara kota sangat padat. Kebisingan dan polutan dari knalpot ternyata sangat mengganggu proses perkuliahan" tutur Soewandi.

Lantas muncul beberapa ide lain untuk menanggulangi masalah tersebut. Konsep jalur hijau, dalam master plan yang hingga saat ini telah mengalami tiga kali revisi, digunakan sebagai alternatif utama. Sebenarnya konsep jalur hijau sudah mulai dikenal dalam Master Plan tahun 1971. Namun saat itu lebih terarah pada pembentukan keindahan kampus dan penyelamatan plasma nuftah yang ada. Saat ini fungsi jalur hijau mengalami pergeseran, lebih ditujukan sebagai usaha meminimalkan resiko pencemaran. "Usaha itu dilakukan dengan penanaman pohon peneduh sepanjang tepi jalan dalam kampus dan membuat suatu daerah hijau sebagai penyeimbang," demikian kata Ir Laretna, salah satu anggota tim review Master Plan periode 1993-2000. Selanjutnya menurut Laretna lembah yang terletak di sebelah timur kampus termasuk salah satu daerah yang dijadikan sebagai kawasan penyeimbang tersebut.

"Jenis pohon yang digunakan juga diatur secara khusus. Misalnya harus bersemak untuk meredam kebisingan dan berumur panjang serta rindang sehingga

membantu ketersediaan oksigen dalam kampus. Konsep ini juga diperkuat dengan ide kantong-kantong parkir," demikian menurut Ir. Soewandi, salah seorang anggota tim penghijauan kampus.

Usaha Mengawetkan Lingkungan

Di sisi lain, kebijakan kampus juga menyentuh usaha pengawetan lingkungan dengan perlakuan yang khusus terhadap limbah. Terutama limbah yang mengandung zat-zat yang cukup berbahaya, seperti preparat yang biasa digunakan di lab mahasiswa teknik kimia, ataupun kedokteran.

Jika di UNS diterapkan proses pengolahan limbah dengan alat pemroses yang ditanam beberapa meter di bawah tanah. Maka, UGM yang setiap harinya "menghasilkan" tidak kurang dari 33,40 m3 limbah juga memberikan perlakuan khusus. Caranya, diadakan pembedaan pengolahan antara limbah yang berbahaya seperti zat-zat kimia dengan sampah biasa. Limbah yang berasal dari fakultas yang biasa menggunakan zat-zat yang cukup rawan diolah bersama dengan limbah dari RS SARDJITO. Dengan cara ini, diharapkan racun dalam limbah bisa tereliminir.

Dalam rangka pengawetan, pada master plan diungkap pula pemilihan penggunaan bahan-bahan untuk pemenuhan sarana fisik. Sebut saja penggunaan conblok oleh UGM untuk membangun jalan sepanjang kampus. Di balik itu tenyata ada tujuan yang jauh lebih penting yaitu usaha pelestarian keberadaan air tanah. Selain itu juga terdapat usaha pengawetan arboretum di sisi utara kampus sebagai alternatif penyediaan paru-paru kota, di samping juga berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa kehutanan.

Jadi, konsep pengembangan yang terangkum dalam sebuah maket berukuran tak lebih dari 1x1 m2 itu cukup detail dan *jlimet*. Betapa tidak, bahkan penghitungan kebutuhan untuk pengembangan sarana dan prasarana seperti konstruksi jalan, kebutuhaan sistem komunikasi seperti telepon dihitung sampai rincian yang paling detail, lengkap dengan estimasi pendanaannya. Belum lagi konsep pengembangan yang ada diatur sampai ke dasar filosofinya.


SUYONO P.

Maket Kampus UGM
Master Plan Yang Tambal Sulam ?

Dana dan Tekanan Akademis

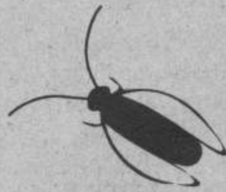
Sebenarnya master plan sendiri sangat rentan terhadap banyak faktor. Dana misalnya. Seperti diketahui dana yang berasal dari World Bank sangat terbatas. Apalagi master plan yang sejak tahun 1985 dikerjakan secara khusus oleh lembaga pengembangan universitas ini mulai menggunakan jasa konsultan asing , OD205 dari Belanda. "Saat ini kita melakukan pembangunan sebatas menggunakan dana yang masih ada dari World Bank sehingga belum banyak pembangunan prasarana fisik yang tampak," ungkap Soewandi. Lantas dana yang digunakan sebagaimana diungkapkan oleh DR. Sofyan Efendi, PR IV adalah murni berasal dari DIP (Daftar Isian Proyek) pemerintah yang jumlahnya sangat terbatas. "Untuk pembangunan fisik berkenaan dengan proyek pengembangan ini kita memang tidak mengadakan kerjasama dengaan pihak swasta," tuturnya lebih lanjut. Hal tersebut mau tak mau ternyata berpengaruh pada banyak rencana. Program penghijauan kampus yang terlihat sederhana pun tersendat lantaran besarnya biaya pemeliharaan. Tidak heran jika kemudian banyak mahasiswa menganggap pembangunan yang berlangsung terkesan tambal sulam, tidak terstruktur. Selain itu persoalan lain yang menghadang adalah adanya benturan antara dua kepentingan yang sama-sama strategis. "Kebijakan dalam master plan memang tidak pernah lepas dari kebijakan akademik yang ditempuh, karena itu master plan harus menyesuaikan dengan kebijakan akademik karena fungsinya adalah menunjang tercapainya tujuan akademis yang ada, "ungkap Laretna.

Kasus pembangunan PAU (Pusat Antar Universitas) bisa disebut sebagai contoh. Proyek ini terpaksa mengorbankan belasan pohon perindang dan areal yang bisa berfungsi sebagai lahan penyeimbang, lantaran tuntutan kebijakan akademis. Tapi menurutnya kepedulian akan lingkungan tetap dilakukan dengan meminimalkan terjadinya peristiwa yang serupa. Alhasil master plan pun akan berubah secara dinamis dan luwes. Karena itu pula metode yang digunakan dalam penyusunannya adalah mengakomodasi kemungkinan kebutuhan akademis baru kemudian diputuskan apa yang harus direalisasikaan. Barangkali ini pula yang menyebabkan adanya kekhususan pada tiap *master plan*□

Indriaswati,
Timbul S., Frans S., Dwi Soufnita

KECOA

kilas balik pjpt nol dan satu



MENJADI semacam niscaya sejarah bahwa tak sepantasnya kecoa menjadi belalang atau kupu-kupu, begitu pun bangsa kecoa menjadi bangsa yang sedikit lebih beradab dari bangsa kecoa. Ini slogan rezim bangsa-bangsa yang memvonis dirinya sebagai bukan bangsa kecoa. Mereka yang kenyang kemapanan sekaligus lapar hegemoni. Tapi tidak benar kalau ini slogan kosong-arogan, karena setidaknya Prebish, Cardoso, Ianni, Santos, bahkan Drucker jujur mengungkap ini dengan teriak kusam. Bahkan mereka menyebut terminologi hitoris-deterministik, "ke-kecoa-an struktural" sebagai kemutlakan yang kian mewabah, merambah bangsa-bangsa kecoa.

Dan kecoa, memang makhluk iseng nan malang. Dia hanya layak diinjak, digerus dengan keras hak sepatu dan lalu masuk sampah. Terlalu kotor menyebut suatu bangsa sebagai kecoa -- ini hanya ungkapan bangsa nomor satu, tiran, hanya *term* AS memandang Kuwait, Irak, Iran, dan terakhir Bosnia, juga Indonesia -- tapi tidak dan sah-sah saja ketika memang dia "kecoa". *Term* "kecoa" adalah bahwa dia hanya puas (dan payahnya merasa ditakdirkan) sebagai periferi, satelit, pinggiran, penonton, figuran, ampas sejarah. Karenanya dia nirpribadi- nirnurani, gampang begidik, selalu bohong.

Pilihan strategi ke arah mana bola salju sejarah negeri ini mau digelindingkan adalah entitas kecoanya kita. Pada awal berdirinya negeri ini, ketika kita dengan cemerlang mengkoyak kolonialisme, imperialisme, tirani, pada saat yang hampir bersamaan setelahnya (seperti seorang *Cinderella Complexian* akut) timbul romantisme, disadari atau tidak untuk kembali menjadi kolonial, kerinduan hidup dalam tirani dalam kemas-cantik; neokolonialisme, neoimperialisme, supratirani, juga kapitalisme mondial dalam simbol-simbol menyilaukan mata ; IMF, World Bank, PBB, GATT.

Pada saat seperti itu, seharusnya negeri ini banyak melamun, merenung, meneliti kembali lapis demi lapis endapan-endapan sejarah. Bercengkrama mesra dengan geliat-geliat dinamika kebudayaan. Jauh sebelum merdeka, bahkan seorang Hatta menyebut "Sosialisme Religius" sebagai "terdapat pada masyarakat desa yang asli", juga utopia dia tentang "pembangunan masyarakat baru" yang tak kalah dari utopia Cabet. Justru orang Belanda, Day, Boeke, juga Geertz mengatakan bahwa "manusia Indonesia" adalah fenomena unik yang tidak bisa dipermak dan disetubuhi secara murah oleh isme-isme dari dunia lain.

Barangkali Jerman adalah bangsa yang memang sejak awal bukan kecoa. Saat revolusi industri berjaya dimana Inggris menjadi *mainstream* sejarah dengan panji-paji kosong *leizess feire*-nya, Jerman justru memutuskan menjadi pertapa dengan apa yang oleh Senghas disebut "delink", hasilnya dia lolos dari lingkaran setan hegemoni Inggris dan jadi bangsa nomor satu di Eropa saat ini. Sejarah perjalanan bangsa Cina juga pekat dengan kesenyapan dan perenungan. Menghancurkan struktur sosial feodal-kolonial melalui revolusi 1949. Melalui *land reform* mendemokratisasikan petani dengan pertanian kolektif dan orientasi ekonomi desa. Melakukan *great leap forward* sejak 1958, juga revolusi kebudayaan 1966, dan terakhir di bawah Deng yang terbuka dan kapitalis. Semuanya adalah hasil proses dialektis bangsa ini dengan endapan-endapan sejarah, bukan dari Inggris, Amerika, atau pun Rusia.

Sebuah titik balik suram memang ketika kita justru memilih dunia lain yang dikatakan sebagai "lebih menjanjikan". Dalam kondisi bayi merah lengkap dengan darah dan tali pusar yang belum lagi putus, kita sudah harus berhadapan dengan dinosaurus-dinosaurus mengerikan ; kapitalisme puritan, ICOR, Harrod-Domar, dst. "Penentu negeri ini ternyata hanya menjadi *Franchaise* dunia lain, demikian kata seorang ekonom, yang menggelar etalase-etalase dunia menjanjikan". Kertas kerja, buku tebal, dan kuliah-kuliah di Universitas Rotterdam, Harvard, Barkeley menjadi aspirin yang ampuh menyembuhkan borok-borok apapun negeri ini.

Hasilnya, struktur sosio-ekonomi negeri ini *gojag-gajeg*, bopeng-bopeng. Gulir pembangunan dan modernisasi berjalan terseok. Tak salah kalau Prof. Sarbini mengatakan , *"The history of no change"*, kita tak banyak berubah sejak kolonial hingga sekarang. Kita seperti terjebak dalam perangkap atmosfir tak terpahamkan, layaknya si malang Marsoult berhadapan dengan dunia kejam Camus dalam L'etrange. Di tengah kebingungan,absurditas dunia lain,galau penantian panjang kita makin terpuruk dalam kungkung keterasingan. Inilah drama besar bangsa kecoa, alienasi yang sepi dan muram. Keterasingan yang bahkan lebih mendarah daging dari "keterasingan masyarakat kapitalis" Herbert Marcuse. Negeri ini memang tak jujur !

Yuswohady

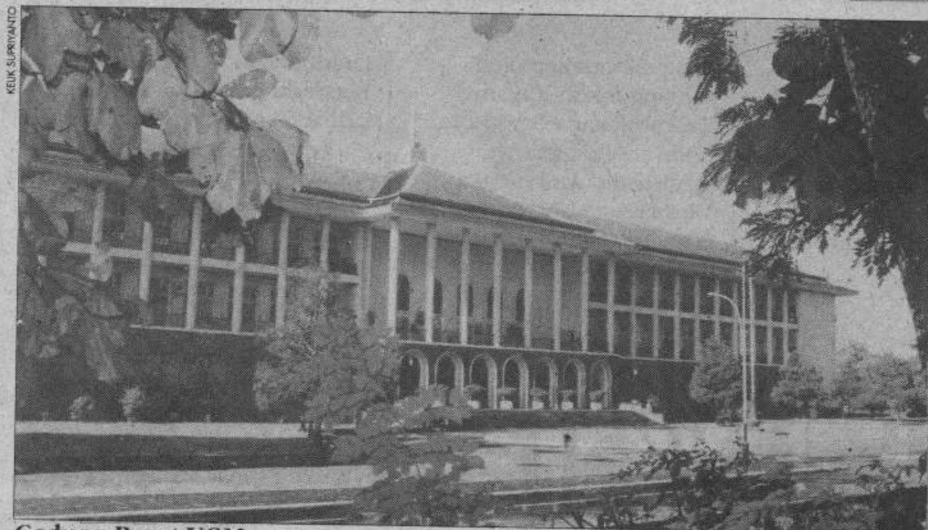
dari Kampus Ndeso untuk Indonesia

Ndeso, begitu julukan UGM, universitas tertua di negeri ini. Julukan ini bukan berarti merujuk kualitas, tapi lebih pada komitmen kerakyatannya. Mampukah karakter UGM itu berjalan seiring dengan jaman yang makin menuntut sikap agresif, pragmatis, dan percaya diri?

SEORANG ibu yang tinggal di Sumatera Utara sempat kebingungan melihat perubahan perilaku putra lelakinya. Pasalnya anak semata wayang yang baru datang dari Yogya setelah sekian lama kuliah di UGM ini, tiba-tiba menjadi agak pendiam dan penuh rasa sungkan untuk sekedar menatap mata sang ibu sekalipun. Ini adalah cuplikan kisah yang dilontarkan oleh seorang tokoh Kagama Daerah Jakarta Ir.Wartono Kadri disela pidato seriusnya dalam rangka Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. "Dan apa yang terjadi adalah sangat mengejutkan," lanjut beliau, "sang anak Batak ini porsi makannya jadi sedikit ...."

Mungkin ini hanya sebuah joke yang dilontarkan untuk memecah keseriusan suasana. Namun cukup menggelitik untuk dicermati, mengapa setelah bertahun-tahun sekolah di Yogya sifat dan perilaku sang mahasiswa

KELIK SUPRIYANTO



Gedung Pusat UGM
Kampus *ndeso* bernafaskan kerakyatan.

berubah ke arah low profile dan cenderung *samadya* sampai ke urusan makan sekalipun? Lingkungan Yogya hampir pasti menjadi tertuduh utama terhadap gejala ini. Namun mungkin juga peran Universitas Gadjah Mada yang setiap hari menjadi tempatnya untuk menimba ilmu, cukup dominan dalam membentuknya menjadi manusia yang 'tanpa banyak kata dan tanpa banyak mau'.

Kisah mahasiswa di atas hanyalah salah satu dari banyak kasus yang kerap hangat dibicarakan oleh kalangan alumni UGM. Sudah menjadi pandangan umum bahwa ada korelasi antara karakteristik sebuah universitas dengan watak dan sikap lulusannya. Perilaku tersebut biasanya tampak dengan jelas melambangkan semangat masyarakat di tempat berlokasinya kampus.

Nafas Yogya yang sarat dengan muatan budaya tata krama dan lemah lembut ala keraton, membentuk identitas yang khas bagi UGM. Apabila dibandingkan dengan UI dan ITB, akan tampak kekontrasan warna karakter yang sangat kental, meskipun ketiganya sama-sama memiliki peran yang sangat diperhitungkan dalam penentuan arah kebijakan di negeri ini.

Apabila performa dan akreditasi sebuah universitas salah satunya ditentukan oleh mutu lulusan yang dihasilkan, maka karakteristik sebuah universitas juga tampak jelas tercermin pada perilaku alumnus-alumnus tersebut. Hal ini menjadi menarik bila dihubungkan dengan persaingan dalam

MENTERI bukan ukuran

MENGAPA alumni UGM jarang yang diangkat menjadi menteri? Ada *guyonan* yang dengan telak menjawab: karena orang-orang UGM terlampau sederhana hidupnya sampai-sampai pasang teleponpun *nggak* mampu. Betapa tidak. Dari 171 orang menteri negara dan pejabat yang setingkat dengannya (selama Kabinet Orde Baru) hanya 10 orang berasal dari UGM. Sedangkan UI boleh bangga karena 60 menteri yang duduk di kursi kabinet adalah alumni dari sana. ITB sendiri meskipun baru menempatkan 27 orang di posisi kabinet selama Orba itu, namun pada era sekarang ini ITB mampu menggeser dominasi UI, dengan 12 menteri berarti 3 orang lebih banyak dari pada UI yang berjumlah 9.

UI seperti diketahui membawa warna khas teknokrat, yang dimotori oleh Widjoyo Nitisastro dengan timnya yang terbilang kukuh di Bappenas, sedangkan ITB menggenggam panji teknolog yang tengah berkibar pada era industrialisasi dewasa ini.

Ketika timbul pertanyaan sederhana, kapan tiba giliran UGM untuk merentangkan warna khasnya di kursi bergengsi itu?

Prof. Dr Mubyarto, asisten Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan dan Masalah Kemiskinan, dengan tegas menyatakan menjadi menteri bukanlah ukuran untuk menyatakan ide sebuah universitas dipakai atau tidak. "Tiga orang UGM diangkat menjadi asisten menteri, dan posisi Dirjen banyak dipegang orang-orang UGM. Mereka itukan penentu arah kebijakan. Mereka yang pegang kuncinya." demikian kata Mubyarto.

Apabila dicermati tampaknya UI dan ITB lebih tanggap dan akomodatif terhadap kebutuhan tahapan pembangunan akan sumberdaya manusia yang pragmatis dan fungsional, Di sisi lain boleh jadi kedekatan kedua PT tersebut pada penguasa pusat (ibukota) memberi akses khusus terhadap peran dan peluang alumninya. Menurut Drs Bahagia Muljadi Sekretaris IA ITB (Ikatan Alumni ITB), kedekatan bukanlah faktor penting bila tidak didukung kapasitas

dunia kerja dan pendakian jenjang karier. Tipe mana yang lebih diminati? UGM yang cenderung low profile, idealis, dan tidak menggebu-gebu, atau semacam ITB dengan alumninya yang dikenal sangat bersemangat bahkan cenderung *over confidence* ataukah UI yang lebih dikenal sebagai universitas teknokrat, elite, dan (menurut kabar) agak cuek dan kapitalis?

"Yang paling penting adalah *right man on the right place,"* kata **Drs Yusuf Arbianto**, Managing Director Bank Danamon ketika ditemui Balairung di kantornya. Yusuf yang lulusan FE UGM ini juga mengakui kekontrasan karakter yang dibawa dari lingkungan Yogya dan Jakarta. "Teman-teman dari UGM sangat halus dan hati-hati, Itu tercermin dari gaya kepemimpinannya," lanjut Yusuf. Ia pribadi lebih menyukai sistem manajemen konsultatif dan kerja sama penuh kekeluargaan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh **Prof. Dr. Emil Salim**. Menurutnya kapasitas personal jauh lebih menentukan, tidak peduli dari UGM, UI atau ITB. Tapi lebih jauh Emil mengakui bahwa kedudukan UI di Ibukota memiliki akses yang kuat dalam dunia ekonomi bisnis. "Saya melihat peran UI di bisnis sangat kuat. Tapi meskipun berlokasi di ibukota, kedekatan itu tak ada manfaatnya bila profesi tak sesuai dengan tingkatan-tingkatan pembangunan. Yang sebenarnya terjadi adalah tahapan pembangunan menentukan profesi," papar mantan menteri KLH yang kini aktif mengajar di bekas almamaternya, Universitas Indonesia.

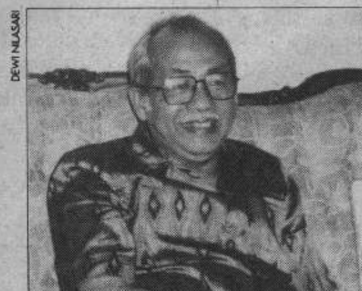
Dari pendapat Emil Salim, jelas tergambar perlunya proses adaptasi antara titik berat tahapan pembangunan dengan orientasi profesi. Seperti diketahui Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua ini memberi tekanan pada industrialisasi, secara otomatis tekhnologipun menjadi primadona. Meskipun peran teknokrat tidak bisa dikatakan usai, namun para teknolog telah mulai mengambil gilirannya untuk memainkan peran. Tak ayal lagi alumni ITB seolah menikmati jaman yang kini kian ramah terhadap bidang profesi mereka.


REPRO

Prof.Dr.Mubyarto
Bangga dengan predikat pedesaan

primordialisme almamater yang selama ini merebak menjadi bisik-bisik hangat di belakang layar? "Gejala itu sebenarnya berangkat dari kebiasaan yang sama dari orang-orang satu kampus. Satu sama lain sudah hapal temperamen kepemimpinan masing-masing. Jadi menggaet teman sekampus itu sudah otomatis karena mereka mempunyai ikatan historis dan kekeluargaan. Tapi stempel penguasaan departemen oleh PT tertentu itu kan kebetulan saja," ungkap Bahagia Mulyadi.

Namun diakui atau tidak, UI telah berhasil mencengkeramkan pengaruhnya selama Kabinet Orba. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro adalah salah satu tokoh penting peletak dasar arah kebijakan ekonomi di negeri ini. Selain itu dari UI telah lahir sarjana ekonomi generalis dengan spesialisasi terbatas seperti; Ali Wardana, Sumarlin, Emil Salim, Saleh Afif, dan Marie Muhammad yang secara bergiliran malang melintang di pos-pos picu dan strategis.


DEWI NILASARI

Ir. Wardoyo
Harus menjaga obyektivitas

Suara menolak adanya indikasi primordialisme almamater, juga muncul dari UGM. "Kalaupun ada itu hanya kecil saja. Lagipula caranya halus dan tidak terang-terangan." ungkap Mubyarto. PR IV UGM Dr Sofian Effendi juga mengakui, bahwa sebagai universitas besar UGM menghindari cara-cara dan ikatan seperti itu. "Dalam arti tidak secara terencana memberi peluang dan kedudukan."

Tapi selain itu upaya fanatisme terhadap almamater memiliki pendukung tersendiri. Hal ini terungkap oleh pernyataan Drs Sinaga yang secara terang-terangan mengusulkan AD ART yang memuat tentang hal tersebut. Sinaga juga mengungkapkan tiga hal pokok mengapa alumni UGM begitu sulit bersaing di kabinet yaitu; sifat *low profile*, tak mau *kasak susuk*, dan relatif jauhnya UGM dari pusat kekuasaan. "Tarik menarik dalam kabinet itu biasa. Bila kabinet dikuasai UI dia menginginkan kelompoknyalah yang diperjuangkan." cerita Sinaga bersemangat.

Namun menurut Ir. Wardoyo konsep Sinaga tadi tidak mudah untuk dijalankan dalam instansi strategis milik pemerintah. "Meskipun kebetulan teman Gadjah Mada menduduki jabatan tertentu , dia juga harus menjaga obyektivitas, karena ini pengabdian untuk negara. Melalui Kagama-lah kita harus berusaha muncul dengan prestasi dan tidak tercela."

Menjadi menteri memang bukan ukuran pengabdian. Dan bukankah, masih banyak yang bisa dilakukan untuk Indonesia?

Danar W.
Teguh U., Suyono P.

"Saya akui memang ada aktivitas luar biasa dari ITB," demikian menurut **Prof. Dr. Mubyarto** dari P3PK UGM. Lebih lanjut gerakan kuat dari ITB tersebut terlihat nyata dalam partisipasinya yang dominan di Kabinet Pembangunan VI saat ini. Dimotori oleh Habibie, barisan insinyur itu telah berhasil menggeser dominasi UI yang lebih dahulu menempatkan banyak alumninya di kursi menteri pada masa-masa kabinet sebelumnya (lihat: Menteri Bukan Ukuran).

Bagaimana dengan Gadjah Mada? Universitas yang memiliki orientasi kerakyatan ini dikenal dengan watak alumninya yang tenang, sederhana dan paling teguh memeluk disiplin keilmuannya. Tak mengherankan bila profesi dosen, peneliti, dan cendekiawan adalah pilihan paling pragmatis meskipun sepi dari materi. Persoalan-persoalan yang menyentuh masyarakat bawah terasa lebih kuat memanggil, sangat pas dengan orientasinya sebagai universitas *ndeso*. Apakah orientasi yang melawan arus tuntutan pembangunan (membutuhkan manusia-manusia penuh semangat, lebih ekstrofert dan percaya diri) serta karakter alumninya yang sebagian besar tercetak kalem dan ndeso tersebut tidak merepotkan alumni UGM dalam persaingan di dunia kerja, ekonomi bisnis, birokrasi pemerintahan, dan sektor-sektor yang lain? Banyak jawaban yang pro maupun kontra terhadap pertanyaan tersebut.

Diantara yang setuju adalah **Drs Abrar Din Ilyas,** staf Riset Majalah Tempo. "Saat rekrutment di Tempo, pelamar dari UGM terkesan minder ." Menurut cerita Abrar, sewaktu diadakan test wawancara satu pelamar menghadapi beberapa pewawancara, terlihat sangat nyata perbedaan antara lulusan UGM, UI, ITB, dan IPB. "Yang dari UGM , baru ditertawakan aksen Jawanya saja sudah *down*, grogi!" jelas Abrar. Diakuinya lulusan ke tiga PT lainnya (UI,ITB,UI) sangat bagus kemampuan oratoriknya. Apalagi ketika test presentasi mereka tampak sangat percaya diri. "Menurut saya *low profile* boleh boleh saja. Tapi *timing*nya harus tepat, fleksibel lah." lanjut lulusan Fakultas Filsafat UGM ini.


DEWI NILASARI

Drs. Sinaga
"Alon-alon waton kelakon, nonsens...!"

Senada dengan Abrar, **Drs Sinaga**, direktur PT Unilon Textile Industries Bandung juga menilai bahwa sikap low profile tersebut tidak selamanya menguntungkan. Apalagi bila diterapkan pada lulusan generasi jaman ini. "Orang-orang UGM itu enggan mempromosikan diri. Padahal Kagama organisasi kuat dan sangat diperhitungkan sebagai kekuatan politik yang besar dimana didukung oleh hampir 61 ribu sarjana. Tapi itu tidak terjadi, karena kita maunya tenang dan baik-baik saja. Sekali-sekali sombong boleh *dong*!" kata lulusan FE UGM tahun 1966 ini berapi-api.

Sementara itu sanggahan tentang sikap sederhana dan merakyat menjadi kendala datang dari **PR IV Dr. Sofian Effendi**, MPIA. "Seringkali UGM sebagai Universitas *ndeso* menjadi bahan lecehan universitas-universitas lain. Padahal bukan berarti kelas kita yang ndeso." kata Sofian Effendi dengan nada tinggi,"UGM sangat memperhatikan masyarakat marjinal yang tinggal di desa, itu esensi dari slogan *ndeso.* Kita harus bangga menjadi universitas besar yang peduli pada rakyat kecil." Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa alumni UGM tidak banyak yang menjadi konglomerat atau pejabat di eselon-eselon tinggi adalah wajar, "Orientasi kita memang tidak ke sana." jelasnya.

"Manusia hidup ditempa oleh lingkungan. Mau tak mau sayapun punya tipe Gadjah Mada, tipe Yogya. Tapi saya punya kiat untuk menyiasati tempaan itu. Meskipun kalem tapi tidak *ingah-ingih*, tapi juga tidak *kemaki,"* demikian menurut Ir. Wartono Kadri. Mantan Ketua Kagama Jakarta ini memiliki pengalaman menarik sehubungan dengan ke*ndeso*an UGM. "Saya lihat karena dekatnya jarak IPB dengan ibukota, komunikasi dan informasi lancar dan cepat sekali. "Kemarin saya ketemu salah seorang Dekan IPB di lantai bawah (gedung Manggala Wanabakti-red)Itu sering terjadi, sedangkan dekan Faperta UGM belum tentu sebulan sekali ke sini."

Tanggapan senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Mubyarto.

"Kesederhanaan dan an bukan berarti harus kalah dalam bersaing. Saya pribadi bangga menyandang predikat pedesaan ini. Siapa lagi yang mau peduli dengan masalah kemiskinan di desa- desa? ujar profesor yang terkenal dengan konsep ekonomi Pancasilanya itu. Hal ini dibenarkan oleh Wartono Kadri "Yang jelas tempaan Yogya jauh lebih tahan banting, nggak *neko-neko*, dan relatif jujur," jelasnya.

Pada saat ini orientasi yang dipilih oleh UGM mungkin masih relevan, tapi bagaimana dengan era-era yang akan datang? Perlukah sebuah reorientasi agar lebih antisipatif terhadap gerak perubahan jaman dan tahapan pembangungan di negeri ini? Mungkin hanya sang waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas saat ini, seperti yang dikatakan Mubyarto, "Tidak ada reorientasi dan tidak ada yang namanya rekayasa" ☐

Danar W.
Dewi Nila, Dewi Ratna, Ratna Susy

MUNAS VII KAGAMA

Menolak Budaya KULTUS

Ia jujur dan sederhana. Dengan gaya penampilan lebih 'yogya' dari pada metropolis, meskipun sebagian hari-harinya dihabiskan di ibukota. Kompas pernah menyebutnya sebagai punya pembawaan *superstar*, murah senyum, tajam visi, dan strategis dalam memilih program. "Sejak sidang pertama sebenarnya mereka sudah tahu bahwa saya tidak bersedia dipilih lagi," ungkap Prof.DR. Koesnadi Hardjasoemantri,SH, sang *superstar* itu, ketika dimintai pendapat sehubungan dengan terpilihnya kembali dirinya sebagai Ketua Umum PPH KAGAMA.

Munas KAGAMA VII yang digelar awal Agustus lalu, telah mengangkat Koesnadi secara bulat sebagai Ketua Umum untuk yang ke tiga kalinya. Sunyi dari perdebatan, tak ada interupsi, sidang berjalan lurus dan dalam suasana kekeluargaan yang pekat. Ketika teriak setuju berkumandang, Koesnadi merasa tak berdaya, "Saya jadi terpojok. Soalnya dalam Kagama kita sudah mempunyai komitmen apabila seseorang sudah diminta untuk mengemban tugas, tidak boleh lagi menolak." jelas Koesnadi.

Ini sebuah keputusan dengan gaung besar namun hampir tanpa kejutan. Peserta MUNAS tampaknya masih belum menemukan tokoh sekaliber Koesnadi yang layak menjabat posisi ketua umum. Terlihat jelas betapa santernya nama Koesnadi disebut-sebut pada saat- saat terakhir pemilihan. Suara-suara yang berasal dari KAGAMA daerah terbukti seirama. Suasana MUNAS KAGAMA VI di Denpasar terulang lagi di Banjarmasin ini, yang bermunculan adalah permintaan untuk menjadi staf pengurus seperti ketua,sekretaris, dan bendahara tapi tidak untuk jabatan Ketua Umum.

"Memang awalnya ada calon lain. Tapi mayoritas menghendaki Pak Koes, ya' kita pilihlah dia. Bagi saya yang penting programnya bukan orangnya. Memang saya merasa ada kelompok-kelompok yang menginginkan Pak Koes naik lagi, dengan pertimbangan tentunya," kata Ir. Wartono Kadri, mantan ketua Kagama Daerah Jakarta yang juga menjadi salah satu anggota tim formatur.

Mengapa Koesnadi terpilih lagi? Tak adakah calon lain yang muncul dalam Munas itu? Kabarnya ada yang menyebut-nyebut nama Trimarjono (ketua DPRD Jatim) dan Wardoyo (mantan Menteri Pertanian Kabinet Pembangunan V), tapi selentingan itu segera terlibas oleh gelombang suara yang mendukung Koesnadi.

Sebagian peserta MUNAS memang menganggap Koesnadi pantas untuk dipilih kembali. Kenyataan bahwa Koesnadi telah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum nampaknya bukan soal. Selain itu profesor Hukum Lingkungan itu juga sangat populer dan dihormati oleh kalangan anggota Kagama. Tidakkah fenomena ini akan menjurus ke arah mengkultuskan seseorang?

"Sama sekali bukan ekslusivisme atau mengkultuskan Pak Koes. Kita menghindari hal-hal semacam itu. Yang mau jadi ketua banyak kok. Asalkan mampu dan interest '*ya monggo*,. tapi harus bisa mengukur kemampuan diri." jelas Dr. Hadori yang dalam kepengurusan ini menjabat sebagai Ketua II.

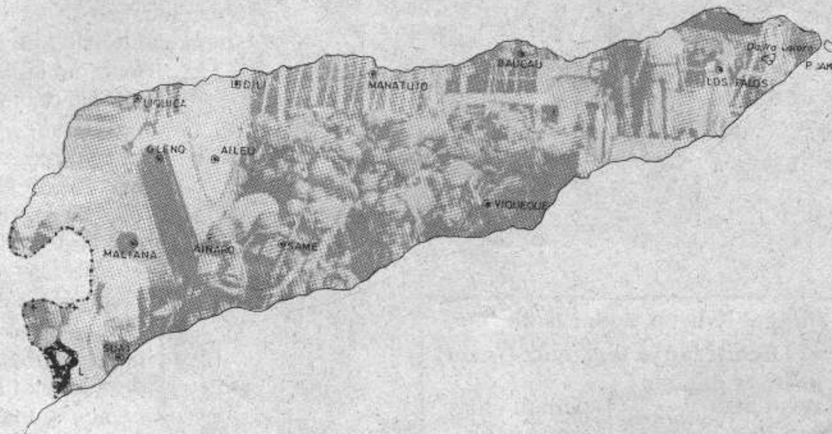
Tapi merujuk kenyataan, sejak awal Koesnadi menolak pencalonan kembali dirinya dan melihat kecilnya animo orang-orang untuk mencalonkan diri, adakah sikap apatis terhadap jabatan bergengsi itu? Drs. Sumargono ketika ditemui BALAIRUNG di kantornya, bersama dengan Drs. Hadori Yunus menyatakan, "Saya sendiri tidak ambisi untuk menjadi ketua. Biar yang muda-muda, saya ngurus yang lain sajalah," ungkapnya santai. Dari mereka berdua juga terungkap bahwa Wardoyo tidak mungkin dibebani tugas sebagai Ketua Umum, karena kesehatannya tidak memungkinkan. Itu mungkin salah satu sebab mengapa Wardoyo tidak mencalonkan diri.

Ketika dihubungi BALAIRUNG, Wardoyo menyatakan bahwa seorang Ketua Umum PPH KAGAMA sebaiknya berdomisili di Yogya. " Dulu pernah ketuanya berasal dari Jakarta, tapi tak bisa berjalan lancar dan hanya bertahan satu periode". Idealnya menurut Wardoyo, ketua Kagama ada dua orang (diluar ketua umum) yang ditempatkan di dua kota, Jakarta dan Yogya. Dengan pemikiran bahwa ibukota adalah induk segala bentuk informasi dan pusat pemerintahan. Penempatan ketua di ibukota ini akan sangat menolong KAGAMA dari kemungkinan ketertinggalan, lagipula anggota yang terbanyak bertempat tinggal di sana.Nampaknya karakter kalem alumni UGM ikut mewarnai suasana MUNAS KAGAMA VII yang lalu. Atmosfir yang tenang dan penuh kekeluargaan membuat alur sidang menggelinding mulus. Agaknya perlu disimak apa yang dikatakan Drs. Sumargono bahwa hasil yang diperoleh memang optimal, tapi optimal belumlah tentu yang terbaik.

Danar W.
Dewi Nila

api TIMOR dalam SEKAM

Timor-Timur dari seberang lautan bagai mozaik kusam perbukitan ilalang. Menginjak daratannya, sungguh terasa betapa panas dan menyengatnya tanah ini.



POS KEAMANAN Maubara di siang hari yang gerah, seorang prajurit berjalan gagah memanggul senjata. Di sisi jalan yang lain, seorang bocah kecil berperut busung dan telanjang, memandang terpukau dengan matanya yang tajam. Di tangannya, tergenggam erat Curik, pedang perang khas Timor.

Timor-Timur memang memukau bila hanya dipandang. Menyusur jalanan aspal hot mix dari kota ke kota bisa membuat orang terlena. Dulu jaman dijajah Portugal, jalan aspal panjangnya cuma 12 km, itupun hanya di kota Dili.

Tentu saja Indonesia lain dengan Portugal. Setiap tamu yang datang dengan pesawat akan segera tahu bedanya. Dari Bandara Comoro ke pusat kota Dili, mereka pasti lewat jembatan "politis". Ada dua jembatan di situ, satu jembatan yang kokoh bangunan Indonesia, dan di sebelahnya jembatan lama yang tidak meyakinkan, dibangun oleh Portugal.

Jembatan itu seolah menjadi simbol nyata melesatnya pembangunan fisik di Timor-Timur pasca integrasi. Lereng-lereng kurva statistik yang menggeliat naik, kenyataannya bukan omong kosong. Sejak kesepakatan Balibo tertanggal 30 November 1975 sampai sekarang, catatlah semisal jumlah sekolah telah meningkat berlipat-lipat, rumah sakit dan puskesmas merebak di tiap kota, didukung infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai.

Sayangnya, pembangunan fisik tersebut kadang tak mengena pada sasaran. Seperti yang diungkap Francisco Soares, ketua KNPI Bobonaro, dalam pertemuan akbar gubernur dengan masyarakat Kabupaten Maliana, "kami melihat banyak gedung mewah tidak dimanfaatkan, padahal masyarakat sangat membutuhkan". Dia juga mengkritik rencana pendirian SMA 2 Maliana yang menurutnya tidak perlu. Yang lebih mendesak adalah sekolah kejuruan, sehingga lulusannya bisa langsung berguna bagi masyarakat. Sekarang saja sudah ada sekitar 14.000 pemuda yang menganggur.

Francisco Soares tidak sendirian. Beberapa penduduk asli Tim-Tim yang ditemui BALAIRUNG secara jujur mengeluh tidak merasakan hasil pembangunan secara optimal. Justru banyak penduduk pendatang, karena kemampuannya yang lebih, berhasil menikmati buah ekonomi Tim-Tim.

Memang, setelah propinsi panas ini dinyatakan sebagai daerah terbuka, banyak tenaga kerja dari luar menyerbu masuk. Mereka bukan hanya terdiri dari guru dan tenaga medis yang dibutuhkan, tetapi juga para spekulan pencari kerja, bahkan juga pelacur (Suara Pembaruan, 11 Agustus 1989). Ini menguatkan hasil penelitian P3PK UGM yang dipimpin Mubyarto bahwa kecenderungan meningkatnya pengangguran terdidik dan kemandegan pengembangan ekonomi rakyat menyebabkan semakin jelasnya dikotomi "asli-pendatang".

Situasi tersebut memang sangat memprihatinkan para

pejabat pemda, karena selain menimbulkan permasalahan sosial baru, juga dapat mengganjal proses stabilitas politik di propinsi ini. Bupati Maliana, Mariano Lopez mengakui bahwa perjuangan memang belum selesai. Pembangunan tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba, tetapi setahap demi setahap.

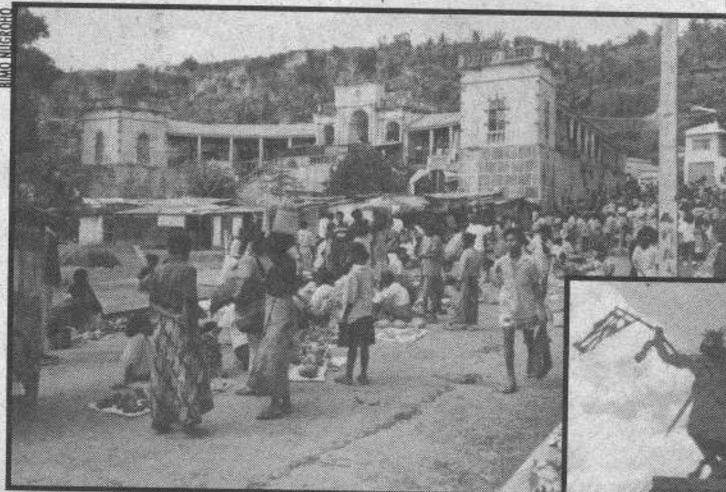
Di lain pihak, menguatnya dikotomi asli pendatang juga menunjukkan lemahnya sumberdaya manusia asli Tim-Tim untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan. Menurut Drs. Markus Wanandi SY, kepala sekolah SMA St Yosep Balide, ini berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan pendidikan. Masa penjajahan Portugal yang sangat memeras dan kemudian disusul perang saudara mengakibatkan kurangnya gizi dan kalori yang sangat penting untuk membangun tubuh dan otak. Banyak siswa cepat lelah belajar, sementara konsentrasi juga mudah terganggu. Di akhir tahun ajaran, mereka yang tidak naik kelas menyulut kerusuhan baru dan merusak sekolah. Bahkan saat pengumuman kelulusan, sebuah SMA di Kota Baucau sampai harus dijaga panser dan satu truk tentara.

Bagaimanapun tabiat generasi muda Tim-Tim saat ini, mereka adalah produk sejarah yang keras. Sepakat dengan kekhawatiran Vittorio Winspeare Guiciardi, utusan khusus Sekjen PBB Kurt Waldheim (1976), bahwa penyelesaian lewat jalan perang pada akhirnya hanya akan menguak luka sosial yang sulit untuk disembuhkan. Dokumentasi berita media massa yang dikliping CSIS selama jalannya perang saudara, mencatat begitu banyak korban telah jatuh di pihak Fretilin, UDT, Apodeti, dan tentara Indonesia. Sejak Desember 1975 s.d Agustus 1976, sekitar 500 tentara Indonesia telah mati terbunuh dan 2000 orang lainnya luka parah. Dan selama tiga tahun perang, jumlah penduduk daerah itu telah menyusut dari 688.771 orang (1974) menjadi 329.271 orang (Oktober 1978).

Betapa mengerikannya perang, dikisahkan seorang Apodeti tua yang pro integrasi. Tidak ada sistem tawanan lantaran perbekalan makan sangat kurang, jadi mereka langsung dibunuh. Perang berdarah di tanah Timor adalah perang alang-ilalang, berebut bukit tertinggi untuk menghabisi musuh dari atas. Seminari *Nossa Senhora de Fatima* nyaris hancur digempur tembakan dari laut dan darat pada tanggal 13 Desember 1975. Reruntuhannya seolah menjadi saksi bisu (Alex Dirdja, *Inter Nos* 1979).

Pertempuran dan pembunuhan beranak-pinak dendam yang tak berkesudahan. Luka inilah yang hendak disembuhkan Gubernur Abilio Osorio Soares. "Kita pernah saling membunuh karena perang saudara. Tetapi kita harus berjiwa besar untuk melupakan segala sesuatunya agar kita mampu menyatukan diri. Hanya dengan bersatu kita mampu untuk membangun." ujar Gubernur yang kakaknya juga jadi korban perang.

Problematika sosial Tim-Tim memang sangat kompleks dan campur-aduk. Seolah, propinsi bungsu ini masih menyimpan letikan percik api dalam sekam pembangunan. Banyak hal sebenarnya terjadi juga di propinsi lain, tetapi di Tim-Tim persoalan kecil kalau dikipasi bisa jadi pengaruhnya sangat besar dan riskan secara politis. Dan binar mata massa internasional tampaknya selalu terangsang menatap liukan fenomena di propinsi muda Indonesia ini.



BIMO NUGROHO



Mercado Municipal Baucau, Pasar Kota
Tugu Integrasi , Benderanya terkoyak (Inzet)

Menurut DR. George Aditjondro, staf pengajar Pasca Sarjana UKSW yang pernah *live in* di sana, ada lima permasalahan lingkungan utama yang menghinggapi bumi *Loro Sae* ini. Pertama, dampak ekologis akibat perang yang dilancarkan untuk menumpas gerakan kemerdekaan setempat. Kedua, dampak pemilikan tanah luas oleh penguasa tanah lama maupun baru. Ketiga, dampak program transmigrasi resmi serta arus migrasi spontan dari Indonesia setelah era perang terbuka. Keempat, dampak program desa binaan serta pembangunan rumah-rumah oleh batalyon-batalyon teritorial. Dan kelima, dampak potensial rencana eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di Celah Timor yang berbatasan dengan Australia.

Dimintai komentarnya, Dubes Australia Allan Taylor yang dicegat BALAIRUNG di Gedung Pusat UGM, menyatakan secara tersirat bahwa Tim-Tim selama ini memang menjadi "corner factor" Indonesia. Tetapi itu urusan Pemerintah Indonesia, negara lain tidak berhak turut campur, tandasnya dalam bahasa Inggris ala Australia.

Corner Factor? Ini istilah sepakbola untuk analogi politik. Bobolnya gawang, jamak berawal dari tendangan pojok yang membahayakan. Dan peran kiper gawang pasti sangat menentukan. Ingat kiper yang mengamankan gawang, tak bisa tidak, sorotan mata tentu bakal mengerling pada ABRI.

***Civic Mission* ABRI**

31 Desember 1978, Nicolau Lobato, pemegang tampuk pimpinan pasukan Fretilin, tewas diberondong peluru perang. Orang menyangka perlawanan senjata akan tumpas habis. Tapi ternyata tidak, Jose Alexandre (Xanana) Gusmao tampil menantang Pemerintah Indonesia. Empat belas tahun lamanya dia naik turun gunung memimpin perlawanan Maubere (sebutan rakyat kecil oleh Fretilin).

Xanana kalah. Subuh 20 November 1991, pasukan elit Baret Merah berhasil meringkusnya di rumah Desa Lahane Barat. Akankah sejarah pertarungan senjata kembali berulang? Naga-naganya bakal lain. ABRI telah menjepit Fretilin hingga tak berkutik. Menurut catatan pihak ABRI, pada November 1989 personel Fretilin tinggal 495 orang, dengan 215 pucuk senapan, di antaranya 72 buah M-16 yang diduga direbut dari pasukan ABRI. Diakui sendiri oleh Xanana dalam pledoinya, "Di sini, pada hari ini, sebagai Komandan Falintil, angkatan bersenjata pembebasan nasional Timor-Timur yang jaya, saya mengaku kalah di lapangan".

Yang terjadi kemudian adalah metamorfosa perlawanan. Benih perubahan itu telah dicium tim P3PK pimpinan Mubyarto, yang mengilustrasikannya sebagai berikut; Suatu fenomena sosial politik baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat Timor-Timur adalah bergesernya 'oposisi' terhadap pemerintah pusat, dari oposisi secara militer ke suatu oposisi baru yang bersifat sipil dengan melibatkan para pelajar sekolah menengah. Bukti yang sangat kuat adalah pecahnya Insiden Dili 12 November 1991, atau *Dili Massacre* menurut istilah Uskup Belo. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena hal itu mengingatkan pada strategi *intifadah* yang dikembangkan PLO dalam melawan pendudukan Israel.

Ketika ini dikonfirmasikan BALAIRUNG pada para demonstran, mereka menjawab bahwa esensinya adalah ketidakadilan yang meruyak di Tanah Timor. "Padahal ada tertulis Pancasila sila kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya? Memang dengan para perwira itu kita bisa bicara, tapi yang ada di lapangan kan mereka balok satu-balok dua." gugat para aktivis garis keras tersebut.





Rumah keluarga di Liquisa
Bocah lelaki dengan Curik-nya (Inzet)

Lantas, phobi apa yang sesungguhnya menghinggapi ABRI di Timor-Timur? Kalau mengacu konsep *Power Theory*nya Cartwright (*Studies in Social Power*, 1959), cukup relevan untuk menganalisis timbulnya impuls naluriah yang egosentrik dari militer untuk menolak setiap cara yang melemahkan pengaruhnya dengan berbagai alasan.

Memang bagaimanapun harus dipahami, ABRI telah berkorban cukup besar di Timor-Timur. Dan imbal baliknya dari segi materi sangat tidak seimbang . Kesan ini terasa dalam interaksi BALAIRUNG dengan beberapa prajurit ABRI tatkala pulang dari Manatuto hingga singgah di tangsi militer Taibesi Dili.

Tetapi mutlak, luka-luka batin di kedua pihak harus cepat disembuhkan dan friksi-friksi musti segera dihentikan. Kalau Gubernur Abilio Soares menghimbau rakyat untuk melupakan masa lalu yang perih, di lain pihak ABRI selayaknya mendukung dengan membangun suasana damai. Seorang pengamat yang tak mau disebut namanya menawarkan tiga langkah. Pertama, memupus kecurigaan intelijen yang terlalu berlebihan hingga menelikung dinamika hidup masyarakat. Kedua, mensosialisasikan penegakan disiplin militer dengan mulai diadakannya persidangan militer yang mengadili anggota ABRI yang melanggar hukum. Dan terakhir, mengintegrasikan *Civic Mission* ABRI (membangun rumah dan infrastruktur sosial) dengan partisipasi masyarakat guna memperkuat kemandirian.

Atau dengan kalimat yang lebih tegas dari Uskup Belo,"Kurangi dulu pasukan ABRI di sini untuk memulihkan rasa damai dan tidak ada perang. Baru setelah itu, mari kita bicara soal pembangunan."

Bimo Nugroho Sekundatmo,
Anthony D.Martin

Gubernur Abilio

"... tidak membunuh"

Bagaimana peran ABRI dalam membangun masyarakat?

Ada banyak informasi dari luar tentang pengambilalihan tugas yang dilakukan ABRI dari tangan sipil, itu tidak benar. Soalnya, ABRI di sini kita yang minta. Satu sisi, kita hendak menunjukkan pada masyarakat bahwa ABRI tidak membunuh tetapi membangun. Di satu segi lagi, jelas-jelas kita membutuhkan ABRI untuk mengerjakan proyek-proyek yang tidak mau dikerjakan oleh swasta karena rugi. Hal tersebut akhirnya hanya bisa dikerjakan oleh ABRI. Misal pembangunan saluran air minum. ABRI kan bekerja tanpa perlu mendapat upah, dana yang kecil tetap dapat mencukupi jika pakai tenaga ABRI.

Dari segi politik, dengan banyaknya aparat keamanan apakah tidak membuat Timtim seperti dalam situasi darurat?

Memang kalau kita sudah memasuki taraf normal maka jumlah ABRI harus dikurangi. Saya tahu ukuran aman tidaknya daerah.

Bukankah itu tetap menimbulkan citra yang buruk di luar negeri?

Ya kita berusaha meng-*counter* itu dengan berita-berita atau data-data yang ada.

Caranya bagaimana?

Lewat media massa, atau lewat wawancara pers seperti ini.

Kalau media massa mencari sumbernya dari Gereja?

Jangan salah persepsi. Kita tidak berbeda, saya sendiri juga umat Gereja. Gereja di sini ya sama posisinya dengan agama lain. Bukan berarti ada dualisme di sini. Tapi kalau ada oknum di Gereja yang belum terima integrasi itu benar. Jelas itu tak bisa dianggap bahwa Gereja pasti anti integrasi.

Bagaimana sikap Bapak terhadap oknum-oknum anti integrasi itu?

Mereka perlu kita bina, kita yakinkan bahwa integrasi adalah jalan terbaik bagi rakyat Tim-Tim. Kita ajak mereka dialog.

Kalau ada yang tak mau diajak dialog?

Saya yakin semua orang bisa diajak dialog. Tergantung cara kita, kalau cara kita baik hasilnya pasti baik. Mereka akan lihat sendiri bagaimana hasil pembangunan selama ini.

Tapi tampaknya ada kesenjangan antara putra daerah dengan penduduk pendatang dalam memanfaatkan hasil pembangunan?

Itulah kecemburuan sosial. Hal itu timbul karena kurang pengetahuan. Di samping perlu bagi kita untuk mencegah arus dari luar yang masuk sehingga kecemburuan sosial makin berkurang.

Kalau arus dari luar dihambat, bukankah kesenjangan justru meningkat antara Tim-Tim dengan daerah lain?

Kalau kita hanya kejar pembangunan tapi dari segi politis tidak kita perhatikan, nantinya juga akan mubazir. Artinya, kita membangun tapi tidak ada rakyat yang menerima, ya itu tidak benar. Jangan sampai kita membangun tapi rakyat tidak merasa memiliki.

Apakah ada prioritas-prioritas untuk mewujudkan hal itu?

Kita tidak pakai prioritas-prioritas, tapi sasaran-sasaran. Sasaran pertama: persatuan, sasaran kedua: lapangan kerja, sasaran ketiga: kaderisasi, keempat adalah perbaikan kehidupan sosial untuk memberantas kemiskinan, dan sasaran kelima yaitu pembinaan ideologi. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, ABRI dan Gereja.

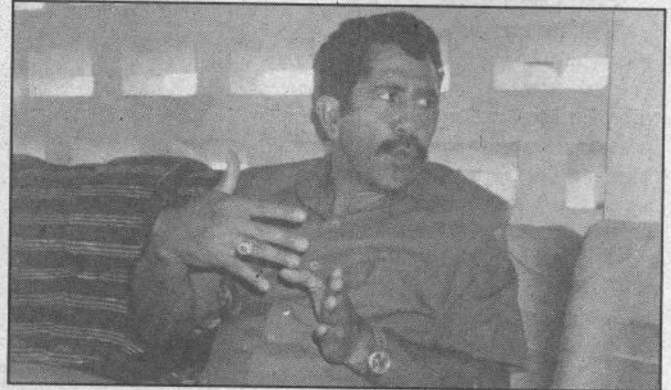
Bagaimana dengan pengusaha, khabarnya Bapak telah melakukan lobby untuk menarik investasi?

Saya merencana terus menerus untuk melakukan itu. Para investor perlu diyakinkan tentang keamanan, lagipula hati kecilnya perlu diketuk untuk berbuat sesuatu bagi sesama. (Wawancara harus segera diakhiri karena Gubernur hendak berdialog dengan Dankorem)

Satu lagi, Pak. Bagaimana dengan tekanan luar negeri soal pelaksanaan Hak Asasi di Tim-Tim?

Tidak perlu kita dengar, kita sudah kerja untuk HAM sebelum orang putih itu kerja. Ingat Konperensi Asia Afrika! Waktu itu orang Barat yang menjajah kita. Jangan dia ngajari kitalah! □

ANTHONY MARTIN



Gubernur Abilio
Kita masih membutuhkan ABRI

Uskup Belo: "...monofungsi saja"

GELEGAR peristiwa 12 November 1991, gemanya menghembus sampai negeri-negeri manca. Dunia terpana dan bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi di tanah Loro Sae ini? Salah satu fokusnya adalah peran Gereja Katolik. Tak pelak lagi orang layak bertanya pada Uskup Carlos Ximenes Belo, sebagai pucuk pimpinan umat Katolik. Atas bantuan Romo Markus Wanandi SY dan rekomendasi surat seorang rekan mahasiswa asal Timtim, BALAIRUNG berhasil mewawancarainya di rumah keuskupan.

ANTHONY MARTIN



Uskup Belo

Kapan kita mendewasakan sipil?

Bagaimana kondisi rakyat Timtim setelah Insiden Dili, Monsinyur?

Kondisi masyarakat, pertama yang dirasakan ialah bahwa ketidakadilan itu belum dicapai 100%. Misalnya saja tentang Insiden Dili. Saya tidak pakai istilah "insiden", apa itu insiden? Itu *massacre*! Bahwa kita pakai "insiden", itu adalah istilah yang terlalu indah untuk suatu hal yang dahsyat sekali, ya...traumatis sekali. Lalu yang kedua, orang-orang yang hilang tidak diketahui di mana jenazahnya dan masih ditunggu di rumah. Harusnya diberitakan. Kemudian, hukuman yang dijatuhkan pada tentara yang menembak itu hanya satu dua tahun. Masyarakat tahu itu tidak adil!

Mengapa mereka tidak bersuara? Masih ada rasa ketakutankah?

Ya, itu memanglah. Orang tidak boleh bicara. Kita harus menutup mulut, karena bisa dilaporkan dan selalu ada orang yang berusaha mendengar. Bahkan di dinding inipun ada telinga (Uskup Belo menunjuk dinding sekelilingnya, tersenyum)

Kalau ketidakpuasan itu menumpuk, tentu akan muncul kekacauan baru.

Bisa. Ya, bisa terjadi.

Lalu bagaimana antisipasinya, Monsinyur?

Bagi saya ya otonomi itu jalan terbaik bagi masyarakat Timtim, bahwa dialah pemilik tanah ini dan bukan warga negara kedua di tanah air sendiri. Bahwa ada pekerjaan di kantor atau instansi, diberikanlah sebanyaknya kepada orang dari sini.

Otonomi yang bagaimana?

Bukan berarti kita terpisah, tapi soal kebebasan yang sudah seharusnya musti diberikan.

Ada tekanan dari militer?

Ya, itulah masih terjadi. Biarlah pembangunan sipil dilakukan oleh orang sipil. Militer sudah dapat gaji sebagai militer. Kapan kita mendewasakan orang sipil? Apakah kita akan hidup terus di bawah militer, sepanjang kehidupan kita? Intel-intel yang mengintai pun meresahkan juga. Selama ini suasana yang diciptakan sudah sedemikian rupa sehingga kita harus hati-hati kalau bicara.

Tapi Monsinyur sendiri tampaknya tak takut bicara keras?

Saya sudah pikir. Toh, saya hanya mati satu kali. Dan pada akhirnya kita semua sudah ditakdirkan untuk mati.

Atau mungkin karena Monsinyur tak punya ikatan dengan pemerintah sehingga bebas bicara?

Saya kira karena saya juga mencintai pemerintah serta berupaya membantu pemerintah untuk memperbaiki situasi. Saya tunjukkan situasi itu yang harus diperbaiki.

Bagaimana caranya memperbaiki, Monsinyur?

Pertama adalah jumlah tentara itu dikurangi sehingga ada rasa damai dan tidak ada lagi perang di sini. Setelah itu mari kita bicara soal pembangunan. Kedua, baru soal kemandirian. Selama tentara ada berlebihan, sulit bagi rakyat untuk mandiri.

Tapi ABRI khan memiliki dwifungsi?

(Uskup Belo tertawa) Saya pribadi lebih setuju yang monofungsi saja.

Kalau memang masyarakat tidak suka militer di pemerintahan, mengapa masyarakat lebih memilih jadi pegawai negeri daripada di sektor swasta?

Karena mereka melihat bahwa di swasta kehidupannya belum terjamin. Ada yang lebih mudah, ya jadi pegawai negeri. Mereka merasa lebih bangga daripada harus pulang bertani di desa.

Lantas mereka mengangkat saudaranya sekeluarga jadi pejabat?

Benar. Itulah yang mereka pelajari selama sekian tahun dari saudaranya di Indonesia.

AD.Martin, Bimo NS

MENGIKIS Arogansi Pusat

Salah satu kearifan penting yang dapat dipetik dari fenomena rontoknya rezim komunis (atau para sosialis menyebutnya Kapitalisme-Negara) di Uni Soviet dan Eropa Timur adalah; ideologi yang secara nasional berusaha menguasai dan mengendalikan seluruh transaksi ekonomi dan politik, akan selalu ditantang untuk dikaji ulang, dan dipertanyakan relevansinya oleh realitas ekonomi politik baru. Sentralisasi berlebih-lebihan yang kerap diimplementasikan rezim otoriter itu, selain akan terbentur dengan terbatasnya kapabilitas elit sendiri, juga akan mengkondisikan situasi ketergantungan yang masif.

Dengan semangat yang tak jauh berbeda, kumpulan tulisan dari 7 bab buku ini, mencoba menginventarisasikan dampak negatif dari pembangunan, yang diproses dengan otoriter. Melalui pintu gerbang eksplanasi yang *general* dan ekshaustif dari Colin MacAndrews (bab I dan II) menyusul penuturannya yang mendetail tentang struktur pemerintahan indonesia (bab III), buku ini mengajak kita bertamasya mengarungi panorama data dan konsep-yang bila dirajut keseluruhan- menorehkan sebuah pesan : Sentralisasi dari berbagai program-program pembangunan yang berkelanjutan, hanya potensial merobohkan prestasi integrator rezim tersebut.

Judul : Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan

Editor : Ichlasul Amal dan Colin MacAndrews

Penerbit : Rajawali Pers, 1993. 212 + viii halaman

Arogansi Pusat

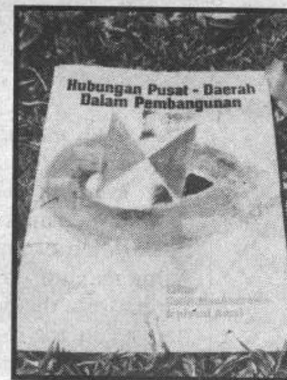
Kesuksesan pemerintah orde baru meredam potensi "makar" daerah, selama lebih dua dekade, ternyata bukan tanpa catatan kritis. Manajemen konflik pusat-daerah yang diberlakukan, ternyata tidak tuntas dalam memotong akar-akar struktural dalam mana, inspirasi sebuah pemberontakan sering direproduksi. Argumentasi ini, terpantul dari, kendatipun kegelisahan daerah tampak berhasil ditekan -namun tidak ditopang dengan bangun infrastruktur yang kokoh. Maka, ketika komponen-komponen pendukung ini berkurang, bahkan menyusut, yakni ketika kucuran dana *oil-boom* merosot drastis, serta bantuan finansial luar negeri mulai seret, ancaman keretakan pusat-daerah potensial kembali menyembul.

Bagi Colins MacAndrews misalnya, yang menyoroti pemerkuatan birokrasi hingga ke taraf ekstra superior dari institusi lain di luarnya, menciptakan mekanisme kerja yang terlampau kaku dan tidak efektif (hal. 62). Sementara komitmen untuk mendongkrak kualitas otonomi daerah , sebagaimana dieksplisitkan UU no. 57/74, pada implikasinya, lebih seperti dituturkan panjang lebar Michael Morfit di bab IV, lebih konsisten memberikan bobot dan otoritas badan pemerintahan pusat ketimbang daerah (hal. 68).

Di tingkat empirik, fungsi perencanaan lebih sering dikonseptualisasikan pusat. Bahkan, implementasinya tak jarang diartikulasikan institusi vertikal seperti kanwil ketimbang dinas daerah. Sehingga, daerah semakin tidak mandiri dalam menyelesaikan problem-problemnya -yang tak jarang lebih dipahami daerah. Potensi untuk mandiri di tingkat daerah ini lantas dibahas lebih lanjut oleh Anne Booth (bab V), yang dalam pengamatannya tentang kebijakan fiskal, menyimpulkan ketergantungan propinsi -yang sering menjadi tafsir konvensional bagi teritori daerah-akibat rendahnya pemanfaatan kemampuan *taxable capacity*. Ketidaksanggupan propinsi untuk membelanjakan anggaran yang ada, bukan disebabkan kurangnya pengalaman daerah, melainkan produk ketidakjelasan administratif dan teknis-operasional yang rentan dengan intervensi pusat (hal. 123-124).

Sementara di bagian akhir, bab VII, Timoty Babcock melengkapi keluhan daerah dengan menonjolkan raut-raut garang dan asing dari program transmigrasi. Arogansi-pusat tampil dengan pencangkokan program yang acapkali tanpa kalkulasi unsur-unsur sosial budaya dan kondisi ekonomi lokal. Sehingga tak jarang dijumpai benturan- benturan antar etnik di area trans. Padahal, jika dikelola dengan baik, dapat benar-benar berfungsi memecahkan masalah kepadatan dan kemiskinan penduduk.

Untuk bab VI, yang memotret dimensi politik hubungan Pusat-daerah, diurai Ichlasul Amal, hemat penulis lebih tepat ditaruh di bagian akhir buku ini. Sekaligus sebagai penutup, yang disepakati penulis cukup tepat melukiskan prospek konflik di masa depan. Yang mana, menurut Ichlasul Amal, akan semakin kecil. Kendatipun demikian, sesungguhnya hanya ditransformir pada lokus yang berbeda. Yakni akan mencuat dari kawasan-kawasan *slums* dari perkotaan. Kasus-kasus 'Tanjung Priok' dan atau semacam 'Haur Koneng', agaknya menjadi persoalan yang tidak mudah diberangus, bahkan dengan *security approach* sekalipun.



Yussac F. Ananda

NUANSA KOLONIAL arsitektur kita

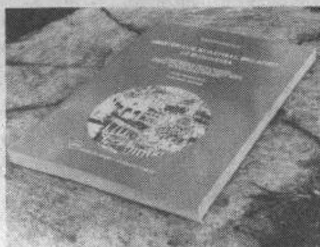
SEJARAH arsitektur Indonesia diwarnai oleh berbagai zaman dan ideologi. Secara fisik, produk-produk arsitektur dari berbagai era itu menjadi kolase dalam pembentukan lingkungan binaan (*built-environment*). Kolase tersebut makin terlihat jelas pada kota-kota yang sudah memiliki sejarah cukup panjang. Kota Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Kudus, ataupun Pasuruan, misalnya, untuk menyebut beberapa kota dengan berbagai skala.

Pembagian era dalam sejarah arsitektur di Indonesia antara lain dapat dibagi atas era Hindu-Buddha dan sebelumnya, era masuknya Islam hingga masuknya pengaruh kolonial, era kolonial hingga kemerdekaan, era kemerdekaan hingga 70-an, dan era pasca 70-an. Dalam buku ini, Yulianto mencoba mengetengahkan era kolonial, khususnya arsitektur kolonial Belanda.

Arsitektur kolonial Belanda ditandai oleh beberapa cir-ciri khasnya :

1. Karya-karya arsitektur pada saat itu banyak dipengaruhi oleh arsitektur Belanda (tipe "townhouse" untuk komersial, misalnya, dapat kita bandingkan antara bangunan Kimia Farma di Malioboro dengan deretan ruko lama di pinggiran kanal Amsterdam), dan untuk tipe hunian mungkin juga berakar dari villa-villa di Prancis (lihat misalnya Villa Isola di Bandung), hal ini juga dapat terlihat pada skala kota, yang memunculkan pola-pola kurvalinear seperti pada konsep-konsep "garden city".

2. Meski demikian, berbagai karya arsitektur zaman itu (yang diciptakan para arsitek dan "arsitek" Belanda) mencoba untuk mengadaptasi arsitektur *vernakular* di Indonesia. Adaptasi ini dilakukan terhadap iklim (adanya teras/teritisan dan *arkade* di sepanjang tepian bangunan dan plafon/atap yang tinggi, misalnya) dan bentuk (atap miring dan beberapa bentuk limasan yang diadaptasikan).



3. Umumnya yang terkait dengan arsitektur kolonial adalah "*grand architecture*" yang merupakan bangunan pemerintahan, pertahanan, perdagangan, ataupun hunian untuk elite sosial saat itu.

Buku Yulianto ini sebenarnya merupakan bagian kedua dari sebuah disertasi yang terdiri atas dua bagian. Disertasi tersebut aslinya berjudul *L'Architecture Colonial Hollandais en Indonesie* yang dipertahankan Yulianto sebagai Thesis *Doktoral Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* di Paris, Prancis, 1988. Bagian pertamanya merunut mengenai perkembangan arsitektur kolonial di Semarang, Magelang, dan Pasuruan.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah studi biografis-arsitektural. Wayne O. Attoe (dalam Snyder & Catanese, 1979) mengungkapkan bahwa kritik arsitektur dengan metoda deskriptif dapat dilakukan salah satunya dengan "*biographical criticism*". Dan seperti juga dalam metoda-metoda kritik deskriptif yang lain, diasumsikan bahwa jika kita tahu lebih banyak mengenai jalannya sejarah, dan juga bagaimana bangunan dan lingkungan itu sesungguhnya, diharapkan kita akan lebih memahami bangunan/lingkungan itu secara lebih baik. Demikian juga dengan buku ini. Buku ini tidaklah memberikan penilaian. Tidak juga memberi kita kiat untuk merancang atau bersikap. Tetapi signifikansinya justru terletak pada deskripsinya mengenai arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Bahwa bangunan bersejarah itu diperlukan sebagai "*collective memory*", dan bahwa itu penting, di sisi lain tanpa perlu disertai oleh kecengengan "romantisme sejarah" yang berlebihan.

Sebagai sebuah karya kritik arsitektur deskriptif, buku ini sangat memadai. Pemilihan kasus-kasus yang dikemukakannya pun cukup variatif dan mencakup rentang karya arsitektur dan para arsitek pada era itu. Kalaupun ada sedikit kekurangan pada buku ini adalah kualitas reproduksi gambar-gambar yang jika dibandingkan dengan buku serupa (Architectuur & Stedebouw in Indonesie karya Huib Akihary, misalnya) terlihat masih kurang memadai. Namun di sisi lain, kekurangan itu tertutup oleh upaya untuk mengkaitkan denah, tampak, dan foto (yang kadang - kadang ditampilkan pada dua era sehingga dapat dibandingkan) yang cukup baik.

Judul Buku:
Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia
Pengarang: Julianto Sumalyo
Penerbit: Gadjah Mada University Press, 1993

Rasanya akan lebih sempurna lagi jika nantinya buku ini dilengkapi dengan bagian pertamanya, dan juga dilengkapi dengan daftar bangunan-bangunan kolonial di Indonesia. Daftar tersebut (saya pernah melihat sebuah daftar yang cukup lengkap milik Prof. Temminck Groll dan Prof. Ronald Gill) beserta data yang melengkapinya niscaya akan menjadi asset yang berharga dalam inventarisasi bangunan-bangunan kolonial (dalam konteks bangunan-bangunan bersejarah) di Indonesia.

Adi Utomo Hatmoko,
Pengajar Teknik Arsitektur UGM

rame rame belajar TENAGA DALAM

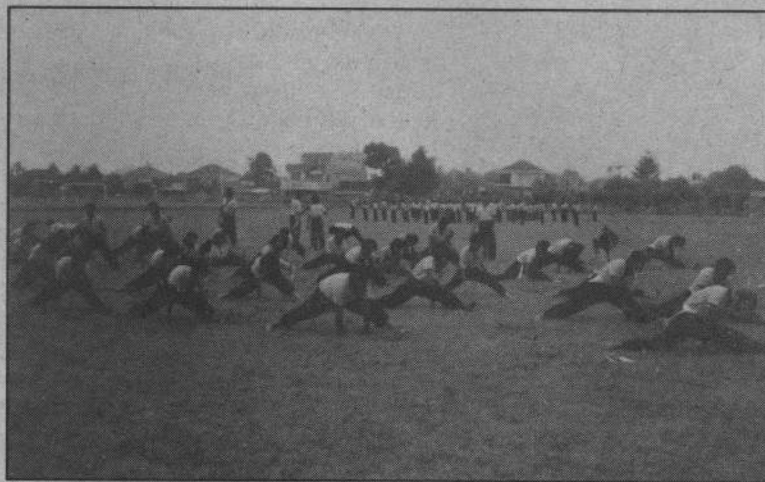
TIDAK aneh sebenarnya jika tenaga dalam diminati karena memang menawarkan sesuatu yang 'lebih'. Terkadang kita juga disuguhi hal-hal yang tidak masuk akal, seperti kekuatan super, kekebalan terhadap senjata tajam, pukulan jarak jauh dan macam-macam 'katosan' lainnya. Seringkali, tenaga dalam juga menawarkan alternatif pemecahan berbagai masalah kehidupan seperti penyembuhan penyakit, ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Hal inilah yang biasanya lebih menarik minat golongan orang tua.

AKHIR-AKHIR ini terlihat perguruan-perguruan tenaga dalam begitu menjamur. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 500 perguruan tenaga dalam di Indonesia dengan 2 juta orang anggota. Kalau ditambah dengan yang tidak tercatat atau hanya tergabung dalam kelompok-kelompok kecil, diperkirakan jumlah pengikutnya sampai empat juta orang.

H. Daliso Rudianto, S.H., Ketua PP IBETADO (Ikatan Beladiri Tenaga Dalam Indonesia) mengatakan bahwa di Yogyakarta yang notabene banyak dihuni oleh pelajar dan mahasiswa, tercatat sebanyak 40 perguruyan tenaga dalam. "Masih banyak perguruan beladiri yang menggunakan tenaga dalam belum bergabung", jelas H. Haliso. IBETADO sendiri saat ini beranggotakan sekitar 100 perguruan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kebanyakan perguruan beladiri tenaga dalam sering bersifat tertutup. "Hal ini disebabkan oleh karakter ilmu tenaga dalam yang bukan untuk pamer", ungkap notaris yang juga pernah menjadi wartawan itu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Yudi, mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, yang melatih anak-anak muda di kampungnya, di bilangan jalan Kaliurang. "Ilmu ini tidak untuk pamer, tetapi akan berfungsi dalam keadaan 'emergency'," ujarnya. Ditambahkannya bahwa belajar tenaga dalam itu bermaksud untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan secara konsekuen sehingga perbuatan kita akan lebih terpelihara.

Agus Salim, mahasiswa Ekonomi Manajemen UII, yang sekampung dengan Yudi mengatakan bahwa dengan adanya latihan tenaga dalam di kampungnya, anak-anak muda mempunyai kegiatan yang lebih positif dan mampu mengurangi kenakalan-kenakalan. "Anak-anak yang suka minum-minuman keras atau '*ngepil*' kini berkurang," katanya.



MISRIN

Suasana latihan
Tenaga dalam memang menawarkan suatu yang "lebih"

Poniman, salah seorang pendiri Lembaga Pengkajian Energi Spiritual Dipta Merta mengatakan bahwa mempelajari tenaga dalam maksudnya adalah untuk mengerti konsep-konsep Tuhan, berangkat dari pengkajian diri sendiri. "Dari segi tujuannya, kalau dibandingkan dengan tarekat mungkin hampir sama, hanya saja di perguruan keinginan-keinginan atau tujuan tertentu masih dominan", katanya menjawab pertanyaan Balairung.

Moral, Keyakinan, Agama

Mempelajari ilmu tenaga dalam di perguruan-perguruan tenaga dalam agaknya selalu dikaitkan dengan aspek-aspek moral dan nilai-nilai spiritual/keagamaan. Umumnya mereka memberikan nasehat kepada murid-muridnya agar tidak melanggar 'mo- limo', berbakti pada orang tua dan selalu beribadah dengan baik.

Beberapa perguruan bahkan mensyaratkan hanya menerima murid yang beragama sesuai dengan landasan perguruan mereka. Meski demikian ada juga perguruan yang menampung murid dengan tidak memandang agama, namun nantinya pada tingkat yang lebih tinggi murid akan diarahkan sesuai agama yang dianut.

Dalam hal metode latihan di berbagai perguruan bermacam-macam, namun tampaknya ada satu hal yang seragam, yaitu menanamkan keyakinan pada Tuhan. Sugesti-sugesti atau ajaran-ajaran spiritual selalu diberikan pada saat latihan, baik dengan mengutip kitab suci, filsafat tradisional ataupun ilmu pengetahuan modern, sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga dalam adalah masalah keyakinan.

"Syarat untuk masuk Prana Sakti harus Islam, tidak bisa ditawar-tawar", tegas Drs. H. Asfanudin Panjaitan, Guru Besar Perguruan Prana Sakti. "Kalau syarat lain *sih*, bisa dirunding", tambah eks pimpinan Laskar Aries Margono di Yogyakarta pada masa bentrokan fisik dengan PKI tahun 1966. Perguruan Prana Sakti yang sering melakukan latihan di pantai Samas ini memang salah satu perguruan yang sangat menekankan aspek agama. Malahan mereka juga mendirikan sebuah masjid di Samas dan sering mengadakan pengajian.

Metode latihan di perguruan-perguruan beladiri tenaga dalam amat beragam. Ada yang dimulai dengan mempelajari jurus- jurus atau gerakan silat, ada juga yang langsung demonstrasi.

"Memang tenaga dalam itu nafsu koq", ujar Sutrisno ketika diminta menjelaskan mengapa


DOK. PRIBADI

H.Daliso Rudianto,S.H.

dalam berbagai demonstrasi tenaga dalam di berbagai perguruan seringkali seorang penyerang harus berusaha membangkitkan emosi dirinya. " Sebetulnya ada tenaga dalam yang lebih hebat, *nggak* pakai emosi-emosian. Tapi langsung bermohon dan berserah diri pada Tuhan, menyatukan cipta, rasa dan karsa", jelasnya panjang lebar.

Drs. Sudirman, seorang dosen yang juga banyak mengamati membenarkan hal di atas. "Di agama manapun, ternyata yang paling kuat adalah yang berserah diri kepada Tuhan", katanya.

Tenaga Dalam Masuk ABRI

Tenaga dalam ternyata tidak hanya diminati di kalangan anak-anak muda saja, namun juga dilatihkan di kalangan ABRI. "Oh, iya mas!, kami juga diajari tenaga dalam", kata seorang kopral satu dengan bangga menjawab pertanyaan BALAIRUNG. Ia menceritakan bahwa kesatuannya mendatangkan pelatih pendekar dari luar. Mereka dikelompokkan dan dilatih oleh pelatih dari berbagai macam perguruan.

"Ilmu beladiri silat dan tenaga dalam aslinya adalah ilmu untuk para ksatria dan prajurit", kata H. Daliso ketika ditanyakan tentang masuknya tenaga dalam ke kalangan ABRI. "Dulu di jaman kemerdekaan, nggak ada orang berani ke front kalau nggak ada pegangan. Kalau belum ke Kiyai belum mantap". Disebutkannya bahwa orang-orang timur pada umumnya, juga bangsa Indonesia menyukai hal-hal gaib, seperti tenaga dalam. "Saya berani katakan bahwa 80 persen orang Indonesia 'berdukun ria'". Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa pasukan ABRI yang dikirim dalam misi PBB ke Kamboja pun dibekali oleh seorang kiai sebelum berangkat.

Banyak Persepsi

Dalam perkembangan perguruan-perguruan tenaga dalam yang demikian marak seperti sekarang ini ternyata persepsi yang ada terhadap ilmu ini bermacam-macam. Ada yang berusaha menjelaskan tenaga dalam secara rasional dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan modern.

Bambang, mahasiswa Fakultas MIPA UGM, anggota perguruan Satria Nusantara menjelaskan bahwa tenaga dalam adalah gelombang elektromagnet yang ditimbulkan tubuh manusia pada saat berkonsentrasi.

Sementara itu Poniman mencoba mendefinisikan tenaga dalam sebagai potensial, daya hidup atau daya vital yang berkaitan dengan seluruh unsur dalam diri manusia. Medan energi tenaga dalam dikatakannya berlapis-lapis dan memiliki sifat-sifat yang bermacam-macam. Orang yang tekun melatih kepekaannya akan mampu melihat medan energi ini, bahkan juga mampu melihat mahluk halus.

Di lain pihak ada yang mengatakan bahwa tenaga dalam adalah getaran ether, suatu zat yang menempati segala ruang, ataupun yang mengatakan adanya suatu gaya alam kelima, yang belum diketahui sains.

Drs. Sudirman menolak konsep mengenai ether seperti di atas. "Hipotesa tentang adanya ether sudah lama ditinggalkan orang, karena tidak terbukti dalam eksperimen", katanya. "Kalau getaran memang ada, *lha wong* bisa dirasakan koq. Cuma itu apa kita tidak tahu", lanjutnya.

Ir. Syahirul Alim, M.Sc. mengatakan bahwa tenaga dalam tidak bisa diukur karena mengandung unsur gaib. "Tenaga dalam tidak diakui oleh sains, teknologi maupun agama", tandasnya. "yang diajarkan dalam perguruan-perguruan itu cuma resep-resep saja".

"Tenaga dalam adalah ilmu empiris, orang tidak akan mengerti kalau tidak melihat atau merasakan langsung", ujar H. Daliso. Ia mengemukakan perlu dilakukan suatu penelitian mengenai tenaga dalam. Sampai saat ini belum diketahui adanya suatu metode atau formula baku yang tepat untuk mengajarkan tenaga dalam.

Yang dilakukan IBETADO sampai saat ini hanyalah mengorganisir dan membina perguruan-perguruan tenaga dalam agar dapat lebih terbuka. "Memang ada keinginan untuk untuk dapat merumuskan formula baku untuk melatihkan tenaga dalam di Indonesia. Namun demikian dalam pertemuan-pertemuan pimpinan perguruan anggota Ibetado, tidak pernah dibicarakan

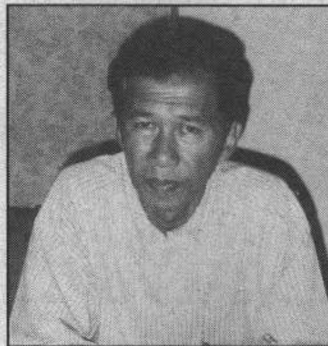

DOK.BOLA

Demonstrasi Tenaga Dalam
Banyak menyuguhkan hal yang tak masuk akal

masalah metode/teknis", ungkapnya.

Agaknya munculnya Ibetado sebagai wadah pembinaan perguruan-perguruan tenaga dalam dinilai baik. Prof. Dr. Koesnadi Harjasoemantri, S.H., pendekar/pembina IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) menyambut baik perkembangan perguruan- perguruan tenaga dalam untuk ikut membina generasi muda. "Perguruan-perguruan tenaga dalam tidak tergabung dalam IPSI karena memang ada kriteria-kriteria yang tidak dapat dipenuhi", jelasnya. "Walau begitu sebenarnya dalam perguruan-perguruan silat anggota IPSI banyak juga yang menggunakan tenaga dalam".

"Kalau tenaga dalam juga masuk katagori olah raga beladiri dan bisa dipertandingkan, sebenarnya saya ingin agar semua lembaga beladiri tergabung dalam satu wadah saja", komentar J. Netra Widji Hartani, Sesepuh P.B. Prisai Sakti Mataram. "Dengan begitu kita akan kelihatan kuat", lanjutnya. Ketika ditanya tentang tenaga dalam, Pak Widji mengelak. "Kami tidak memakai tenaga dalam", katanya. "Kami hanya yakin dan berdo'a kepada Tuhan agar diberi keselamatan". Dalam latihannya Prisai Sakti menggunakan Yoga Asanas untuk membina konsentrasi dan kepribadian.


DSUYONO P.

DR.Damarjati Supajar

Prisai Sakti sendiri adalah salah satu anggota IPSI, namun akhir-akhir ini tidak aktif dalam pertandingan-pertandingan IPSI. "So'alnya kami nggak pernah menang" jelas Pak Widji. "Beladiri Prisai Sakti ini memang nggak cocok dipertandingkan karena sifatnya benar-benar hanya beladiri. Dalam pertarungan yang sesungguhnya, diharapkan dalam beberapa gerakan saja perkelahian sudah dapat diakhiri".

Menurut Poniman, tenaga dalam bisa saja dipertandingkan kalau terminologi dan sistem evaluasinya jelas serta bisa disepakati. Selama ini terminologi tenaga dalam sendiri masih belum jelas dan banyak perbedaan persepsi. Menjawab pertanyaan, benarkah mempelajari tenaga dalam mempunyai efek menurunkan kecerdasan, ia mengatakan tergantung orangnya. "Seharusnya ya tidak demikian, orang yang belajar sesuatu harus menjadi lebih pandai, harus ada nilai tambahnya. Bukannya lalu jadi malas dan bodoh", tukasnya. "Dengan latihan tertentu malahan kita dapat meningkatkan memori atauingatan kita".

Sementara itu R. Gondo Soewandito, sesepuh PPS Panca Daya, mengutip J. Naisbitt, mengemukakan bahwa tahun 2000 adalah trend kebangkitan spiritual. PPS Panca Daya yang didirikannya pada 1 november 1989 dikatakannya ikut serta dalam memelopori kebangkitan spiritual tersebut.

Mungkin benar juga pendapat tersebut, menjamurnya perguruan tenaga dalam... merupakan salah satu tanda abad kebangkitan spiritual ?

Misrin

mencari sosok TENAGA DALAM

FENOMENA tenaga dalam harus dipahami dalam kerangka sistem. Kalau tenaga dalam hanya dipahami hanya secara parsial dengan tujuan-tujuan praktis maka yang terjadi adalah penyalah gunaan dan pengacauan terhadap sistem yang telah ditetapkan Tuhan sudah demikian baiknya bagi manusia.

Demikian diungkapkan oleh Dr. Damardjati Supadjar, Dosen F. Filsafat UGM kepada BALAIRUNG ketika dimintai pendapatnya sehubungan denganm enjamurnyaperguruan-perguruan tenaga dalam. Lebih lanjut dikatakan, sebagai hal yang gaib tenaga dalam harus dipahami lewat kepercayaan, yang dijaga oleh sistem kepercayaan yang dibangun, dengan konsekuensi-konsekuensi yang tertata.

Hampir senada dengan hal itu, Dr. M.S.A. Sastroamidjoyo, yang akrab dengan sebutan Pak Seno, berpendapat bahwa semua hal yang berlaku di masyarakat haruslah disandarkan pada kebudayaan. Sedangkan kebudayaan dibangun oleh hal-hal yang rasional maupun yang tidak rasional, yang berangkat dari kepercayaan. "Biarpun rasional, segala sesuatu yang tidak berdasar pada kebudayaan, buang saja", tegasnya mengutip Schrodinger, ilmuwan yang terkenal dengan persamaan gelombangnya

Sistem kepercayaan, akhirnya mau tidak mau harus berawal dan bermuara pada agama, sistem Tuhan. "Kalau sistem (hakekat) Allah diketahui, maka semua akan tunduk, sujud, sebagaimana mereka sujud kepada Adam", papar Damardjati sembari mengutip salah satu ayat Al-Qur'an. "Hukum alam yang rasional menjadi tidak berlaku manakala terkena hukum yang lebih tinggi".


SUYONO P.

Dr.M.S.A. Sastroamidjoyo

Sementara itu Seno, memandang bahwa hukum Tuhan sebenarnya merupakan satu hal yang padu, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. "Selama ini orang beranggapan bahwa Fisika adalah ilmu yang paling rasional. Sekarang diketahui bahwa kelakuan benda-benda penyusun materi yang kecil-kecil hanya dapat dijelaskan dengan mekanika kuantum yang justru sangat tidak rasional. Statistik yang tidak berdasarkan sebab-akibat pun digunakan untuk menjembatani", urai Seno, ilmuwan yang getol dengan berbagai eksperimen nyentrik. "Orang-orang mengira saya tertarik dengan hal-hal yang tidak rasional dengan tujuan bisa kemudian menjelaskannya dengan fisika agar rasional. Nggak, itu terbalik ! Saya justru ingin dengan hal yang tidak rasional mengeksploitasi yang rasional supaya bermanfaat".

Menilai fenomena meningkatnya minat anak-anak muda dan menjamurnya perguruan tenaga dalam, Seno memandang bahwa anak muda ramai-ramai mempelajari tenaga dalam karena memang gejala sosialnya begitu. "Anak muda itu sama saja dengan Tarzan, Spiderman, Superman dan sebagainya. Itu wajar, namun perlu diluruskan. Kalau orang tua sudah 80 tahun masih begituan, ya namanya kekanak-kanakan", ujar Seno.

Dikatakannya seharusnya kita belajar bagaimana menjadi manusia yang utuh, hidup yang wajar, suka humor, dan sebagainya. "Namun demikian dari yang saya datangi koq hampir tidak ada guru silat yang normal, semuanya aneh", ungkap ilmuwan senior yang sejak 12 tahun sudah belajar berbagi macam silat.

Melengkapi Seno, Damardjati memandang baik dan mengharapkan mereka tetap dalam bingkai spiritualisme dalam rangka menyadarkan manusia. "Jika belajar tenaga dalam dalam rangka jalan pintas, itu keliru. Kalau maunya pintar ya harus belajar ! Jangan merusak sistem, tapi juga jangan berhenti. Niat perlu diluruskan", ujarnya.

Belajar tenaga dalam yang benar adalah mempercepat proses menuju ke tingkat nafsu *mutmainah* (nafsu yang tenang). Orang yang demikian berarti ia meningkat kehidupannya dari sekedar dimensi lahir ke dimensi batin. Dengan demikian pandangannya menjadi luas, kesadarannya penuh dan dadanya lapang.

Mengenai bagaimana mekanisme tenaga dalam secara fisis yang berhubungan dengan emosi, nafsu, jiwa dan raga manusia, dari pelacakan BALAIRUNG selama kurang lebih 3 bulan, tidak didapat penjelasan-penjelasan yang memuaskan secara rasional. Jawaban yang agaknya cukup tepat ternyata diberikan oleh Seno. "Hanya ada duaang dapat saya katakan, ... tidak tahu !",

Misrin, Rahmi L, Rinda.

STOP PRESS !

KONGRES ala PPMI

Ada Kongres PPMI di balik Diklat Pers UII. Sukses, meski harus bergerilya.

SIASAT pun disusun supaya konggres mulus. Dan inilah hasilnya: AD/ART yang telah disusun setahun yang lalu dalam acara Lokakarya nasional Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Malang, disahkan disini.

Sesungguhnya rancangan AD/ART itu telah disusun sejak 1991 di Wanagama, dan dicoba disahkan tahun itu juga di Bandung, tetapi gagal. Dapat dibayangkan betapa panjangnya perjalanan sukses AD/ART PPMI itu. Maka tak ayal lagi, para aktivis tua yang sudi menunda lulusnya jadi terisak haru.

Selain meyepakati AD/ART, pembentukan presidium adalah merupakan puncak dari acara ini. Karena, kalau presidium terbentuk, maka segala konsolidasi dan kegiatan berada ditangannya. Sebelumnya, tugas itu ditangani oleh SC nasional yang telah tuntas wewenangnya bersamaan akhir Kongres.

Pemilihan presidium lancar-lancar saja. Bahkan pemilihan Sekjen yang akan dipegang oleh Yogyakarta sebagai kota penyelenggara, dapat dikatakan mulus. Hanya ada dua calon di sini. Masing-masing adalah Bambang Maryono dari UII dan Rommy Fibri dari UGM. Tanpa *ba* dan *bu* langsung diadakan pemungutan suara. Rommy yang terpilih, selamat menambah catatan hitam para intel.

Presidium yang dibentuk itu meliputi wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan IBT serta Kalimantan. Sedangkan Jawa Barat dan Jakarta, masing-masing hanya bertindak sebagai mediator PPMI dengan daerah, karena tidak berhak mengklaim sebagai wakil wilayah. Ini terjadi karena kondisi wilayah ini memang cukup plural. Ini juga disebabkan koordinasi dari masing-masing SC wilayah tidak lancar. Sesuai dengan kesepakatan Kaliurang, bahwa masing-masing wilayah akan membentuk kantong-kantong penerbitan mahasiswa, yang kelak akan berfungsi sebagai cabang.

Itu pula yang menjadi masukan PPMI dalam mengembangkan organisasi. Karena ternyata masing-masing daerah sangat berlainan tipologinya, sehingga upaya penyeragaman justru akan mematikan potensi yang sebenarnya sudah berkembang. Maka PPMI sepakat tidak akan melaksanakan AD/ART secara kaku. Bila di dalam AD/ART tersebut tercantum hubungan yang vertikal meliputi komisariat, cabang, wilayah dan pusat, maka sekarang justru dicoba menerapkan konsep horisontal. Dengan konsep ini peranan kelompok-kelompok *grass root* justru akan menonjol. Mungkin semacam desentralisasi. Dan masing-masing lembaga penerbitan dan komisariat itulah yang akan menjadi ujung tombak lembaga dalam jaringan informasi.

Konggres kali inipun tidak merancang program yang muluk-muluk. Cukup sekedar konsolidasi dan sosialisasi lembaga saja.



YUSRIL

Air matapun tumpah setelah bergerilya
Layaknya jaman penjajahan saja

Tapi kata-kata sederhana itu tak mudah untuk dicapai. Karena luas dan tersebarnya penerbitan di Indonesia, maka model rayonisasi disepakati untuk manajemen rentang kendali. Rayon ini memungkinkan setiap wilayah untuk berkonsolidasi dengan satu rayon. Ada tiga rayon yang dibentuk, meliputi Rayon Barat yang menggenggam wilayah Sumatera, Jakarta dan Jawa Barat. Rayon Tengah meliputi Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan. Sedangkan Rayon Timur mengangkangi wilayah Sulawesi, Bali dan IBT.

Walaupun demikian, PPMI tidak akan berpretensi sebagai wadah tunggal, sebagaimana lembaga kooptasi. Organisasi ini organisasi alternatif yang independen sebagai wadah penampung aspirasi anggota dan untuk bersama-sama meningkatkan mutu penerbitan.

Sedangkan legalitas lembaga, menjadi tugas presidium untuk mendapatkannya. Namun, untuk sementara lembaga ini akan terus jalan, sebagai lembaga yang dibentuk atas keinginan bersama. Karena, masalah legalitas ternyata cukup pelik. Organisasi ini bakal selalu dipertanyakan, akan berada di bawah koordinasi departemen mana, Deppen, Depdagri atau Depdikbud?

Atau barangkali, tidak perlu ambil pusing memikirkan legalitas. Yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan lembaga. Itu saja dulu. Sepakat?

Sunarto, Bimo

Mengucapkan

"Selamat Datang Mahasiswa Baru"

Universitas Gadjah Mada



Empire 21
8 Theatres
Bioskop Kebanggaan Yogyakarta
Jl. Urip Sumoharjo No. 102-104
Yogyakarta 55222, Phone 64093



Percetakan & Penerbit
Liberty Yogyakarta
Jl. Jayengprawiran 21, 23,
Yogyakarta, 55112,
Telp : 2908, 5692.
Fax : 0274-62854

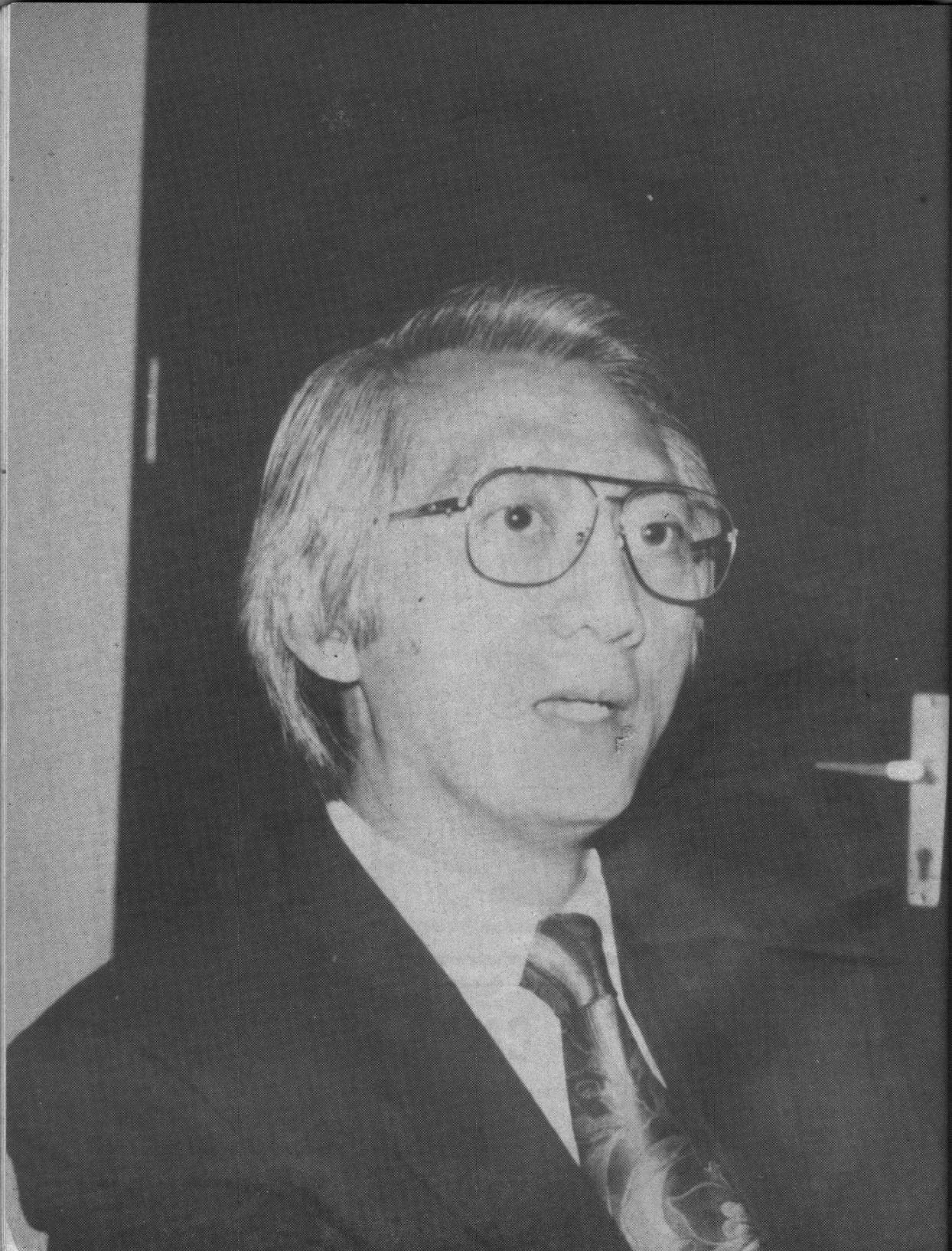


T O K O
KARYA USAHA
Sedia : Kertas dan Alat Tulis
Melayani Partai Besar dan Kecil
JLN. KOL. SUGIONO 15 TELP 75780 - 71440
YOGYAKARTA

Psikomedia
Majalah Psikologi Indonesia
Diterbitkan oleh:
Fakultas Psikologi UGM

CAFNE
TABLOID MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UGM

LEMBAGA PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
Jln. Sugeng Jeroni 49 (BUGISAN) Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 75608 P.O. BOX 1300 Yogyakarta



Kami tidak bicara profit

Ia adalah segelintir trouble shooter industri perbankan yang dengan tangan dinginnya piawai mengobati korporasinya dari puruk kehancuran dan menyulapnya mencapai puncak sukses.

Dengan instink bisnis tempaan puluhan tahun , sang trouble shooter mampu membersihkan koreng- koreng yang membuat perusahaan lesu darah. **Drs. Jusuf Arbianto Tjondro lukito** tak berlebihan disebut trouble shooter karena dari tangannya Bank Danamon mencapai performa mengesankan. Setelah Pakto 1988 Danamon berjaya dengan menjadi bank devisa pertama, diikuti launching produk inovatif perbankan berinisial "Prima", yang cekatan meraup fulus di masa boom Pakto 1988. Danamon juga ekspansif melebarkan sayap ke IBT, juga menggaet Korean Exchange, bank korea pertama yang beroperasi di Indonesia. Juga singgasana bank papan atas yang tak tergoyahkan sampai saat ini.

Lahir di kampung Kebayan Solo, 14 April 1941 dari keluarga sederhana dengan 8 saudara, Jusuf kecil harus membantu ibunya jualan es dan kue lepas sekolah. Diakuinya masa itu adalah masa-masa sulit hidupnya, "Kalau nggak punya duit buat beli buku, terpaksa buku lama dihapus untuk dipakai lagi," kenangnya. Tahun 1959 Jusuf masuk fakultas Ekonomi UGM, mulai berkenalan dengan dunia perbankan. Masa sulit juga menerpanya selama kuliah, waktu senggangnya digunakan untuk nyambi jualan aki mobil yang dibuat dan dibawanya dari Solo. Semasa di UGM pula dia berkenalan dengan mahasiswi Teknologi Pertanian sesama aktivis paduan suara gereja, Abigail Lily Setihati yang dinikahinya tahun

1970 dan memberinya dua anak Immanuel dan Joel Arbianto, keduanya studi di luar negeri. "Nadyan ireng ning ireng manis, soyo suwe soyo ngangeni," (walaupun hitam tapi hitam manis, makin lama makin rindu), komentarnya tentang sang istri kala itu.

Di kantornya yang apik di jalan Kebon sirih Jakarta dia ramah menerima Dewi Nilasari, Putu Mandau dan Danarti dari BALAIRUNG. Dengan temperamen Solo yang kental; low profil, gaya bicara yang halus- lembut. Dengan beberapa interupsi telpon dari kolega dan mitra bisnisnya, tebaran tawa di sana-sini wawancara dua jam berlangsung mulus.

Bagaimana peran kredit untuk pengusaha kecil selama ini?

Kredit Usaha Kecil (KUK) dapat membantu melipatkan output produksinya. Tetapi apakah dia bisa tertolong? Karena persoalan yang terjadi dengan kredit KUK bukan hanya sekedar dia perlu uang tetapi juga *marketing*. Karena kalau kita bantu, kemudian dengan kredit itu dia bisa membeli mesin 1 unit lagi, *output*-nya memang akan berlipat. Tetapi kalau tidak bisa mendapatkan pasar malah akan menjadi beban bagi dia. Ini suatu masalah juga bagi kita bagaimana membantu pemasaran . Itu suatu proses. Jadi persoalan pembangunan itu menariknya disitu, banyak implikasinya, banyak interaksinya. Tidak sekedar memberikan kredit yang murah lalu pasti tertolong.

Timbal baliknya bagi Danamon ?

Banyak sekali. Itu sangat menolong kita dalam memperluas jaringan kredit itu. Memang persoalan pembangunan tidak hanya masalah kredit. Tetapi harus kita ungkapkan juga kasus itu, *marketing* misalnya. Pengusaha kecil itu belum mampu untuk *simple accounting*, bagaimana menangani tagihan. Mereka terlalu sederhana. Sehingga perlu juga dididik. Diperlukan usaha yang terpadu. Untuk itu kita sudah mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk membuat suatu usaha pendidikan yang terpadu bagi pengusaha kecil. Jadi bisa meningkatkan mutu kualitas, mengerti *simple accounting*. Lalu mengenai pemasaran, bank juga membantu. Kita sudah membantu masalah *marketing* ini dengan mencarikan keterkaitan. Sebagai contoh, masalah pengusaha gula kelapa di Purwokerto. Pengusaha gula kelapa bisa menjual hasil produksinya ke pabrik nasabah kita di Jakarta misalnya. Bagaimana membantu supaya pengepul sebagai pengumpul dari petani kecil itu mendapat pembeli yang konstan dan harga yang terjamin. Jadi sama-sama untung. Pabrik nasabah kita juga senang kalau bisa mempunyai arus *suplly* yang konstan, kualitas terjamin, dan harga yang terjamin. Jadi bisa menciptakan suatu mata rantai, saling membantu.

Kenyataannya sekarang bagaimana ?

Itu yang sekarang sedang diusahakan. Membantu pengusaha kecil itu tidak cukup hanya dengan kredit murah tetapi harus terpadu.

....asal ada jaminan, terus diberi kredit. Itu namanya tukang kredit. Rentenir. Bank tidak boleh begitu.

Pendapat bapak soal kredit macet yang banyak menimpa bank pemerintah.

Kalau berbicara tentang kredit macet itu luas dan banyak serta persoalannya itu bermacam-macam. Dan saya rasa tidak bisa langsung dikaitkan bahwa pengusaha besar itu mesti macet. Banyak juga pengusaha besar yang pelunasan kreditnya berjalan lancar. Yang macet itu hanya beberapa saja karena situasi, kondisi ekspor, salah *invest*. Itu yang menjadi persoalan.

Bagaimana cara mengantisipasi kredit macet itu?

Yang paling penting pertama sumberdaya manusia harus betul-betul terdidik dan terlatih. Oleh sebab itu mereka kami gembleng supaya benar-benar bermutu, mempunyai kemampuan dan keahlian, dan wawasannya juga lebih jelas. Selain tipikal tadi kita juga harus mampu melihat prospek. Jadi bank harus menghindari *image* bahwa asal ada jaminan, terus diberi kredit. Itu namanya tukang kredit. Rentenir. Bank tidak boleh begitu. Bank harus mempunyai upaya bahwa proyek ini mempunyai proyek didukung oleh suatu analisa yang harus cukup matang. suatu



Tennis Persahabatan dengan pejabat teras BI

crisibility , cara mengatasi permasalahan.

Bagaimana visi bapak mengenai sumber daya manusia dalam industri perbankan?

Kalau berbicara dari sisi perbankan tentu sumber daya manusia merusakkan kekayaan atau aktiva banyak sekali. Dalam bisnis di bidang jasa pelayanan kepada debitur, kepercayaan masalah yang utama. Kepercayaan tidak bisa diukur dalam waktu singkat, itu memakan waktu. Usaha yang terus menerus harus ada . Sehingga bagi orang yang punya jiwa avonturer mungkin dianggap hanya buang-buang waktu. Jadi mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk itu ? Ya. Boleh dikatakan mungkin Danamon-lah yang pertama punya kampus. Kita punya kampus di Ciawi sebagai kampus Danamon semacam tempat pengemblengan.

Bagaimana karir bapak sewaktu di City bank?

Citybank saya anggap sebagai almamater juga di bidang perbankan. Mereka intensif sekali dalam mengadakan training. pengurus digenjot terus untuk dilatih. mereka tidak segan-segan menganggarkan biaya untuk training, bahkan diharuskan. Jadi kadang-kadang saya disuruh ikut lagi training *accounting* berminggu-minggu di Singapura meskipun sudah capek.tetapi kalau tidak ikut *performance* kita dianggap turun. Tetapi memang betul-betul efektif. Saya baru tahun 1969 masuk, tahun 1970 sudah dikirim ke Manila, terus tahun 1972 ke Philipina, terus ke Paris. Sifatnya orang-orang di CitiBank memang dual tain semua. Boleh dikatakan kami mendahului semuanya.

Awal penempatannya bagaimana pak ?

Di situ mereka jelas sekali *path*-nya. Dilihat kemampunnya, langsung ditempatkan. Tetapi memang diperlukan sekali inisiatif. Pengalaman saya, pertamakali di *Credit Departement* disuruh ngetik segala. Tetapi dari itu bisa belajar *feeling* mengenai kronologis transaksi. Jadi sambil mulai mengerti. Kemudian mencoba berinisiatif membuat analisa neraca.Sambil dikoreksi, nanti bisa melihat potensi dan minatnya.

Dalam Manajemen, sistem manajemen bagaimana yang bapak terapkan ?

Kita di sini *open management* atau dengan kata lain profesional. Wewenang penuh diberikan kepada direksi dan *General Manager* (GM) yang memang betul-betul profesional di bidang perbankan. Dari itu kita sebisa mungkin mengurangi lapis-lapis birokrasi yang menjadi penghambat. Jadi kalau di lihat kamar direksi itu selalu terbuka, selama itu masih urusan bank. Kita selalu menganut prinsip terbuka. Dan direksi itu tidak hanya *nongkrong* menunggu laporan tetapi harus jalan terus ke daerah. Kami selalu adakan pembicaraan dengan para GM, kami datang ke daerah. Sering saya datangnya sepulang dari main tennis terus mampir ke kantor bikin kaget-kaget itu...ha..ha. Ya, mereka harus selalu dalam posisi siap melayani nasabah dan tidak boleh seenaknya. Ya semuanya, semua direksi prinsipnya jangan asal kalau ada masalah terus marah-marah tapi kita harus tahu dan mempunyai jiwa yang *concern*. Apa yang menjadi persoalan satpam atau *costumer service* menjadi masalah saya juga. Saya harus mengerti supaya bisa bersama-sama mencari jalan keluar.



Bersama Rektor UGM

Ikut Andil dalam Pembangunan Gedung MM UGM

Jadi itu cerminan bagaimana menjalin basis yang kuat?

Ya. Wewenang delegasi selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi prinsip kita delegasi seluas-luasnya. Dalam batas-batas wewenang itu kita selalu memberikan delegasi itu. Kita mengutamakannya dalam seleksi, dalam training kita sudah harus bisa melihat siapa yang mempunyai potensi dan siapa yang masih perlu dibimbing.Tidak berarti kepala cabang itu selalu sama, ada yang senior, ada yang yunior. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, bobot, dan pengalamannya. Tipe *marketing*-nya juga

... direksi itu tidak hanya nongkrong menunggu laporan tetapi harus jalan terus ke daerah.

Rotasinya berapa tahun?

Kami tidak menetapkan rotasi itu sebagai suatu jangka waktu tetapi sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lulusan dari UGM apakah orientasi kerakyatan yang dianut UGM mempengaruhi pemikiran-pemikiran bapak ?

Sangat besar pengaruhnya. Kita merasakan bahwa UGM itu tidak hanya sekedar tempat akademisi tetapi kita juga mempunyai wawasan. Pengertian ini berarti bahwa sebetulnya masih banyak yang bisa kita kerjakan. Dari bank saja sebagai salah satu industri potensinya besar sekali untuk dikerjakan karena *banking minded* masyarakat masih boleh dikatakan baru pada tahap-tahap awal. Saya ingat waktu kita pertama kali baru buka cabang di Jayapura dan Danamon adalah bank yang hadir di sana. Orang itu berbondong-bondong datang ke bank seperti demonstran saja. Karena kita membagi hadiah semua bertanya "Pak ini apa yang bisa dapat payung ?" Jadi bisa dibayangkan *gap*-nya pengetahuan tentang manfaat bank. Mereka antri untuk mendapat payung dan tidak tahu produknya apa, apakah itu tabungan, deposito atau rekening. Kebetulan sore harinya itu Jayapura hujan . Wah, seluruh kota memakai payung Danamon ..ha..ha.. Ya, maka dari itu kita perlu bantuan UGM yang pastinya lebih tahu potensi daerah dan bagaimana mengembangkannya. Kita bisa bekerja sama menggali dan meningkatkan kemampuan daerah itu.

Apakah potensi daerah sedang berusaha untuk dijamah untuk selanjutnya lebih berorientasi ke pedesaan yang membutuhkan tangan- tangan profesional ?

Ya. Kalau kembali ke sumberdaya manusia itu, dengan kata lain kembali ke putra daerah. Berapa banyak putra daerah yang kembali untuk membangun daerahnya. Tapi kalau kami buka cabang di daerah, kami mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga setempat, dan terpaksa masih dari Jawa. Kita melatih dan juga mengirim misalnya dari Dili untuk belajar ke Jawa Timur misalnya. Setelah itu kita kirim lebih jauh lagi ke Medan atau ke tempat lain supaya dia mempunyai wawasan nusantara. Ini idealisme, kita tidak bicara profit Jadi jangan hanya teriak "Ah disana tidak ada listrik, tidak ada TV". Ya hanya teriak saja, tapi tidak pernah ke sana.

Ini idealisme, kita tidak bicara profit. Jadi jangan hanya teriak: "Ah disana tidak ada listrik, tidak ada TV". Ya hanya teriak saja, tapi tidak pernah sampai ke sana.

Dua putra bapak sekolah dimana ?

Yang paling besar sedang mengikuti ujian masuk ke University of Hawaii. Yang bungsu di SMA kelas dua di New Zealand.

Mempunyai pertimbangan tertentu untuk mengirim mereka keluar negeri ?

Ya. Yang pertama memang sesuai bakatnya di bidang *human relations*, jadi lebih cocok untuk belajar mengenai ilmu *public relations.* Kalau yang kecil memang maunya sendiri, ingin mandiri, sekolah keluar. disana suasana kekeluargaannya masih kuat. Sekolahnya disiplinnya tinggi. Sekolah itu mengatur bahwa anak ini kostnya diawasi sekolah dan tiap dua minggu sekali wajib lapor bahawa dia sudah mengerjakan PR. Kalau tidak lapor akan dicabut untuk dipindahkan ke keluarga lain yang diusahakan mempunyai anak yang seumur. Di sini itu terlalu banyak, terlalu berat, terlalu generalis. Artinya mengerti semua tetapi hanya sedikit-sedikit.



Di Tengah Keluarga
Memutuskan Mengirim Kedua Putranya Ke Luar Negri

Bapak punya perhatian khusus terhadap putranya.

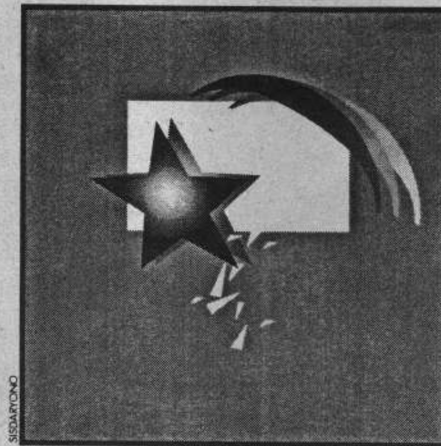
Saya rasa untuk bisa memberikan yang terbaik memang ada kekuataanya, percaya pada Tuhan. Yang dua ini saya utamakan untuk bisa menjadi manusia yang betul-betul berkualitas □

Hastarini
I Putu Mandau,
Dewi Nila, Danarti.

DI tengah meningkatnya semangat keberagamaan, dalam suatu masyarakat, satu persoalan yang memerlukan perhatian bersama ialah kebebasan beragama. Peningkatan kehidupan beragama sering membawa kepada pemahaman bahwa keberagamaan yang benar dilihat hanya pada kecenderungan yang ada. "Mode" beragama ini mengesankan, demikianlah beragama yang benar. Akibatnya, ketidaksetujuan terhadap kecenderungan tersebut akan dinilai bertentangan dengan keberagamaan yang berlaku dalam suatu masa.

Jika keberagamaan tersebut juga terwujud dalam mekanisme kenegaraan, ketidaksetujuan akan berhadapan dengan kekuasaan. Dengan sendirinya, ancaman dan paksaan oleh negara mengandung unsur yang menghambat kebebasan beragama. Kehidupan beragama makin menakutkan, ketika pihak-pihak yang mewujudkan keberagamaan melalui mekanisme kenegaraan justru melengkapi diri dengan berbagai cara untuk memeliharanya, termasuk dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan mutakhir yang bersifat menghancurkan. Dalam suasana itu biasanya perlawanan lunak muncul dalam berbagai anekdot tentang kehidupan keagamaan. Pada satu sisi untuk mengkritik negara, pada sisi yang lain mencerminkan ironi kehidupan sendiri. Di bekas Uni Soviet, suatu ketika kamerad Aminov Aziziyevich (Amin Aziz atau Imranovich Khasbulatov - Imran Khasbullah atau siapapun) sedang menunaikan shalat di sebuah mesjid di kawasan Uzbekistan. Selesai shalat, ia pun mengucapkan doa panjang. Gerak bibir yang memohon kepada Tuhan itu memang tak bersuara dan entah apa yang dimintanya dari Tuhan. Rupanya, seorang petugas intelijen negara (sebut saja Alexandrinovich) sedang mengawasi kawasan sekitar masjid. Ketika Aminov turun dari masjid, kamerad Alexandrinovich mendatanginya dan bertanya, "Begitu lama Anda mengucapkan sesuatu dengan menengadahkan kepala dan mengangkat tangan. Apakah yang sesungguhnya Anda lakukan?" Aminov pun menjawab, "Aku berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupan yang makin sulit ini, ketika kamerad-kamerad di Moscow makin sejahtera, aku minta agar Tuhan menambahkan ketabahan padaku dan menganugerahkan rezeki kepadaku". Agaknya kamerad Aminov sedikit mengkritik gaya hidup memperkaya diri di Kremlin, sambil tetap menunjukkan iman. Si intel tak kurang akal (mungkin memang sudah direncanakan), ia lalu bertanya kembali, "Apakah permintaanmu dipenuhi oleh Tuhan?" Aminov makin bersemangat menjawab, "Aku yakin, Tuhan mendengar permintaanku. Suatu hari nanti kehidupanku akan cerah dan rezeki bertambah".

Tentang Kebebasan Beragama



Nah, untuk mengacaukan keyakinan Aminov dan sekaligus menunjukkan kebaikan partai pemerintah (baca: PKUS), Alexandrinovich lalu merogoh sesuatu dari kantong seragamnya. "Kamerad Aminov, permintaanmu tadi tak ada yang mendengarkan. Sebagai pengganti, terimalah uang seratus rubel ini dari partai dan belilah roti". Tapi Aminov tak kurang akal dan menjawab, "Kamerad intel yang baik, tadi kuminta dua ratus rubel dari Tuhan. Sekarang Anda memberikan seratus rubel, rupanya negara telah memotong seratus rubel".

Di balik anekdot tersebut, sesungguhnya terdapat contoh ekstrim pandangan tentang agama yang menakutkan. Hal ini telah dialami oleh pemeluk-pemeluk agama di wilayah bekas Uni Soviet. Hanya karena negara memiliki pendangan sendiri tentang agama menurut ideologi partai tunggal komunis, baik umat kristiani maupun umat Islam di wilayah tersebut telah mengalami tekanan- tekanan dalam menjalankan agama secara bebas.

Namun kebebasan beragama bukan merupakan masalah yang hanya dapat dilihat dari sudut agama. Kaitan beragama dengan kehidupan negara begitu kuat, lebih-lebih ketika aneka mekanisme serba negara menjamah berbagai kehidupan dewasa ini, negara memang memainkan peran begitu meyakinkan. Bidang-bidang kehidupan yang semula merupakan wilayah bebas bagi rakyat, kini turut diatur oleh negara. Termasuk dalam wilayah ini ialah aspek-aspek kehidupan beragama.

Pada contoh anekdot di atas, beruntunglah karena negara tak melarang Aminov shalat dan berdoa. Bagaimana jika negara menentukan waktu dan tempat shalat, namun juga melarang mereka yang menjalankan secara lain dan bahkan menahan mereka yang mengikuti cara ini? Apakah kebebasan beragama hanya dapat diwujudkan melalui konsep pemisahan agama dari negara? Tapi, apakah pemisahan tersebut selalu menjamin kebebasan beragama? Tak bisakah negara menjarah jauh dalam kehidupan agama dan kebebasan beragama? Jika agama menyatu dengan negara, sedangkan negara memiliki otoritas untuk menerapkan ancaman dan kekerasan, cara inikah yang ingin ditempuh oleh agama untuk mewujudkan dirinya? Persoalan-persoalan ini menunjukkan kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bernegara bukan masalah yang sederhana. Upaya mewujudkan ajaran agama dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat plural maupun homogen juga tak sederhana. Agaknya, setiap waktu diperlukan perenungan yang dalam.

Mohammad Fajrul Falaakh
adalah Staf Pengajar FH UGM

Iptek, Praksis Pendidikan dan Sumberdaya Manusia

SUMBERDAYA manusia selalu menyangkut berbagai permasalahan mendasar dalam masyarakat dan kebudayaan yang kompleks. Bukan hanya struktur mental yang berkembang bersama struktur kognitif, yang turut terbentuk oleh tatanan "basis material" saling mempengaruhi secara organis melainkan juga bagaimana struktur basis material tersebut bisa menciptakan etos kreativitas bagi para pesertanya. Pendidikan misalnya, yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan SDM, tidak bisa dipisahkan dari kreativitas yang berlangsung dalam sistem sosial dan sistem kultural yang ada serta bagaimana paradigma yang diterapkan oleh berbagai prosedur kognitif dan praksis-praksis pengetahuan hidup di dalamnya.

Seperti dalam paradigma humaniora yang terdapat pada prosedur-prosedur kognitif ilmu-ilmu sosial, proses integrasi terhadap pengetahuan lebih mengarah pada pendekatan fenomonologis. Dunia yang bergerak semi otonom. Ditambah lagi, dunia yang diproyeksikan oleh humaniora adalah dunia tempat manusia-manusia dilahirkan, hidup dan akhirnya mati. Dunia dengan sistem-sistem simbolik, sistem nilai dan sistem sosial yang lain saling berkondensasi. Dunia yang coba diabstraksikan melalui prosedur-prosedur yang serba kualitatif. Dunia dari segala macam tekanan sosial, dorongan individual, pertarungan rasio dengan intuisi subyektif, bahasa dan konvensi yang dibentuk bersama dalam konsensus yang mobil.

Sedang dunia sains yang melahirkan iptek adalah merupakan dunia struktur-struktur hasil rekonstruksi yang sangat cermat. Bukan dunia pengalaman antara subyek dan obyek yang unik dan beraneka ragam melainkan dunia keteraturan yang dikuantifikasikan secara radikal. Dunia sains dan teknologi merupakan disiplin kuantitatif yang keras dan identik dengan obyektifikasi yang otonom. Sehingga kalaupun dicari pesan moral yang dibawa oleh humaniora niscaya merupakan wilayah yang berada di luar sistem obyektifikasi.

Inilah perbedaan mendasar dua wilayah yang terbangun atas paradigmanya masing-masing. Proses kognitif yang terjadi juga hasilnya pun akan jauh berbeda. Maka sangatlah beralasan, jika bertolak dari perbedaan paradigma tersebut jika dikatakan bahwa wilayah sains dilepaskan begitu saja dari wilayah humaniora akan menciptakan manusia-manusia yang berpola pikir mekanis. Tapi, bagaimanapun juga, proses kognitif setiap manusia tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan paradigma tunggal. Pendidikan contohnya, akan lebih banyak menyangkut perkembangan menyeluruh pembentukan integritas kemanusiaan secara multidimensional.Humaniora pada dasarnya tidak hanya meletakkan landasan perkembangan kesadaran tersebut melalui wilayah-wilayah normatif seperti dalam kategori-kategori moralistik yang diberikan formalisme agama, melainkan juga meletakkan dasar-dasar integrasi dari sistem pengetahuan yang diperkenalkan sehingga menjelma suatu praksis yang bisa dipertanggungjawabkan baik dalam wilayah keilmuan maupun dalam proyeksi humanistik.

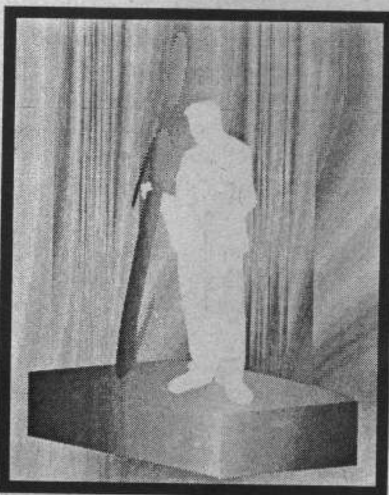
Dalam proses pembentukan kesadaran kognitif yang bersandar secara total pada paradigma sains, segala sesuatu menuntut laku kuantifikasi menyeluruh sehingga ukuran satu-satunya adalah obyektifikasi yang serba matematis, karenanya kesadaran humanistik yang timbul cenderung lebih masif. Inilah yang oleh Habermas kemudian dikritik sebagai proses pengideologian terhadap ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi sebagai ideologi memang tidak memerlukan legitimasi ke dalam sistem kesadaran manusia "rasional" karena pada dirinya mengandung unsur inheren untuk terintegrasi secara langsung ke dalam sistem kognitif para pesertanya lewat praksis-praksis kepentingan. Inilah yang kemudian turut memeperkuat apa yang kemudian disebut teknostruktur. Suatu kondisi kesadaran yang jauh terintervensi oleh hukum-hukum obyektifikasi instrumental ilmu dan teknologi. Sistem kesadaran manusia tidak lagi dibentuk oleh tarik-menarik berbagai dimensi sistem pengetahuan melainkan oleh perilaku mekanistik instrumen teknologi. Ukuran-ukuran moralitas pun kelak tumbuh dari sumber yang sama.

Tentu bukan model kesadaran seperti itulah yang diinginkan dalam sistem pengembangan SDM melalui transformasi ilmu pengetahuan kita. Betapapun abstraknya jargon "pembentukan manusia Indonesia seutuhnya", pada dasarnya mengarah pada manusia otonom yang bebas menentukan eksistensi diri secara multidimensional, yakni bertemunya wilayah sains dan humaniora dalam suatu konstruksi kesadaran pengetahuan yang sepenuhnya manusiawi. Sungguh pun ini cita-cita yang agak utopis, upaya ke arah itu tetap harus dirintis. Dan di sinilah kita bisa meminjam tesis Habermas bahwa pengetahuan dan kepentingan akan menyatu dalam refleksi. Tapi kita harus mener-

jemahkan refleksi dalam arti lain karena dalam terminologi Habermas, reflekasi pada awalnya adalah kritik ideologi. Kritik ideologi yang berasal dari struktur ilmu dan teknologi itu sendiri. Sistem obyektifikasinyalah yang dipersoalkan, agar ilmu dan teknologi jadi lebih emansipatif. Sedang pada kita yang ingin dipersoalkan adalah pada kesadaran pengetahuan itu sendiri sebagai manifestasi dari sistem kognitif yang masih bisa ditransendensikan.

Masalah-Masalah Kongkrit

Masalah yang kita hadapi secara langsung tentu menyangkut wilayah praksis yang menyentuh sistem sosial dan sistem kultural. Ketika kebudayaan terpola ke dalam susunan hierarkhis, mobilitas sistem nilainya akan cenderung bergerak secara vertikal. Inilah yang terjadi dalam kebudayaan kita. Proses reproduksi simbolik, apa-apa yang dianggap sah sebagai tolak ukur kebajikan, "pengetahuan", moralitas, bahasa, semakin lama semakin tergantung pada lingkaran puncak birokrasi. Suatu konstruksi atas wacana simbolik atau penafsiran-penafsiran "keluhuran" dan "kebenaran" atas ideologi baru boleh diintegrasikan ke bawah setelah memperoleh pengesahan (pembenaran) oleh pusat kekuasaan sebagai pemegang otoritas sistem "pengetahuan". Begitu juga sebaliknya, suatu etos simbolik atau kognitif yang tumbuh dari bawah dengan sendirinya tidak memiliki legitimasi dan otoritas untuk diintegrasikan ke dalam kesadaran masyarakat. Maka apa yang disebut kreativitas kultural adalah perwujudan langsung dari gerakan vertikal ini. Kreativitas dari bawah sebagai cerminan paling murni dari sistem kesadaran aktual masyarakat ketika mereproduksi sistem pengetahuan nyaris tidak berkembang. Akibatnya, baik dalam struktur sosial seperti pada lembaga-lembaga politis ekonomis maupun dalam struktur kultural seperti dalam lembaga-lembaga penggalang nilai cenderung bergerak searah, berorientasi vertikal. Lembaga-lembaga semi otonom seperti pemakai wacana bahasa lambat-laun tidak bisa mengelak dari iklim serupa. Kita menjumpai betapa bahasa kita sudah sedemikian rupa terbirokratisasi, bukan hanya dalam struktur verbal dan pembentukan makna antara pertanda dan penanda tapi sudah memasuki wilayah paradigma pikir dalam wacana. Kita mendapat diksi birokratis, pidato-pidato resmi, perumusan-perumusan dalam ideologi, hukum, pers sampai pada media yang dipakai dalam proses pengajaran di sekolah-sekolah.


SISDARYONO

Maka kreativitas dari bawah yang nyaris mati ini tentu turut mempengaruhi kreativitas manusianya ketika melakukan pencerapan terhadap sistem pengetahuan dalam berbagai wilayah kesadarannya. Sulitlah membayangkan bagaimana arah perkembangan etos ilmiah atau disiplin sains dan teknologi dalam sistem kebudayaan semacam itu, juga bagaimana karakter praksisnya.

Hal kedua adalah masalah pendidikan yang berhadapan dengan kepentingan pragmatis yang semakin fragmentatif. Dalam masyarakat yang mulai masuk pada tatanan industrial, kebutuhan sumberdaya manusia semakin ditentukan oleh kepentingan pragmatis dalam disiplin-disiplin kerja yang terpecah-pecah. Kebutuhan industrial yang semakin spesifiklah yang nantinya akan menentukan harga dan nilai produk dari suatu pendidikan. Maka tidaklah mengherankan jika pada masyarakat kita pendidikan model remedial semacam training-training, kursus-kursus, dan sejenisnya dianggap lebih menjanjikan jalan pintas ketimbang perguruan tinggi yang mencetak pengangguran.

Karena pragmatisme lebih "bernilai" ditambah situasi fragmentaris dari wilayah kerja, maka proses pembentukan pengetahuan yang diperlukan juga turut terfragmentasi. Tidak ada lagi guru sebagai figur yang mumpuni dan memegang otoritas dalam segala bidang. Dan bisa jadi guru sebagai figur pelengkap, sebagai pemegang pengetahuan dan moral semakin utopis. Dengan begitu, pengajaran humaniora mesti menemukan format dan orientasi baru. Ketika humaniora berhadapan dengan realitas sistem kesadaran yang ikut terpecah-pecah oleh sistem sosial dan sistem kultural yang terjadi di sekelilingnya mau tak mau dia harus merombak fungsi-fungsi yang diberikan oleh paradigma lama. Ini merupakan tantangan terbesar bagi humaniora, karena akan menyangkut tatanan disiplin tersebut yang langsung menyentuh wilayah paradigmatiknya. Bagaimana menemukan struktur yang lebih organis dengan wilayah kesadaran manusia lebih luas dan bagaimana pembangun basis "pengetahuannya" yang baru.

Adi Wicaksono
adalah peneliti pada MKP2H
(Masyarakat Kajian Pengetahuan, Peradaban dan Hari Depan)
Yogyakarta

Perubahan Sosial: Perintang dan Pendorongnya



ANGIN keterbukaan di Indonesia makin berhembus keras. Dirangkulnya kembali kelompok "pembangkang" petisi 50 sampai puncaknya pada pidato Presiden di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus merupakan isyarat-isyarat yang intinya perbedaan pendapat merupakan hal yang lazim terjadi dan mulai disadari pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I. Keberhasilan pembangunan ekonomi ternyata harus dibayar dengan *social cost* yang cukup mahal, kesenjangan ekonomi yang makin tajam, akumulasi kapital pada segelintir orang saja, belum terjaminnya hak-hak buruh dan berbagai bentuk penyelewengan keuangan yang masih cukup besar. Pada pidato di depan Sidang DPR di atas, Presiden menyinggung hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Antara lain mencakup bidang sosial politik yang secara implisit mengakui bahwa dalam masyarakat yang dinamis terjadinya konflik ataupun pertentangan bersifat alamiah dan tidak bisa dihindari. Antisipasinya bukanlah meredam pertentangan atau konflik tersebut melainkan menyelesaikannya secara damai, etis, adil, dewasa, dan beradab. Mulai disadari bahwa penyelesaian dengan cara-cara yang sifatnya represif-otoriter tidak cocok lagi.Terlepas dari berbagai analisa politik di balik pernyataan-pernyataan itu, sebagai bagian dari warga negara yang telah lama mencita-citakan kehidupan yang lebih demokratis, kita tentu merasa "sedikit" lega. Terasa ada setetes embun yang membasahi kehidupan politik yang selama ini diam, bisu, apatis tanpa orientasi dan dicekam ketakutan. Harapan kita hembusan keterbukaan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi diikuti oleh langkah- langkah kongkrit aparat pemerintah yang ada di bawah.Suatu Fenomena yang WajarApakah realitas di arena pentas perpolitikan yang sedang terjadi ini akan membawa perubahan yang cukup berarti? Atau hanya sekedar selingan saja dan tidak membawa dampak apa-apa? Ada beberapa teori perubahan sosial, salah satunya dari seorang pakar perubahan sosial Robert H. Lauer dalam bukunya *Perspectives on Social Change* Dia menyitir pendapat Wilbert Moore yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola prilaku dan interaksi sosial). Moore memasukkan ke dalam difinisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Dan dalam definisi yang lain disebutkan bahwa perubahan sosial merupakan variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku.

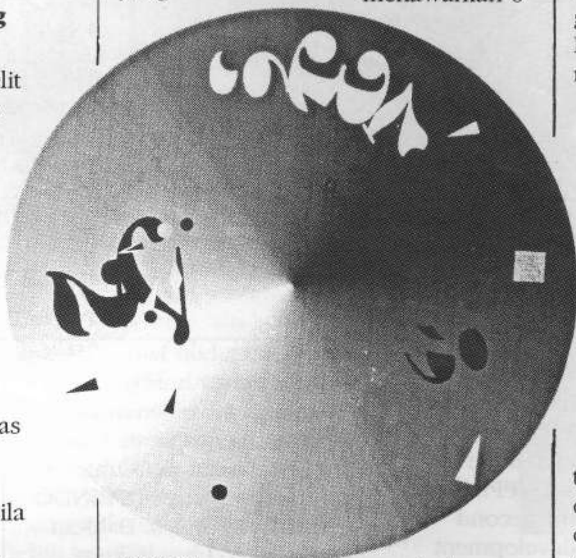
Definisi yang mencakup bidang yang amat luas itu sungguh sangat berguna karena keseluruhan aspek kehidupan sosial itu terus-menerus berubah. Yang berbeda hanyalah tingkat perubahannya. Sikap terhadap fenomena tertentu seperti sikap laki-laki terhadap wanita yang bekerja, mungkin berubah lebih cepat di banding perubahan institusi sosial yang bersangkutan, prosentase wanita yang bekerja di berbagai sektor ekonomi dan sebagainya. Pada konteks yang lain dapat dicontohkan persepsi masyarakat terhadap institusi politik yang lebih demokratis lebih cepat berkembang di banding perubahan institusi politik itu sendiri, untuk menuju keadaan yang lebih demokratis. Maka ketidaksesuaian di setiap periode

tertentu, mencerminkan tingkat perubahan yang berbeda dan bukan mencerminkan persoalan berubah atau tidak berubah. Dengan kata lain, persoalan penting yang mungkin diajukan berkaitan dengan arah dan laju perubahan di berbagai tingkat kehidupan sosial. Perdebatan mengenai perubahan sosial terjadi karena orang lupa tentang berbagai tingkat dan lupa membedakan tingkatannya.

Perintang dan Pendorong Perubahan

Dalam studinya mengenai elit politik Amerika, C. Wright Mills megemukakan, "Fakta besar utama mengenai elit politisi Amerika sebagai keseluruhan adalah bahwa mereka tidak pernah mewakili golongan politik yang saling bercampur dari rakyat". Hampir 60% politisi ini berasal dari kelas berada, hanya sekitar 18% berasal dari kelas rendah dan hanya 5% yang berasal dari kelas terendah. Pemerintah sering berhadapan dengan rintangan (kelompok kelas menengah), bila dilihat dari sudut upaya untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan rakyat bahkan tidak jarang peme-rintah ikut serta dalam suatu sistem eksploitasi golongan mayoritas masyarakat. Fenomena ini tidak saja terjadi pada negara berkembang tetapi juga terjadi pada negara industri maju. Sehingga pemerintah bukan hanya sebagai penghambat perubahan tetapi lebih merupakan sosok negara tradisional yang selalu menindas bagi mayoritas rakyat di negara yang bersangkutan. Pada konteks yang lain pemerintah sebenarnya dapat sebagai salah satu faktor pendorong berbagai jenis perubahan. Berbagai contoh dapat kita ungkapkan, Amerika serikat, misalnya. Pemerintah telah menjadi faktor penting dalam perubahan sosial di negara Paman Sam itu. Mulai dengan perampasan tanah milik orang Indian, pada awal ekspansi orang-orang Barat ke benua Amerika, sampai pada dukungan pemerintah pada industrialisasi, pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pola penggunaan tanah dan berbagai perkembangan baru lainnya. Logika sederhananya, pemerintah merupakan suatu kelompok elite maka perubahan yang di dukungnya itu secara kualitatif tentu akan menguntungkan pemerintah juga.

Contoh menarik lain dapat kita ungkapkan, yaitu pembaharuan di Iran. Pada bulan Januari 1963, Syah Iran melancarkan "Revolusi Putih" yang menawarkan 6



macam pembaharuan. Keenam macam pemaharuan ini mencakup: pembagian tanah (*land reform*); nasionalisasi hutan dan padang pengembalaan ternak; pembagian keuntungan di sektor industri; pemberian hak pilih wanita; upaya peningkatan pelayanan kesehatan; dan pemberantasan buta huruf serta pembaharuan pendidikan. Tetapi program pembaharuan ini di hambat oleh kelas menengah baru yang menolak rencana sosial politik tradisional yang menganggap program Syah itu dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan tradisional dengan mencari dukungan dari petani. Maka pada titik ini kita tahu bahwa sebenarnya kelompok mayoritas masyarakat hanya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan "kelompok elite di pemerintahan". Hal ini semakin diperjelas oleh perkembangan lebih lanjut bahwa pembaharuan itu hanya menguntungkan golongan kecil masyarakat.

Masih dalam konteks yang sama, pembicaraan tentang peran pemerintah dalam perubahan sosial ini harus dikaitkan dengan fenomena sosial politik terakhir yang terjadi di negeri ini. Artinya, apakah sinyal-sinyal pembaharuan yang dilontarkan oleh pemerintah merupakan cerminan suara kelas menengah atau merupakan suara golongan mayoritas masyarakat? Kalau itu merupakan suara kelas menengah tentu pembaharuan yang diharapkan selanjutnya adalah pembaharuan untuk meminimalkan peran negara dalam masyarakat, yang tentu implikasi lebih lanjut pembaharuan ini akan menguntungkan kelas menengah pengusaha. Sedangkan kalau pembaharuan ini merupakan desakan dan cerminan dari golongan mayoritas masyarakat yang selama ini menanggung *social cost* dari pembangunan. Maka pembaharuan yang akan terjadi cenderung lebih radikal tetapi dampak terhadap struktur yang ada di masyarakat tetap kecil. Atau dengan kata lain pembaharuan yang radikal itupun akan terjebak hanya tak lebih dari sekedar "penggantian penghuni istana" belaka.

Dari kenyataan ini kita menjadi sadar memang masih sangat jauh untuk mengharapkan perubahan besar di negeri ini. Persoalannya memang cukup rumit, apalagi kalau perubahan itu diharapkan dapat mengubah struktur yang ada di masyarakat. Perubahan yang paling mungkin dapat terjadi dalam jangka pendek adalah perubahan pada tingkat individu yaitu perubahan tentang persepsi, aspirasi, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Itu pun dengan syarat sinyal-sinyal pembaharuan yang selama dilontarkan oleh Presiden dapat ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan yang konkrit dan didukung oleh segenap aparat pemerintahan.

Arofiq
Pemimpin Umum Majalah Ekonomika FE UII

Birokratis Itu Perlu

"BIROKRASI janganlah diartikan menghambat kerja, tapi itulah kondisi kerja." Demikian **Ir. Kartiyoso**, Direktur muda perkapalan, kebandaraan dan komunikasi Pertamina berkomentar soal birokrasi yang berlebihan di BUMN. "Sebetulnya birokrasi itu perlu, tapi jangan over dosis" kata Insinyur lulusan Teknik Kimia UGM tahun '81 ini. Menurutnya istilah debirokratisasi dan deregulasi itu salah. Yang dihilangkan hanya eksesnya. "Yang penting adalah pengendalian" tuturnya.

Kartiyoso yang ketika muda aktif di Pandu (Pramuka) ini mengatakan Orientasi UGM dulu adalah pegawai negri, makanya banyak yang menjadi birokrat. "Tapi sekarang banyak yang ke swasta" sambil



MANDAU

menambahkan bahwa itu baik. "Kritik saya tentang UGM adalah wirausahanya yang kurang. Semua ingin jadi pegawai negri."

Dewi

Saya sih, ya ...Pacaran



ISTIMEWA

KAWIN saja sama Arief," begitu jawab **Leila Ch. Budiman** saat ditanya apa resep awet mudanya. Padahal wanita cantik ibu dua anak ini mengaku , "Saya dulu malah nggak suka sama Arief. Habis, Arief jelek dan kurus, sih!"

Pengasuh rubrik konsultasi di harian KOMPAS ini juga bercerita tentang masa lalu ketika masih aktif di KAMI, Angkatan 66, "Waktu itu saya suka nulis di harian KAMI. Arief juga aktif di situ. Tapi, kalau dia motifnya idealisme,saya ya...pacaran aja"

Meski motifnya cuma pacaran, ternyata tulisan Leila "boleh" juga. Buktinya KOMPAS langsung mengajukan tawaran padanya saat Brouwer mundur dari jabatan pengasuh rubrik konsultasi. "Waktu itu,saya sempat menolak tawaran KOMPAS, tapi terus saya digoblokin sama Arief. Wong namanya kesempatan." Dan buktinya, rubrik Leila cukup punya banyak penggemar.

Diyah

Ingin Melukis

MOTIVASINYA ketika masuk UPPINDO (tahun 1978) adalah ingin menjadikan UPPINDO menjadi the second biggest development bank. Ternyata usaha **Sarwono Wishnuwar - dhana** berhasil. UPPINDO saat ini menjadi Bank (dulu LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank) mampu meraih aset nomor dua setelah BAPINDO, bank pemerintah lainnya. "Kalau dulu, tahun '78, aset UPPINDO cuma 5 % dari aset BAPINDO, sekarang sudah naik jadi 11 %," tutur Sarwono.

Dua tahun lalu, lelaki yang punya hobby melukis ini sebenarnya sudah mengajukan permohonan pensiun. Namun rupanya UPPINDO masih *nggondeli.* Bahkan alumni fakultas hukum UGM tahun 1963 ini diberi keprcayaan untuk membawa UPPINDO dari LKBB menjadi bank sepenuhnya. Dan kini, tugas itu telah dilaksanakannya. "Saya ingin mewujudkan cita-cita saya dulu.Jadi pelukis.,"jawab Sarwono ketika BALAIRUNG menanyakan kenapa ditengah sukses malah mengajukan pensiun. Ya, selamat berkarya, Pak!

Mandau, Apong



DEWI

Gajah dan Laki-Laki

PERSOALAN penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, seharusnya dipahami sebagai problema kemanusiaan secara universal. Untuk itulah **Riffaat Hassan**, teolog feminis kelahiran Pakistan mengajak laki-laki dan perempuan bersama-sama memperjuangkan gerakan egaliterisme perempuan.


DEWI

Kalaupun banyak berita yang menyudutkan gerakan feminisme di media massa, Riffaat yang telah hidup 25 tahun di Amerika dan tetap mengaku, *"I'm not an American,'* mengatakan kita jangan tertipu. "Saya yakin, sebagian besar perempuan di Barat bercita-cita tidak jauh dari perempuan di belahan timur. Ibu seorang putri (Mona,19), yakin bahwa feminis di Barat punya tiga tujuan, "ingin hidup gembira, berkeluarga yang gembira, dan ingin mengembangkan diri." Tentang gerakan feminis, Riffaat yang berbicara dalam diskusi intern yang diadakan LSPPA , Yogyakarta, bukanlah suatu gerakan yang memusuhi laki-laki. "Gerakan feminis adalah satu gerakan dari laki-laki dan perempuan kepada Tuhan." Ketika seorang peserta laki-laki mengatakan bahwa seorang lelaki lebih utama dari perempuan, Riffaat menjawab tegas, "Gajah lebih kuat dibanding laki-laki. Apakah lantas gajah lebih utama ketimbang laki-laki?"

Dewi

Saya puas...

MENYELENGGARAKAN sebuah *event* bertaraf internasional sungguh tidak mudah, butuh waktu dan perencanaan yang matang. Demikian diungkapkan pertama kali oleh **Rudy Corens**, direktur Proyek Festival internasional" Wayang sedunia 1993 yang sekaligus dosen tamu UGM dari Belgia, ketika ditemui BALAIRUNG. Ayah dua putra ini mengaku bahwa dunia drama adalah hobi utamanya . Ia begitu antusias ketika ditanya mengenai *main reason* dari penyelenggaraan festival tersebut. "Boneka dan wayang adalah bagian dari kehidupan manusia sejak ia kecil hingga dewasa. Sebagai suatu karya seni yang bermutu tinggi, boneka dan wayang juga berfungsi sebagai sarana edukasi


RAHMI

yang efektif dan komunikatif." Dari alasan inilah kemudian ia bekerja sama dengan rambutan *children's centre* mahasiswa dari berbagai universitas dan beberapa kedutaan besar menyelenggarakan festival wayang sedunia bulan juli lalu. Kesan yang dia dapatkan selama proyek tersebut berlangsung, "Saya merasa puas dan gembira sekali, karena tanggapan positif masyarakat terhadap festival itu." Lalu bagaimana kesan selama bekerja sama dengan mahasiswa Yogya? "Saya puas, mereka bekerja dengan baik." seraya tersenyum menutup percakapan.

Rahmi L

Otak-Atik Nama Anak


Dewi

GURU besar Fakultas Teknik UGM yang masih lincah di usianya yang sudah kepala tujuh ini jadi superstar saat MUNAS KAGAMA yang ke-tujuh Agustus lalu di Banjarmasin. Dengan gamblang dia membuat takjub para alumni untuk mencermati Tripikon-S, hasil temuannya. Dua alat yang digarap di laborat Taknik Sipil tradisional tersebut disambut hangat oleh Gubernur Kaltim, H. M. Said yang jadi tuan rumah, "Orang Banjar itu kalau dandan seperti bintang film, tapi sayangnya tak punya kakus sehingga 'limbahnya'' mengotori sungai-sungai. Dengan adanya Tripikon-S dan Pinastik ini, tingkat polusi bisa dikurangi dan sungai semakin bersih".

Soal nama Tripikon S, **Hardjoso** megatakan ,"Tri berawal dari tiga pipa konsentris-septik. Memang pas, karena konstruksi alat tersebut terdiri dari tiga buah pipa konsentris. Tapi, ada yang tidak pas (tidak biasa_red) tentang nama dari ketujuh putra-putrinya. Biasanya, nama anak diambil dari urutan kelahiran anak yang pertama dengan nama Eka, dan seterusnya. Lain halnyadengan Hardjoso. Anak pertamanya bernama Sapta, anak ketiga Panca, anak keempat Tri, dan anak ketujuh (bungsu-Red) bernama Eka. Lha, Pak, bagaimana bisa pas tujuh? "Wah, itu sudah direncanakan bersama isteri saya", seraya tertawa.

Dewi



KABAKIN

□ Dalam suatu forum dialog, Gus Dur protes ketika seorang KATIMIN (Kawasan Timur Indonesia) diberi kesempatan untuk memberi sambutan, "Wah, kalau begitu KABAKIN dan KABAIS harus diberi kesempatan, dong !" Hadirin jadi terhenyak khawatir. Dengan tenang Gus Dur melanjutkan, "Maksud saya, Kalangan Batak Intelek dan Kawasan Barat Indonesia."

Bimo

Rambu Rambu.

□ Gerakan mahasiswa, sering memakai term- term kiri. Baik itu sosialis demokrasi, sosialisme-Islam atau sosialisme marxis. Ketika seorang aktivis ditangkap polisi, di tepi jalan saat dia menyebar selebaran gelap, mahasiswa itu mengadakan pembelaan. "Kenapa kami di tangkap, Pak. Ke KIRI, kan boleh jalan terus, " katanya sambil menunjuk rambu-rambu lalulintas.

Sunarto

Luber

□ Sebuah pertemuan konggres Senat Mahasiswa berlangsung dengan mulus. Tidak ada interupsi, apalagi adu debat. Sampai hari terakhir, saat pemilihan ketua umum pun tak ada hambatan.Tetapi ketika konggres ditutup, seorang peserta berkomentar, " Wah, pemilihan tadi benar-benar berdasarkan prinsip Luber. Artinya, langsung, umum, bebas dan rekayasa.

Sunarto

Utara-Selatan

□ Suatu hari di Bulaksumur B-21 terjadi diskusi yang cukup seru. Tema masalahnya, mengapa Dialog Utara Selatan tidak pernah berjalan efektif ? Berbagai sisi dikupas mendalam dengan perdebatan yang cukup heroik. Kesimpulan jawabnya, ya karena sesuai dengan namanya, dialog utara selatan tak lebih dari *ngobrol ngalor-ngidul*.

Diyah, Bimo

Bosan

□ Seorang mahasiswa peserta penataran protes kepada dosen penatarnya, "Saya tidak habis pikir, ketika memasuki SMP kita ditatar, kemudian ketika masuk SMA ditatar lagi, dan kini ketika menjadi mahasiswa, lagi-lagi harus ikut penataran." Tanpa diduga dosennya menjawab,"Anda baru tiga tahun sekali saja sudah bosan. *Lha* saya ini, setiap tahun harus memberi penataran. Dan itu, BP7 setiap hari mempelajari bahan yang sama."

Sunarto

Aktual

□ Sebuah spanduk besar terentang megah di sebuah kampus. Berisi,

"BARU SAJA TERBIT EDISI TERBARU MAJALAH KAMPUS DENGAN BERITA-BERITA AKTUAL TAHUN LALU"

Diyah

Orisinal

□ Seorang mahasiswa Indonesia yang kebetulan dapat kesempatan melawat ke Eropa penasaran ketika ditemuinya ada kerumunan masa. Ternyata sedang terjadi pelelangan otak disana. Dia terperanjat ketika tahu bahwa otak mahasiswa Indonesia mendapat penawaran paling tinggi. Ketika ditanyakan kepada bagian pelelangan jawabnya, " Ini otak masih orisinal, Tuan. Tidak pernah dipakai ."

Kelik Supriyanto